



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : I  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (RAKER) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP)  
Dengan : Menteri Ketenagakerjaan RI  
Hari, Tanggal : Rabu, 20 November 2019  
Waktu : Pukul 14.23 s.d 16.55 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta  
Ketua Rapat : Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Acara : 1. Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan RI terhadap  
Persiapan Pelaksanaan Program Pra Kerja,  
2. Pemetaan Daerah-daerah Potensi dan Dukungan  
Informasi Teknologi Digital,  
3. Grand Design Pelaksanaan Program Kartu Pra  
Kerja 2020-2024 bagi Pengangguran.  
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.  
Hadir : **A. Anggota DPR RI:**  
45 dari 51 orang Anggota dengan rincian:  
**1. Fraksi PDI Perjuangan**  
1. Dra. SRI RAHAYU  
2. Dra. ELVA HARTATI, S.I.P., M.M.  
3. Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep.  
4. H. IMAM SUROSO, S.H., S.Sos.  
5. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.  
6. MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.  
7. Dr. DEWI ARYANI, M.Si.  
8. H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.  
9. I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.  
**2. Fraksi Partai Golongan Karya**  
1. EMANUEL MELKIADES LAKA LENA  
2. DELA PRATIWI SITEPU, S.H.  
3. Drs. H. DARUL SISKHA  
4. Hj. SANIATUL LATIVA, S.E.

5. Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.
6. Dra. WENNY HARYANTO, S.H.
7. M. YAHYA ZAINI, S.H.

**3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**

1. dr. H. SUIR SYAM, M.Kes., MMR.
2. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.
3. Ir. SRI MELIYANA
4. Ir. H. NUROJI
5. OBON TABRONI
6. drg. PUTIH SARI
7. Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL

**4. Fraksi Partai Nasionalis Demokrat**

1. FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
2. Hj. SRI KUSTINA
3. Drs. FADHOLI
4. RATU NGADU BONU WULLA, S.T.

**5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**

1. Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.
2. Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag. M.M.
3. ARZETI BILBINA, S.E., M.A.P.
4. Ir. NUR YASIN, M.B.A., M.T.
5. ANGGIA ERMA RINI, M.K.N.
6. H. HARUNA, M.A., M.B.A.

**6. Fraksi Partai Demokrat**

1. Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD
2. ANWAR HAFID
3. MUHAMMAD DHEVY BIJAK

**7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

1. H. ANSORY SIREGAR
2. Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
3. dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M.
4. Dr. Hj., NETTY PRASETIYANI, M.Si.
5. H. ALIFUDDIN, S.E., M.E.

**8. Fraksi Partai Amanat Nasional**

1. Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag.,  
M.Hum., M.A.
2. Hj. INTAN FAUZI, S.H., LLM.
3. MESAKH MIRIN, SKM.

**9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

1. Sy. ANAS TAHIR

**B. Pemerintah**

1. MENTERI KETENAGAKERJAAN RI

**KETUA RAPAT (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*  
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.  
*Shaloom.*

Yang terhormat Saudara Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia beserta jajaran,  
Yang saya hormati Anggota Komisi IX DPR RI, serta  
Hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada rapat kerja pada hari ini.

Sebelum rapat kita mulai alangkah baiknya kita semua berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdo'a mulai.

**(BERDOA BERSAMA)**

Berdoa selesai.

Pada saat ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 20 orang dari 51 Anggota dari 9 fraksi dan sesuai dengan Tatib kami skors sidang sebentar karena menunggu bisa kuorum. Jadi saya skors sidang selama 10 menit.

**(RAPAT DIBUKA UNTUK DISKORS PUKUL ..... WIB)**

Jumlah Anggota hadir sudah ditandatangani oleh 26 orang dari 51 Anggota, fraksi komplet 9. Dengan demikian rapat bisa kita lanjutkan. Maka sesuai dengan Pasal 251 rapat dinyatakan kuorum dan dengan demikian rapat saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.23 WIB)**

Mengenai jadwal rapat kami menawarkan kita mulai Jam 10.30 sampai Jam 12.00. Disepakati ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Adapun acara rapat Komisi IX hari ini adalah:

Yang pertama, kita ingin mendapatkan penjelasan dari Ibu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia terhadap persiapan pelaksanaan program pra kerja, kemudian kita bisa melihat pemetaan daerah-daerah potensi dan dukungan informasi teknologi digital dan *grand design* pelaksanaan program kartu pra kerja 2020-2024 bagi pengangguran.

Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya. Kepada Ibu Menteri kami persilakan.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

*Bismillaah, Alhamdulillah, Wassholaatu Wassalaamu 'Alaa Rasuulillaah, Laa Haula Wa laa Quwwata Illaa Billaah, 'Amma Ba'du.*

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX yang saya hormati,

*Alhamdulillah* puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhaanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kasih sayang-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir untuk membahas yang berkaitan dengan program kartu pra kerja.

Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,

Merujuk pada surat yang disampaikan kepada kami, kami diminta untuk memberikan penjelasan terkait persiapan pelaksanaan program kartu pra kerja, pemetaan daerah-daerah potensi dan dukungan informasi teknologi *digital*, kemudian yang ketiga kami diminta untuk menyampaikan *grand design* pelaksanaan program kartu pra kerja 2020-2024.

Izin Pak Ketua, Bapak/Ibu sekalian, kami menghormati terhadap surat yang disampaikan kepada kami dan menghormati permintaan yang disampaikan kepada kami untuk kami menjelaskan. Kami menjelaskan dalam posisi kami menjadi bagian dari proses yang dilakukan menindaklanjuti perintah Bapak Presiden yang dalam hal ini perintah itu akan dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian. Jadi izinkan apa yang kami sampaikan adalah bagian dari apa yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan kartu pra kerja ini. Jadi mungkin banyak hal-hal lain yang nanti mungkin itu masukan dari Bapak/Ibu. Tentu posisi kami adalah menyampaikan apa yang akan Bapak/Ibu sampaikan kepada kami untuk selanjutnya akan kami teruskan kepada Menko Perekonomian.

Baik.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Kami mulai dari/mengacu pada permintaan yang disampaikan kepada kami. Yang pertama kami akan menyampaikan persiapan pelaksanaan program kartu pra kerja. Kartu pra kerja ini atau program kartu pra kerja adalah bantuan pelatihan vokasi yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh aktif dan/atau pekerjaan atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Jadi desain kartu pra kerja tidak dicetak secara fisik, namun berbentuk kartu digital. Bentuk kartu secara digital akan diberlakukan sama untuk peserta yang mendaftar secara *online* lewat kerjasama dengan perusahaan *startup*. Ini juga saya kalau menyebut ada Gojek, ada Tokopedia, ini adalah dalam proses. Kalau saya menyebut-nyebut ini tentu pada akhirnya akan ditindaklanjuti oleh pelaksanaan program. Kemudian *data center* menggunakan fasilitas yang ada pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) yang nanti dikelola oleh PMO (*Project Management Office*) kartu pra kerja. Nanti pada saatnya setelah saya akan memberikan penjelasan nanti saya juga akan menjelaskan tentang sistem ketenagakerjaan yang dibangun oleh Kementerian

Ketenagakerjaan. Nilai insentif sama untuk semua peserta pelatihan vokasi dengan skema kartu pra kerja. Kemudian *unit cost* atau besaran subsidi untuk setiap program pelatihan nanti akan ditentukan oleh PMO sesuai dengan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan. Jadi antar satu pelatihan dengan pelatihan yang lainnya tentu tidak sama kebutuhannya.

Kemudian kriteria penyedia layanan pelatihan ditentukan oleh PMO berdasarkan sumber daya pelatihan yang dimiliki oleh lembaga pelatihan tersebut, seperti ketersediaan instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan pelatihan, fasilitas pelatihan, ketersediaan kurikulum, materi pelatihan yang sesuai serta jejaring lembaga pelatihan dengan dunia kerja dan dunia industri untuk penempatan lulusan pelatihan.

Kemudian yang f, integrasi berbagai data untuk filter penerima kartu pra kerja dimaksudkan agar fasilitas kartu pra kerja tepat sasaran kemudian diberikan kepada yang berhak mendapatkannya. Filter data tersebut antara lain bisa dilihat dari verifikasi KTP, dilihat NIK-nya, kemudian usianya, kemudian status sekolah atau tidak, karena kartu pra kerja ini diberikan kepada mereka yang tidak sedang belajar. Jadi warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas. Yang ketiga kriterianya adalah tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Program kartu pra kerja ini melibatkan K/L (Kementerian/Lembaga) lain dan pemerintah daerah yang memiliki lembaga pelatihan vokasi. Jadi lembaga pelatihan itu kan tidak hanya dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tapi juga dimiliki oleh K/L yang lain, juga dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi memang ini kerja kolosal, melibatkan banyak pihak. Karena yang kita berikan vokasi setiap tahunnya itu 2 juta, jadi angka yang tidak sedikit. Membutuhkan keterlibatan dari banyak *stakeholders*, apakah itu kementerian/lembaga lain ataupun pemerintah daerah dan LPK swasta.

Kemudian prinsip *first in first serve*, artinya yang lebih dulu mendaftar, akan dapat mengikuti pelatihan vokasi di awal dibandingkan yang mendaftar belakangan. Meskipun begitu tetap saja kita menggunakan kuota. Jumlah penerima kartu pra kerja masing-masing wilayah ditentukan oleh variabel-variabel, antara lain tingkat pengangguran terbukanya, jumlah pekerja mudanya dan permintaan tenaga kerja atau lowongan pekerjaan. Jadi mempertimbangkan itu. Setelah kuota itu dibagi, maka kemudian berlaku prinsip *first in first serve*.

Mekanisme programnya kalau dibuat alur maka mekanismenya seperti ini. Calon peserta dapat mendaftar melalui aplikasi pelatihan di *website*-nya [kemnaker.go.id](http://kemnaker.go.id), kemudian aplikasi perusahaan yang bekerjasama dengan program kartu pra kerja. Atau karena kita juga masih membuka ruang bagi rekrutmen secara *offline*, maka peserta juga dapat langsung ke lembaga pelatihan vokasi yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pelatihan dengan mekanisme kartu pra kerja. Jadi kita memberikan kemudahan juga bagi calon peserta kartu pra kerja. Pasti bahwa tidak semua orang Indonesia atau para calon peserta ini memiliki *handphone/gadget*, maka kita juga memberikan kemudahan dengan mendaftar pun dimungkinkan secara *offline*.

Kemudian yang kedua, proses seleksi secara *online* dan hasil diumumkan di *web* [kemnaker.go.id](http://kemnaker.go.id), di aplikasi perusahaan digital yang menjadi partner dan lembaga pelatihan yang ditunjuk, notifikasi lewat *e-mail*

pendaftar, dan cara lainnya untuk memastikan informasi sampai kepada pendaftar.

Kemudian yang ketiga, setelah dinyatakan lulus seleksi calon peserta dapat memilih lembaga pelatihan vokasi yang terdekat dengan domisili melalui *website*-nya Kemnaker atau *web* perusahaan digital yang menjadi *partner*. Jadi memang akan lebih baik peserta itu mendaftar di LPK terdekat/BLK terdekat, sehingga tidak lagi ada beban biaya transportasi bagi calon peserta untuk mendapatkan pelatihan vokasi.

Yang keempat, peserta mengikuti pelatihan vokasi sesuai dengan program pelatihan yang dipilih. Ada program pelatihan yang mengharuskan tatap muka di lembaga pelatihan dan ada juga program pelatihan yang menggunakan *e-learning* atau kombinasi antara keduanya. Jadi pelatihan ini tidak hanya didesain *in-class*, tapi juga dimungkinkan tutorial melalui *online* (*e-learning*) atau mungkin juga mengkombinasikan antara keduanya.

Yang kelima, setelah mengikuti pelatihan peserta pelatihan yang akan mendapatkan sertifikasi pelatihan dari lembaga-lembaga, baik program pelatihan yang membutuhkan sertifikasi kompetensi, peserta pelatihan dapat mengikuti uji kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi. Biaya subsidi dari program kartu pra kerja. Setelah mendapatkan pelatihan tentu memastikan mereka untuk mendapatkan uji kompetensi/mengikuti uji kompetensi dan pada akhirnya mendapatkan sertifikasi.

Yang keenam, setelah selesai pelatihan dan sertifikasi peserta mendapatkan insentif untuk persiapan melamar kerja. Jadi karena mereka posisinya pencaker, maka bisa dilihat bahwa mereka dalam posisi yang tidak memiliki kecukupan finansial untuk mencari lowongan, meskipun sebenarnya sistem ini juga akan mempertemukan antara mereka dengan pasar kerja. Setelah itu, setelah pelatihan peserta akan memberikan *rating* dan ulasan tentang pelaksanaan pelatihan sebagai evaluasi proses pelatihan yang diselenggarakan. Data ini bermanfaat bagi PMO untuk langkah-langkah peningkatan kualitas layanan kartu pra kerja. Kalau Bapak/Ibu biasa menggunakan aplikasi Gojek misalnya, di situ pasti ada ulasannya. Bagi PMO itu sangat bermanfaat untuk melihat kinerja dari lembaga layanan.

Yang kedelapan, survei kebekerjaan dilakukan secara periodik selama tiga kali untuk mendapatkan data apakah lulusan pelatihan sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi tahapan ini dari awal sampai akhir untuk memastikan sesungguhnya yang kita berikan melalui proses pelatihan itu pada akhirnya kita bisa melihat *outcome*-nya adalah penempatan, apakah itu penempatan di pasar kerja atau usaha mandiri.

Yang berikutnya prakiraan kebutuhan anggarannya. Total anggaran yang dialokasikan di APBN 2020 sebesar 10 triliun. Kami mengestimasi kira-kira kebutuhannya itu seperti yang sudah kami sampaikan yang ada dalam *slide*. Biaya pelatihannya 3 sampai 7 juta. Ini tergantung dari jenis pelatihan yang diikuti. Ada yang pelatihan memang dicukupkan hanya dengan 3 juta, ada yang pelatihan mungkin bisa lebih dari itu sampai *range* 7 juta.

Kemudian yang kedua, biaya sertifikasi. Estimasi tertingginya 900 ribu, ini juga bergantung dari apakah program pelatihan tersebut membutuhkan sertifikasi kompetensi atau tidak. Karena mungkin ada beberapa pelatihan yang tidak membutuhkan sertifikasi. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, ada insentif pasca pelatihan sebesar 500 ribu untuk kebutuhan tadi, melamar pekerjaan.

Yang keempat, pengisian survei 3 kali 50 ribu rupiah. Survei kepekerjaan dilakukan tiga kali secara periodik. Setiap kali survei pengisian *questioner* survei lulusan pelatihan mendapatkan *reward* atau insentif sebesar 50 ribu. Kemudian total manfaat yang diperoleh peserta berkisar antara 3 juta 650 ribu sampai 7 juta 650 ribu rupiah. Jadi total anggaran kalau tahun 2020 kita akan pelatihan sebanyak 2 juta orang, maka kira-kira anggaran yang dibutuhkan sekitar 10 triliun.

Yang berikutnya terkait dengan *Project Management Office*. PMO ini dibutuhkan untuk akuntabilitas pengelolaan anggaran, kemudian mengimplementasikan program kartu pra kerja yang melibatkan banyak pihak dengan mengintegrasikan sistem berbasis digital. Kemudian payung hukum untuk PMO ini, Bapak/Ibu, kami sampaikan masih dalam proses finalisasi. Sekali lagi kami sampaikan, ini semua di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Jadi apa yang saya sampaikan sekali lagi, karena Kemenaker menjadi bagian, tapi sesungguhnya pertanggungjawaban semuanya ada pada atau dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian. Saya kira ini tugasnya PMO seperti apa ini yang saya ada di *slide* ini.

Sekarang prosesnya di mana? Saya kira prosesnya, saya sampaikan, sekarang sedang disiapkan landasan hukum/Perpresnya. Draft Perpresnya sedang disusun bersama dengan K/L yang dikoordinasikan dengan Menko Perekonomian. Jadi apa yang sampaikan sekali lagi tadi, ini adalah bagian dari proses yang kita usulkan untuk bisa menjadi bagian dari draft Perpres.

Payung hukum yang lain yang dibutuhkan adalah SK Kemenko Bidang Perekonomian terkait dengan direksi PMO, kemudian Permenko Perekonomian terkait dengan kriteria LPK, insentif, kemudian PMK atau Keppres terkait dengan SBML atau remunerasi bagi PMO-nya. Berdasarkan arahan presiden, PMO kartu pra kerja di bawah Kemenko Bidang Perekonomian.

Kemudian apa yang dilakukan oleh Kemenaker? Kemenaker menyiapkan sistem informasi ketenagakerjaan yang terpadu yang siap mengintegrasikan kartu pra kerja digital maupun reguler. Jadi Kemenaker ini menyambut pelaksanaan kartu pra kerja ini dengan menyiapkan satu sistem yang terintegrasi yang bisa mempertemukan semua *stakeholder* ketenagakerjaan dan sistem ini dibangun untuk menampung ekosistem ketenagakerjaan. Jadi posisi Sisnaker ini adalah menjadi bagian dari pelaksanaan dari PMO itu sendiri. Kalau Sisnaker tentu pasti dikelola oleh kami, Kementerian Ketenagakerjaan.

Saat ini dalam tahapan yang pertama memperkuat *database* kelembagaan dan program pelatihan lintas *stakeholder*. Ada BLK, ada LPKS, ada K/L yang lain yang terlibat dalam skema kartu pra kerja. Ini ada rapat-rapat yang dilakukan antar K/L, sudah dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Kami Kemenaker menjadi bagian dari yang dikoordinasikan oleh Kemenko.

Kemudian yang berikutnya *piloting* penggunaan aplikasi pendaftaran pelatihan di BLK UPTP dan UPTD. Jadi tetap saja juga ada keterlibatan dari BLK-BLK, baik punyanya pemerintah maupun pemerintah daerah. Ini yang dikoordinasikan oleh Kemenaker. Dan sampai hari ini telah dibentuk tim teknis antar K/L di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian untuk membahas lebih lanjut detail isu pra kerja. Saya kira Eselon I dan Eselon II yang selama ini memproses pelaksanaan kartu pra kerja menjadi bagian dari tim teknis dari K/L yang lain.

Yang berikutnya saya akan menyampaikan tentang pemetaan daerah-daerah potensi dan dukungan informasi teknologi digital.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Dari *slide* ini kita bisa melihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) bulan Agustus berdasarkan survei angkatan kerja yang dilakukan oleh BPS sebesar 5,28 persen. Angka ini artinya setiap 100 orang angkatan kerja ada sebanyak 5 orang yang menganggur. TPT ini perlu saya sampaikan, karena ini juga menjadi bagian yang akan digarap oleh kartu pra kerja. Ada 5,28 persen TPT kita, kalau dianggakan 7 juta 50 ribu.

Kemudian kalau dilihat jenis kelamin, tingkat pengangguran terbuka perempuan dan laki-laki hampir sama. Perempuan sebesar 5,23 persen dan TPT laki-laki 5,31 persen, jadi imbang antara penganggur perempuan dengan penganggur laki-laki.

Kemudian kalau dilihat dari tingkat pendidikan, Bapak/Ibu, ternyata TPT tertinggi adalah lulusan SMK sebesar 10,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih tinggi *missed match* pendidikan vokasi SMA dengan kebutuhan dunia kerja. Walaupun secara *trend* TPT SMK itu semakin tahun semakin menurun, tapi kontribusi alumni-alumni SMK kita itu tinggi terhadap TPT, ada 10,42 persen.

Yang berikutnya kita akan lihat tingkat pengangguran terbuka berdasarkan provinsi per Agustus 2019. Hasil survei angkatan kerja nasional khusus tahun 2019 menunjukkan data tingkat pengangguran terbuka terendah ada di Bali, ada cuma 1,52 persen. Dan TPT tertinggi ada di Provinsi Banten, 8,11 persen. Kemudian 4 dari 5 daerah dengan TPT tertinggi. 4 dari provinsi dengan TPT tertinggi adalah provinsi yang memiliki kawasan industri ternyata. Banten, Jawa Barat, kemudian Kepulauan Riau, Sulawesi Utara. Maaf, Jawa Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Maluku. Saya kira ini perlu pendalaman lebih lanjut apakah rendahnya kualitas tenaga kerja atau hal lain yang menjadi penyebab tingginya pengangguran di daerah tersebut. Mungkin ada dari Bapak/Ibu yang Dapilnya Banten, Jawa Barat, Maluku, Kepri, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara Dapilnya Ibu Ketua ternyata menyumbang TPT yang cukup tinggi juga di Sulawesi Utara.

Yang berikutnya kita akan lihat lowongan pekerjaan berdasarkan provinsi. Jadi kalau dibaca dari data ini 5 lowongan pekerjaan terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kepulauan Riau. Jawa Barat, Banten, itu menyumbang TPT, padahal juga di situ lowongan pekerjaan cukup banyak, jadi ada kesenjangan di sini.

Yang berikutnya lowongan pekerjaan Provinsi Banten. Kita akan coba lihat Provinsi Banten. Maaf, saya nanti kalau yang lain kita buka nanti semuanya akan perlu dibuka. Saya akan sampaikan lowongan pekerjaan nasional saja. Jadi lowongan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, 85.318 untuk perempuan dan untuk laki-lakinya 101.883, totalnya ada 187.201.

Kalau dilihat dari lowongan pekerjaan berdasarkan golongan pokok jabatan, maka kita lihat jabatan profesional itu yang pertama; yang kedua itu manajer; yang ketiga teknisi dan asisten ahli; yang keempat operator dan perakitan mesin; yang kelima tenaga tata usaha; yang keenam tenaga usaha jasa dan usaha penjualan; yang ketujuh pekerjaan terampil pertanian, kehutanan dan perikanan; yang kedelapan pekerjaan pengolahan dan



kerajinan; yang kesembilan pekerja kasar ternyata masih cukup tinggi peluangnya.

Yang berikutnya kita masuk pada dukungan informasi teknologi digital. Seperti yang saya sampaikan, kami sedang membangun sudah sejak bulan September sistem ketenagakerjaan. Meskipun pada awalnya tidak saja karena menyambut pelaksanaan kartu pra kerja, tapi memang sistem ini kami butuhkan untuk menyatukan semua sistem yang ada, sehingga mempermudah pelayanan. Jadi sistem ini tidak hanya sistem informasi saja yang kita bangun, tapi adalah sistem pelayanan. Di sinilah kita mempermudah bagi semua *stakeholders* yang terkait dengan ketenagakerjaan.

Jadi kalau dilihat sistem informasi digital ini adalah sistem yang dihadirkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan *real time* untuk bisa mengakses seluruh pelayanan Kemenaker yang sejumlah 16 layanan, mulai dari pencari kerja, K/L, sampai perusahaan.

Saya perlu sampaikan kepada Bapak/Ibu, pada awal-awal saya diminta menjadi menteri saya sudah minta kepada seluruh unit untuk berkomitmen hanya ada satu sistem yang digunakan. Kalau selama ini di masing-masing unit ada sistem, maka kita semua sudah sepakat berkomitmen untuk hanya ada satu sistem yang kita bangun. Semua terintegrasi dalam satu sistem. Tentu sistem ini baru dibangun membutuhkan banyak sekali dukungan dan membutuhkan penyempurnaan-penyempurnaan. Umurnya masih 2 bulan dari sekarang.

Saya akan masuk pada layanan pelatihan, karena terkait dengan kartu pra kerja. Aplikasi pelatihan adalah aplikasi pendaftaran pelatihan bagi masyarakat dan buka pelatihan bagi LPK dan transformasi dari geos3in1.net yang sudah terlebih dahulu dikembangkan Dirjen Binalattas sebelumnya. Untuk bisa membuka pelatihan. LPK harus terdaftar di aplikasi kelembagaan, dan programnya terintegrasi di aplikasi program pelatihan. Mungkin kendalanya sekarang perlu waktu untuk sosialisasi, khususnya bagi LPK atau K/L, BLK-nya UPT/UPTD, LPK swasta dan LPK perusahaan aktif menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini akan menjadi *core* dari pendaftaran program kartu pra kerja dengan beberapa pengembangan, semisal Fintek, absensi, survei penempatan dan lain-lain. Jadi ketemunya seluruh *stakeholder* adalah di sistem.

Kemarin ada beberapa LPK yang datang kepada kami mohon dibantu agar kita ditemukan dengan industri atau perusahaan. Saya sampaikan, "Bapak/Ibu bisa ketemu dengan industri dan perusahaan melalui sistem". Jadi tidak perlu datang ke Kemenaker, *sowan* Pak Yahya tidak perlu, jadi sistemlah yang akan mempertemukan pencari kerja, perusahaan dan LPK-LPK yang ingin menjadi bagian dari sistem yang kita bangun. Nanti jika Bapak/Ibu membutuhkan ingin mendapatkan penjelasan lebih detail tentang Sisnaker, izin Ibu Ketua/Pak Ketua Rapat, izin nanti kami diberi kesempatan untuk bisa memberikan penjelasan tentang sistem yang kita bangun. Karena, Bapak/Ibu, sistem ini sebagai sistem yang baru saya ingin katakan butuh penyempurnaan. Dan yang penting adalah membutuhkan sosialisasi yang harapan kami bisa dilakukan secara masif. Saya bisa berharap dari Bapak/Ibu konstituennya masing-masing untuk bisa menjadi bagian dari Sisnaker ini. Jadi konstituen Bapak/Ibu yang sedang mencari kerja yang usia 18 tahun ke atas diajak untuk menjadi bagian dari sistem ini. Tinggal klik saja nanti akan *profiling* kemampuannya apa. Kalau dia butuh kerja butuh kerja dengan

spesifikasi apa, nanti perusahaan juga dengan gampang bisa mencari pekerja itu lewat sistem yang kita bangun. Ini butuh sekali dukungan dari Bapak/Ibu untuk bisa menyampaikan kepada konsituennya masing-masing mudah-mudahan menjadi bagian dari sistem ini. Bagi kami ini sangat mempermudah memotret ketenagakerjaan kita.

Yang berikutnya terkait dengan *grand design* pelaksanaan program kartu pra kerja. Saya perlu sampaikan, sesuai dengan hasil Ratas 11 November 2019 PMO dan kartu pra kerja akan dikelola oleh Kemenko Bidang Perekonomian, oleh karena itu karena detail pelaksanaan dan *grand design* pelaksanaan program kartu pra kerja ini berada di Kemenko. Sebenarnya awalnya kami memiliki *grand design* pelaksanaan program kartu pra kerja. Tapi menjadi tidak relevan lagi untuk kami sampaikan, karena sudah tidak lagi menjadi kewenangan dari Kemenaker. Jadi saya kira bukan kami yang harus menyampaikan *grand design* pelaksanaan program. Kira-kira mungkin kalau secara umum kan bisa digambarkan *grand design*-nya itu, mulai dari persiapan, kemudian payung hukumnya, kemudian dibentuk oleh TMO, diimplementasikan, mengundang semua *stakeholder* terkait, kemudian baru dilaksanakan. Sebegitulah kira-kira *grand design*-nya. Tahun 2024 memang kita memperkirakan akan ada 10 juta warga negara pada usia tersebut yang mendapatkan pelatihan vokasi. Kira-kira *grand design*-nya seperti itu yang pada akhirnya kemudian TPT-nya bisa kita tekan, para pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi bisa mendapatkan pelatihan, para pekerja yang kena PHK bisa mendapatkan pelatihan vokasi melalui *upskilling* atau mungkin melalui *reskilling*. Kira-kira seperti itu, Pak Ketua.

Selanjutnya kami tentu memohon masukan dari Bapak/Ibu semua untuk penyempurnaan dan kami bersedia menjadi kurir yang baik untuk diteruskan kepada Kemenko Perekonomian.

Terima kasih.

*Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih paparan dari Ibu Menteri.

Ujung terakhir dari paparan Ibu Menteri membuat teman-teman Komisi IX pasti mau tanyanya bagaimana ini. Istilahnya sudah panas paling tinggi tiba-tiba, "*Waduh, tidak jadi*".

Tapi, Bapak/Ibu sekalian para Anggota DPR RI Komisi IX yang terhormat, banyak hal yang sudah tadi Ibu Menteri sampaikan kepada kita, nanti tinggal kita dalam.

Untuk itu kita akan mulai dengan perkenalan dulu. Ada satu Anggota baru kita yang hari ini menjadi keluarga besar Komisi IX. Saya mohon berdiri Drs. Fadholi.

#### **F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalaam.*

Pak Fadholi ini adalah Fraksi Partai Nasdem. Karena alumni Golkar juga langsung akrab dengan Pak Yahya karena sama-sama satu geng. Karena Ibu Sriwulan berpindah ke Komisi IV, kemudian Pak Fadholi yang bergeser ke Komisi IX. Selamat datang Pak Fadholi.

Dan untuk itu kita akan langsung mulai dengan pendalaman. Kita mulai dari..., kita main kiri-kanan ya, dari sebelah kiri yang pertama kepada yang terhormat Pak Edy Wuryanto kami persilakan.

**F-PDIP (Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.KEP.):**

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri, Pak Sekjen, dan seluruh pejabat Kementerian Tenaga Kerja yang saya hormati,  
Anggota Komisi IX yang saya hormati,

Apa yang hari ini kita diskusikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari program strategi nasional, khususnya *quality* SDM, yang pada akhirnya *quality* SDM kita ini harus betul-betul kompetitif. Dan mendengar paparan dari Ibu Menteri tadi ada dua hal yang menjadi kata kunci. Pertama, SDM itu harus kompeten; yang kedua, dari kompetensi itu diharapkan memperoleh pekerjaan yang diharapkan. Dari sistem yang kita buat ini memang yang disampaikan Ibu Menteri sudah sebagian besar desainnya itu sudah mengarah pada dua hal itu.

Tapi kembali bahwa yang dikerjakan ini sangat kompleks, menyangkut 2 juta, dan angka 2 juta dengan anggaran 10 triliun dalam waktu yang singkat ini menjadi persoalan yang sangat kompleks dan harus segera diantisipasi karena melibatkan banyak sektor. Dan kalau bicara pendidikan pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak itu memerlukan kerja keras yang saya kira harus segera di konsolidasikan dengan baik.

Ada beberapa hal yang perlu kita kritisi:

Pertama, peserta. Dari angka 2 juta ini kalau dikaitkan dengan jumlah pengangguran yang ada angka 2 juta ini sebetulnya kecil. Maka seleksi peserta ini menjadi proses penting. Jangan sampai orang yang tidak berminat masuk dalam program ini. Dan juga rakyat jangan terlalu dimanjakan, karena begitu ada *project* seperti ini orang terlibat hanya sekedar ingin memanfaatkan *project* ini, tidak betul-betul ingin menyiapkan dirinya dalam proses kompetensi secara maksimal. Ini yang perlu hati-hati. Maka saya berharap betul dalam proses seleksi peserta hanya orang yang berminat sajalah, hanya orang yang punya motivasi tinggi yang diharapkan masuk dalam *project* ini. Ini yang paling utama.

Yang kedua, dari sisi peserta kalau kita lihat angka-angka pengangguran sebetulnya yang banyak bukan hanya pendidikan menengah ke bawah, tetapi juga universitas ini juga angkanya tinggi (10,42 persen). Rakyat kita yang sudah masuk perguruan tinggi sudah mulai meningkat. Dan justru ketika masuk ke perguruan tinggi ini tingkat penganggurannya malah tambah. Bahasa kasarnya tanggung, pendidikannya tinggi tapi pekerjaannya

sulit, angkanya ada 10,42 persen. Maka menurut saya/pertanyaan saya bagaimana dengan yang pada tingkat universitas ini masuk dalam program ini.

Yang kedua dari sisi lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan ini betul-betul harus kredibel. Jangan sampai hanya sekedar memanfaatkan *project* ini. Maka sisir semua lembaga pelatihan, libatkan terutama yang swasta yang sudah kredibel. Karena kadang-kadang *project* seperti ini menjadi rebutan yang pemerintah dan pemerintah daerah, tapi banyak swasta yang kredibel tidak terlibat. Karena kalau kita kaitkan dengan *quality* pendidikan, maka lembaga pelatihan yang kredibel ini menjadi kunci.

Yang ketiga proses pendidikannya. Proses pendidikan ini juga harus *match* dengan dunia industri. Jangan sampai hanya sekedar melakukan proses pendidikan tetapi tidak *match* dengan kebutuhan dunia kerja. Ini saya kira proses-proses ini harus betul-betul dipantau dengan baik, pada akhirnya sertifikasi yang diberikan itu betul-betul tepat untuk orang yang kompeten sesuai dengan ahlinya.

Di Filipina saya mengamati setiap supir, itu di depan kaca supir itu ada *certified* supir dan cara nyupirnya itu beda dengan nyupirnya orang Indonesia. Ternyata supir di Filipina semua sudah melakukan sertifikasi internasional, sehingga supir-supir Filipina itu tidak hanya bekerja di Filipina, tapi juga dia menyerbu negara lain karena *certified* supir yang dimiliki oleh Filipina. Demikian juga tenaga-tenaga *front office* di Filipina, semua terstandar sertifikasinya. Saya berharap kartu pra kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah ini *outcome*-nya seperti itu, jadi betul-betul *certified* yang dimiliki oleh orang-orang yang masuk pra kerja ini jaminan bahwa dia kompeten di bidangnya masing-masing.

Saya kira itu dulu, nanti pendalaman seterusnya.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Yang berikutnya yang terhormat Pak Anwar Hafid.

#### **F-PD (ANWAR HAFID):**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Para Pimpinan, Ibu Menteri dan Pak Sekjen, Ibu Irjen dan para Dirjen serta seluruh staf yang mendampingi,  
Teman-teman di Komisi IX,

Apa yang baru saja dipaparkan oleh Ibu Menteri saya kira ini adalah salah satu program unggulan Bapak Presiden di periode kedua dan ini tentu mendapat apresiasi dan respon yang sangat positif di tengah-tengah masyarakat saat ini, khususnya para pencari kerja.

Oleh karena itulah pada kesempatan yang baik ini saya berharap bahwa program yang begitu bagus yang memiliki misi saya kira bagaimana menyiapkan tenaga kerja Indonesia/angkatan kerja di Indonesia dalam

menghadapi bonus demografi di tahun 2030 yang akan datang tidak salah sasaran. Maksud saya tidak salah sasaran bahwa program semacam ini sudah sering dilakukan di Indonesia, sehingga nanti yang akan lebih menonjol bukan soal diklatnya, soal bukan keahliannya, tapi justru yang akan menonjol adalah mengejar insentif yang akan diberikan. Saya kira kita harus sepakat bersama bahwa insentif itu adalah bagian kedua. Tapi yang penting adalah bagaimana menciptakan keahlian daripada angkatan kerja kita ini.

Oleh karena itu ada tiga hal yang ingin saya soroti pada kesempatan ini: Yang pertama soal lowongan kerja. Kami berharap, khususnya pribadi saya, Komisi IX yang akan melaksanakan reses dalam waktu yang tidak lama dan pasti hal ini akan kami temui di lapangan, mungkin kami bisa diberi gambaran/diberi data soal lowongan kerja yang tersedia di Indonesia saat ini di segala sektor, sehingga setidaknya walaupun tidak terlalu detail kami bisa memberi penjelasan bahwa lowongan kerja yang tersedia saat ini di Indonesia cukup besar dan itu memberi harapan bagi para pencari kerja.

Kemudian yang kedua tentang lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan ini ada beberapa hal yang perlu saya soroti. Yang pertama soal di mana saja lembaga pelatihan ini tersedia; kemudian yang kedua soal kualifikasi daripada lembaga pelatihan yang akan siap menampung para pencari kerja nanti, mungkin ini juga bisa kami diberi data. Jangan sampai nanti akan muncul seperti disampaikan oleh kawan kami tadi, Pak Edy, bahwa akan banyak lembaga-lembaga pelatihan yang akan mengejar daripada *project* daripada hasil yang akan didapatkan.

Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan juga pada kesempatan kali ini adalah soal..., tadi saya belum dengar, karena ini ada dua hal, soal keahlian dan insentif, berapa insentif yang akan diberikan kepada pencari kerja itu. Karena ini menjadi pertanyaan.

Kemarin malam saya pertemuan dengan mahasiswa di Makassar, mereka mempertanyakan, "Kalau kami selesai kuliah, apa program pemerintah?" Saya sudah menjelaskan apa yang..., sekalipun saya baru dijelaskan hari ini, tapi saya sudah memberikan gambaran ada program pemerintah saat ini tentang program kartu pra kerja.

Selanjutnya saya ingin menggambarkan kepada Ibu Menteri, ini aspirasi dari Dapil, saya dari Sulawesi Tengah, kita tahu persis bahwa Sulawesi Tengah itu tanggal 28 September 2018 mengalami musibah gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Dampak dari bencana alam ini tentu memporak-porandakan usaha dan sebagainya, sehingga dari data yang ada bahwa angkatan kerja/tenaga kerja yang bekerja menurun drastis setelah pasca gempa, kemudian infrastruktur banyak yang rusak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya mengharapkan kepada Ibu Menteri kiranya Provinsi Sulawesi Tengah sekalipun saya lihat tadi data dari BPS itu tingkat pengangguran terbuka mungkin Sulawesi Tengah yang paling rendah, kurang lebih sekitar 3,15 untuk seluruh Indonesia, namun demikian ini kayaknya data ini data sebelum gempa. Oleh karena itu saya berharap kiranya dalam program ke depan memprioritaskan daerah-daerah yang terdampak bencana. Karena pasti akan mengalami lonjakan pengangguran karena sebab infrastruktur dan lain-lain yang diakibatkan oleh bencana alam tadi.

Kira-kira itu beberapa hal yang saya sampaikan.

Terima kasih atas tanggapannya.

*Wallaahu Musta'an,*

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Berikutnya yang terhormat Ibu Dewi Asmara.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Kepada Ibu Menteri mungkin yang pertama-tama kami ingin sampaikan adalah meskipun program ini sesuai keputusan berada di bawah Menko Perekonomian tentunya kami harapkan Kemenaker bisa memberikan gambaran lebih komprehensif terkait program ini. Karena kalau tidak, tidak begitu jelas apa peran Kemenaker untuk terlaksananya program ini, sehingga bisa menjawab segala permasalahan tenaga kerja.

Melalui Pimpinan dalam hal ini perlu juga kita pikirkan, seandainya banyak pertanyaan teman-teman yang tidak bisa dijawab oleh Ibu Menaker, maka ini menjadi bagaimana? Apakah kita tentunya dalam hal ini, karena ini di bawah Kemenko, jangan juga kemudian kita menjadi tidak bisa memahaminya secara komprehensif. Karena kami yakin dan percaya bahwa ini memang adalah produk unggulan dari Pak Presiden yang tentu kami akan dukung sepenuhnya. Tetapi tentu juga kami dalam rangka mendukung perlu mengetahuinya secara komprehensif.

Seperti yang saya gambarkan adalah yang pertama, sesungguhnya kami ingin bertanya siapa yang berhak untuk menerima kartu pra kerja ini? Karena di sini kan ada dua, adalah pencari kerja yang belum pernah dapat pekerjaan, mereka adalah angkatan muda yang misalnya melamar belum diterima atau mereka yang PHK. Kami tentunya dengan dana yang begitu besar, 10 triliun ini, ini tentunya adalah apakah kita akan lebih mengkonsentrasikan mempersiapkan generasi muda melalui pelatihan kerja atau pada satu sisi.

Saya teringat bahwa keadaan perekonomian dunia ini tidak cukup baik, 2019, 2020 dan 2021 sebagai eksekusi dari 2018 PHK akan naik, lalu ini tentunya juga antara lain bisa menjadi satu solusi mereka yang PHK ini menerima kartu pra kerja. Dengan demikian tentunya ini yang saya katakan tadi, kami berharap akan ada satu prosentase tertentu, katakanlah tentu menurut keadaan mana yang paling sedang *urgent*, apakah yang PHK, apakah pencari kerja. Karena kita lihat data BPS Februari 2019 tingkat pengangguran terbuka itu 6,82 juta, jadi tentunya kalau 10 triliun itu kan memang kurang.

Pada satu sisi yang lain, saya ingin mengingatkan Ibu Menteri bahwa kita akan menggenjot investasi, kita akan membuat Undang-Undang Omnibuslaw, dan pasti banyak perusahaan, karena keadaan ekonomi dunia akan PHK, ini perlu penanganan khusus. Apakah dengan kartu pra kerja ini antara lain untuk menghadapi ledakan daripada PHK yang akan terjadi. Atau yang saya katakan tadi, untuk mempersiapkan generasi muda. Ini perlu pemikiran.

Itu mungkin yang harus saya harapkan bisa dicatat. Karena paling tidak bagaimana mekanisme kerja sama antar lembaga/*stakeholder* untuk

memastikan program ini tepat sasaran. Ini kan paling tidak harus melibatkan BPS.

Belum lagi melibatkan industri terkait, yaitu apa, industri yang mengalami PHK. Industri inikan harus melapor, tentunya harus Ibu berikan kewajiban industri yang mengalami PHK wajib lapor, sehingga nanti data itu bisa *linkage*. Misalnya industri apa yang kemudian PHK dan itu bisa masuk pusat data, dan industri apa yang mempunyai pelatihan-pelatihan.

Saya teringat kalau tidak salah, semacam sistem magang, itu beberapa kementerian itu/pabrik-pabrik memberikan pemagangan sampai kepada mereka yang katakanlah mempunyai juga keterbatasan, itu dengan jumlah yang sangat tinggi. Jadi semacam program 'bapak asuh' barangkali, jadi pemuda-pemuda itu magang di perusahaan-perusahaan. Karena apa, banyak sekali BLK ataupun SMK itu mesinnya sudah tua, tidak bisa berfungsi, sehingga mereka itu ditempatkan oleh Kementerian Perindustrian, oleh kementerian yang lainlah, banyak sekali. Hampir semua vokasi-vokasi dari kementerian itu kan tentunya nanti dilibatkan. Ini perlu juga ada datanya. Kalau yang untuk akan bekerja lebih mudah, mungkin tinggal bekerjasama dengan vokasi lain. Maupun juga macam-macam, yang di usaha kecil menengah, pelatihan-pelatihan, dan sebagainya. Tapi untuk yang PHK inilah yang sangat perlu kita perhatikan. Untuk itu kami mintakan agar supaya jangan sampai kalau tidak ada *database* yang disinkronkan nanti tidak ada *eligibility*, siapa yang berhak dan akan jadi masalah di kemudian hari.

Yang berikutnya yang ingin kami tanyakan apakah pemerintah sudah mempersiapkan pos-pos untuk penerima kartu pra kerja, dalam hal ini Menaker ya, khususnya untuk pencari kerja? Seandainya, tadi mereka sudah dilatih, sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan setelah mendaftar, berarti mereka kan sudah layak. Kalau sampai tidak bisa dicarikan pos, bukankah ini juga sayang, menggunakan anggaran melatih mereka tapi kemudian tidak bisa mencarikan kerja? Ini kan juga bias. Kecuali ini diberikan kepada mereka yang PHK, itu lain cerita lagi.

Misalnya saja, ini kan tentunya kan kalau misalnya Menaker menyalurkan insentif sebesar 300 ribu sampai 500 ribu kepada penerima kartu pra kerja, dapat digunakan masyarakat saat mencari kerja, dan dapat sudah mengikuti pelatihan, kalau dengan seperti ini apakah itu akan jadi efektif? Kalau menurut kami yang lebih *urgent*, sesuai dengan tupoksi Kemenaker, disamping memang kita tetap melakukan program unggulan ini, adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi keterampilan individu melalui pengembangan BLK. Jadi membuat BLK berdaya saing sesuai kebutuhan pasar kerja. Dan juga mungkin menyurati lintas kementerian, yaitu Kementerian Diknas, agar SMK-SMK ini juga bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Mungkin di perindustrian mesin-mesinnya itu diganti. Jangan mereka lulus SMK kerja di pabrik mesinnya *sophisticated*, mereka mesin kuno, BLK nya mesin kuno, tidak akan siap di pasaran kerja.

Jadi disamping program unggulan ini tetap saya harap Ibu Menteri menjalankan program Kemenaker sendiri untuk meningkatkan kompetensi di pengembangan BLK pada sektor-sektor tenaga kerja, dan juga tentunya tidak melupakan. Saya harap program BLK yang berlangsung untuk keterampilan santri-santri. Apalagi kita juga sudah mensahkan Undang-Undang Pondok Pesantren. Kami tetap berharap agar program BLK untuk pesantren itu tetap dilanjutkan.

Yang berikutnya, Ibu, kalau di halaman 12 kita lihat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat itu peringkat kedua, kebetulan saya mewakili Jawa Barat, mencapai 7,99. Tapi sebaliknya, Jawa Barat pun lowongan pekerjaannya terbanyak, mencapai 28,628 orang. Jadi saya mohon penjelasan bagaimana ini Kemenaker menyikapi ini. Artinya apakah cuma mencari data saja atau mencari solusi? Inikan ada yang tidak cocok, penganggurannya tinggi sekali tapi permohonan lowongan permintaan juga tinggi. Inikan berarti tidak terhubung. Ibaratnya mencari jodoh ini, tidak ada yang menghubungkan dengan benar. Berarti antara Kemenaker dengan kepala-kepala daerah itu kurang komunikasi. Mungkin tidak sepenuhnya salah dari kementerian.

Yang saya tahu, dulu ketika terjadi Undang-Undang Otonomi Daerah maksud kami, itu banyak sekali pegawai-pegawai yang tadinya dari Kemenaker beralih ke dinas-dinas yang sekarang itu sudah tidak menentu, artinya di tiap kabupaten/kota itu berjalan sendiri-sendiri. Dinas tenaga kerjanya tidak bisa di kontrol oleh Menaker. Sebaliknya, kepala daerah ya terserah, kadang difungsikan, kadang tidak. Ini agar mungkin mengadakan rapat koordinasi dengan Kemendagri agar seluruh dinas-dinas tenaga kerja di daerah itu juga ada sinkronisasi. Kalau tidak, ini bukan hanya Jawa Barat, mungkin provinsi lain juga sama, penganggurannya tinggi, butuhnya tinggi, lalu ini salah siapa? Oleh karenanya kami harapkan ini ada koordinasi.

Dan tentunya yang terakhir adalah kami minta bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan mempersiapkan *road map* secara komprehensif agar program ini memberikan dampak positif. Karena kami harap jangan sampai dengan program ini penganggur senang hanya dengan insentifnya saja. Karena ini tentu pastinya program kartu pra kerja ini termotivasi mencari pekerjaan, bukan sebaliknya. Dulu-duluan mendaftar program kartu pra kerja ini. Sehingga itulah yang saya inginkan bagaimana mungkin ada studi kelayakannya itu berapa persen kartu ini untuk pencari kerja yang belum dapat pekerjaan, berapa persen untuk PHK.

Jadi kalau sistem yang duluan kan kita tidak tahu. Kalau dari awal itu sudah terbagi, sehingga itu dua-duanya bisa. Dan kalau ini berjalan baik tentunya kami paham bahwa anggaran itu cukup ada. Sampai dengan 30 triliun pun itu pasti bisa, asalkan ini efektif. Itu yang kami harapkan.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, yang terhormat Bapak Alifuddin.

**F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Terima kasih, Pimpinan.

Ibu Menteri dan Jajarannya serta Teman-teman Anggota Komisi IX,



Jadi kami sangat senang dengan adanya program pra kerja ini yang ini program unggulan Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi kan bukannya memberikan gaji kepada yang menganggur. Tetapi pada saat Festival Satu Indonesia di Gedung Istora Senayan Jakarta, Minggu 10 Maret 2019, menurut Pak Presiden kartu pra kerja diberikan bagi anak-anak muda yang baru tamat dari sekolah menengah atas, sekolah kejuruan atau lulusan perguruan tinggi yang akan mencari kerja. Jadi yang kami tanyakan apakah besaran insentifnya per bulan itu 1 juta? Itu yang kita khawatirkan nantinya semangat kerjanya kurang.

Pertanyaan berikutnya tentang kondisi keuangan kita, seperti defisit BPJS yang jumlah totalnya mendekati angka 32 triliun, petugas penyuluh agama Islam belum dibayar, ribuan guru honorer yang gajinya sering tertunda, utang luar negeri menyentuh angka 5.600 triliun, apakah bijak dengan kondisi di atas untuk program baru yang akan menarik anggaran di tahun 2020? Jadi benar-benar yang kami harapkan adanya kajian mendalam. Jadi jangan sampai menimbulkan defisit kembali. Yang kedua, beban negara semakin berat dan akhirnya rakyat yang harus menanggung akibatnya dengan kenaikan-kenaikan harga. Untuk pengetahuannya kita lihat kartu pra kerja di Finlandia yang menuai kegagalan.

Jadi kajian-kajian yang mendalam ini perlu kita kaji terus. Jadi kami sangat senang lulusan baru diberikan pelatihan-pelatihan secara intensif. Cuma manakala hal itu tidak ada lapangan pekerjaannya, ini kan menjadi permasalahan juga. Jadi bagaimana pelatihan itu disesuaikan dengan lapangan kerja.

Jadi kami rasa cukup sekian.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Berikutnya yang terhormat Ibu Ruskati Ali Baal.

**F-GERINDRA (Dra. H. ANDI RUSKATI ALI BAAL):**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

Pimpinan yang saya hormati, Teman-teman Komisi IX,  
Yang saya hormati Ibu Menteri beserta semua jajarannya,

Terima kasih, Ketua/Pimpinan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kami telah mendengar pemaparan tadi Ibu Menteri tentang persiapan pelaksanaan program pra kerja yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2020 dengan rencana anggaran yang begitu besar yang sebesar 10 triliun. Sangat menarik sekali program ini dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran yang ada di wilayah Indonesia ini yang ada 34 provinsi dan 500 lebih kabupaten yang ada di Indonesia ini.

Kami telah mempelajari daripada kriteria yang telah dicantumkan di dalam pemaparan. Yang pertama oke, harus warga negara Indonesia; kemudian harus berusia 18 tahun ke atas; kemudian tidak sedang mengikuti pendidikan formal, baik sekolah di Indonesia maupun barangkali sekolah

yang ada di luar negeri. Pertanyaan kami yang pertama kami sampaikan kepada Ibu Menteri bahwa sejauhmana intervensi pemerintah pusat yang ke daerah tentang kesiapan BLK yang ada di daerah? Karena seperti BLK kami yang ada di Sulawesi Barat, karena saya adalah perwakilan Sulawesi Barat. Kami tahu bahwa BLK itu adalah miliknya pemerintah provinsi, tetapi belum digunakan karena belum ada isinya, mesin jahit, otomatis dan yang diperlukan di dalam. Saya ajukan kepada Ibu Menteri bisa kerjasama tentang isinya daripada BLK supaya bisa cepat digunakan daripada BLK yang ada pada kami. Karena sampai sekarang belum bisa digunakan. Karena pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten belum sanggup untuk membiayai daripada isi yang diperlukan nanti untuk pembekalan kepada pencari kerja. Mudah-mudahan ada solusinya. Saya tentu harus menyampaikan aspirasi kepada masyarakat kepada menteri, karena kami adalah daerah tertinggal yang masih ada banyak pengangguran disana, sehingga kami mengharapkan kerjasamanya Ibu Menteri dengan pemerintah provinsi dan kabupaten yang ada di kabupaten kami. Itu yang pertama.

Kemudian juga instruktur, tentu perlu ada instruktur yang diperlukan. Karena saya tahu bahwa yang dipersyaratkan menjadi instruktur adalah pegawai negeri sipil yang profesional. Kami juga belum punya seperti itu. Bagaimana jalan keluarnya untuk bisa kami juga mendapatkan pra kerja yang diprogramkan oleh pemerintah sekarang? Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, karena saya menyampaikan daerah kami, contoh, karena harus kami aspirasikan kepada pemerintah, kalau setelah pasca pelatihannya nanti apakah pencari kerja diam saja atau pemerintah ada rekomendasi untuk ditempatkan di perusahaan atau apa saja. Kalau tidak ya tentu menganggur lagi yang seperti ini bilamana kami biarkan seperti itu. Jadi perlu barangkali semua dipikirkan.

Kemudian selanjutnya juga saya memberikan juga pemikiran kepada Ibu Menteri, apakah dipikirkan untuk pemberian modal supaya jangan menganggur, pemberian modal kerja agar pasca pelatihan dapat berguna membuat usaha sesuai dengan bidangnya? Atau juga bisa kerjasama dengan bank dengan tentu ada jaminan. Tapi memang susah mendapatkan model seperti ini. Tapi saya menyampaikan kepada Ibu Menteri untuk bisa dipikirkan apa yang kami sampaikan kepada Ibu Menteri kalau betul-betul kami masih daerah miskin belum seperti dengan provinsi lain. Karena kami dimekarkan dari Sulawesi Selatan menjadi satu provinsi yaitu Sulawesi Barat. Kami 6 kabupaten yang ada, semua masih tergolong miskin.

Saya kira hanya itu usulan saya.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Berikutnya yang terhormat Ibu Kurniasih. Ibu Kurniasih dipersilakan.

#### **F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Iya, lagi diskusi sebentar.

Terima kasih banyak.

Pimpinan, Ibu Menteri dan teman-teman Komisi IX,

Ini barusan bisik-bisik, “*Ngapain* kita bahas di sini ya kalau nanti yang mengerjakan bukan Kemenaker itu.” Ibu merencanakan, Ibu baik *banget* bisa *bikin* perencanaannya, *bikin* analisisnya, tapi nanti yang mengerjakan di-over begitu saja atau bagaimana? Ini kayaknya perlu penjelasan yang lebih detail dari Ibu Menteri irisannya seperti apa dan nanti peran Kemenaker dimana ketika ini diserahkan kepada Kemenko.

Kita berharap, karena ini tujuannya adalah salah satunya untuk mengatasi angka pengangguran, kalau di Asean ini kan kita masih cukup memperhatikan tingkatnya, walaupun ini adalah angka pengangguran terbaik katanya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini adalah angka terbaik, tapi kalau dikomparasikan dengan negara-negara lain di tetangga kita kita kan konon kabarnya masih tertinggi angka penganggurannya, dan ini memperhatikan. Artinya, kalau memang kartu pra kerja ini salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan persoalan pengangguran di Indonesia saya kira *leading sector*-nya di Kemenaker/Menteri Tenaga Kerja, tidak diserahkan kepada Kemenko. Karena ini agak sulit nanti, tusunya dan lain sebagainya saya belum bisa membayangkan itu. Makanya tadi bisik-bisik waktu dipanggil sama Pak Ketua/Pimpinan, ngapain kita bahas ya kalau nantinya tidak dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja yang menjadi mitra dari Komisi IX. Tapi *overall* kita memberikan apresiasi keinginan baik dari pemerintah untuk memberikan kartu pra kerja. Semangatnya bagus, tapi memang banyak dimensi yang harus dipertimbangkan sepertinya.

Yang pertama adalah melihat bagaimana kartu pra kerja ini akan bisa berlangsung selama jangka panjang atau tidak. Kita harus belajar dari BPJS Kesehatan. Inikan juga nanti akan diberikan kepada yang berhak. Di BPJS Kesehatan juga diberikan kepada yang berhak. Tetapi ada persoalan yang selalu menjadi kendala buat kita itu adalah terkait dengan data siapa yang berhak. Tadi sudah disampaikan banyak oleh teman-teman. Jangan sampai apa yang terjadi di BPJS Kesehatan itu terulang lagi nanti untuk penerima kartu pra kerja ini.

Apa singkatannya ya, Bu? Belum ada singkatannya? KPK? *Ngeri* banget itu, Bu, KPK seram banget itu singkatannya.

Artinya untuk jangka panjang ini seperti apa? Bisa *survive* jangka panjang tidak? Tadi disampaikan untuk perkiraan anggaran yang pertama 10 T untuk 2 juta, sementara kita tahu pertumbuhan ekonomi kita *slowing down*, ini mampu bertahan sampai kapan? Inikan harus diperhitungkan secara jangka panjang. Jangan sampai terulang *case-case* seperti BPJS Kesehatan yang salah data, yang harusnya dapat tidak dapat, kemudian akhirnya harus melakukan data (*kelincing?*) dan sebagainya dan seterusnya ini akan menjadi PR buat Ibu nanti ke depan kalau ini tidak diantisipasi dari awal.

Kemudian juga tentang kewenangan dari pemegang kartu ini. Saya ketika di DKI Jakarta melihat KJP (Kartu Jakarta Pintar) itu pada kenyataannya walaupun sudah di proteksi dengan berbagai macam cara masih bisa disalahgunakan oleh pemegang. Dia sama-sama main mata dengan pemilik warungnya ataupun pemilik tokonya. Bagaimana ini kontrol terhadap penggunaan dari kartu pra kerja ini apabila sudah sampai kepada pemegang kartu. Ini harus kita antisipasi supaya tidak disalahgunakan. Kita berharap ini memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya jangka pendek. Dan apakah dengan kartu pra kerja ini setelah melalui pelatihan vokasi itu dijamin dapat kerja? Kalau misalnya tidak dapat kerja, terus nasibnya bagaimana? Berarti kan persoalan angka pengangguran ini tidak

akan terselesaikan. Padahal kita tahu sekarang ini banyak sekali tantangan, apalagi dengan Industri 4.0, kemudian *disruption* SDM yang sedemikian rupa, tantangan-tantangan kedepan itu membutuhkan peningkatan *skill* yang sangat luar biasa.

Sakernas, ini saya membaca datanya ini tidak tahu, mudah-mudahan benar ya Bu, Sakernas 2016 sampai dengan 2018 mengatakan 280 persen alasan berhenti bekerja bukan karena PHK pelanggaran, bukan, tapi karena kemampuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang. Artinya, kartu pra kerja ini bagaimana bisa mengantisipasi ini semua? *Vocational* yang akan dilakukan ini harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

Kita sudah melihat, kita gagal dalam pendidikan *vocational* kita saya katakan. Kenapa, angka pengangguran dari SMK buktinya paling tinggi. Berarti kita gagal pendidikan *vocational* kita. Begitu banyak SMK dibangun. Tapi sekarang harus melakukan *vocational* lagi dari Ibu dan Kementerian ini, rasanya *mubazir* jadinya. Sudah dapat di SMK, nanti di *vocational* lagi, nanti tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Maksudnya kita mesti benar-benar hati-hati banget di dalam mengimplementasikan kartu pra kerja ini, banyak dimensi yang harus dipertimbangkan. Dari hulu ke hilir secara komprehensif, secara integratif bagaimana ini mampu menyelesaikan persoalan akar masalah dari ketenagakerjaan kita, angka pengangguran yang harus sedikit demi sedikit kita turunkan lagi angkanya.

Saya mengusulkan memang, mudah-mudahan sudah mulai dibuat Ibu Menteri, perlu ada *road map* khususnya rasanya untuk kartu pra kerja ini yang mencakup:

Satu, kolaboratif yang akan dilakukan dengan pihak investor ataupun swasta. Karena menurut saya kalau ini dibebankan terus menerus kepada APBN akan menjadi berat. Jadi mungkin pada satu titik setelah ini dilakukan satu tahun sudah mulai bisa mendorong semangat dari pihak swasta dan juga investor, ini bisa bekerjasama sehingga tidak menjadi beban buat APBN.

Jadi di dalam *roadmap* ini siapa penerimanya, kemudian setiap tahun itu pergantiannya *switch*-nya mau bagaimana, sudah selesai harus bergantiannya seperti apa, kemudian juga perencanaannya, pembiayaannya. Transformasi BLK itu juga harus dibuat sedemikian rupa, supaya tadi, angka 280 persen tidak sesuai dengan kebutuhan kemampuan kompetensi itu bisa diminimalisir. Kemudian juga agar tidak menjadi satu kartu yang hanya bersifat jangka pendek saja.

Dan juga diharapkan mudah-mudahan dalam *road map* nanti yang akan dibuat itu bisa membangun kemandirian para tenaga kerja kita. Karena tadi banyak sekali persoalan yang angka PHK kita kan juga sudah mulai membesar/meningkat. Per Agustus saja katanya sudah menembus angka 3.000. Tidak tahu kalau sekarang sudah di angka berapa PHK kita. Itukan juga kasihan.

Di satu sisi kita akan membantu yang belum dapat pekerjaan, di satu sisi ini juga ada angka PHK. Ini mudah-mudahan dengan *road map* ini bisa menyatukan semua persoalan dari ketenagakerjaan yang Ibu pimpin dalam kementerian di era-era baru ini nanti.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Berikutnya yang terhormat Pak Nuroji.

**F-GERINDRA (Ir. H. NUROJI):**

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX beserta Ibu Menteri dan jajarannya,

Saya bersyukur hari ini bisa langsung mendengar penjelasan apa yang disebut 'kartu pra kerja'. Selama ini juga yang ditunggu-tunggu masyarakat yang sudah bikin salah paham di masyarakat, yang seolah-olah kartu pra kerja ini nanti pengangguran di gaji. Ini yang menjadi poin bahwa saya senang sekali akhirnya mendengar penjelasan 'binatang' apa kartu pra kerja itu. Ternyata isinya maksudnya adalah untuk lebih pada pelatihan sebetulnya, bukan jaminan untuk pengangguran. Saya rasa saya tidak setuju juga kalau pengangguran dijamin hidupnya selama negara kita masih belum mampu. Jadi mungkin juga programnya harus lebih tepat namanya, supaya tidak salah atau gagal paham lagi masyarakat. Lebih kepada 'pelatihan', 'kartu pelatihan' atau apalah begitu dibuatnya. Jangan seperti menjanjikan pengangguran ini nanti akan dikasih insentif.

Yang kedua, orang menganggur itu ada tiga sebab. Pertama mungkin memang tidak ada pekerjaan, terbatas/lowongan kerja terbatas. Kedua, dia tidak bersaing/kalah, kompetensinya kurang. Dan yang ketiga, ya memang malas. Banyak sarjana S2/S1 itu juga yang malas bekerja. Walaupun dia pintar dia lebih menikmati warisannya barangkali.

Program ini saya rasa lebih ditujukan kepada yang penyebab nomor dua, tidak kompetensinya atau kalah bersaingnya orang tersebut. ditingkatkan kompetensinya melalui program pra kerja. Bukan lebih mendorong yang poin satu, tersedianya lapangan pekerjaan, karena itu sangat kompleks. Ini baik, saya rasa cukup baik untuk salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi. Lalu apakah dengan pelatihan ini orang diharapkan bekerja saja? Tidak, saya rasa harus ada pilihan tadi. Dia bisa jadi pekerja atau jadi pengusaha atau wirausaha. Saya rasa itu poinnya yang penting. Jangan semua digiring menjadi pekerja. Jadi pemerintah lakukan lebih kepada solusi yang lebih konkret.

Kalau kita lihat sekarang penganggurannya tadi 6 juta lebih, sementara data lowongan cuma 187 ribu, luar biasa *gap* antara kebutuhan tersedianya lapangan kerja. Karena itu mungkin pemerintah harus lebih pada mendorong bagaimana ini yang tidak mau bekerja, tetapi pilihan kedua, dia berusaha. Harus dibuat satu terobosan. Atau pemerintah lebih membuat regulasi yang membuat ekosistem berusaha lebih mudah.

Sekarang eranya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sudah jelas kontribusinya luar biasa dalam penyerapan tenaga kerja. Lima tahun terakhir hampir 5 juta tenaga kerja di serap oleh sektor ini. Ini sampai sekarang juga ekosistemnya masih belum baik, terutama UKM-UKM kita masih sulit melakukan upaya usahanya. Termasuk kemarin kita bahas dengan BPOM, sulit mengurus ijin-ijinnya. Ini yang pemerintah lakukan mestinya juga untuk memberi peluang kepada masyarakat yang menganggur ini tidak harus bekerja, tapi punya pekerjaan.

Kemudian juga kalau kita lihat *profile* tadi penganggur di sektor pendidikan paling tinggi SMK. Tentu sudah bukan rahasia umum SMK kita ini kebanyakan jurusannya sastra, bukan jurusan teknis. Ada 'Sastra Mesin'. Karena SMK kita banyak yang tidak punya mesin-mesin praktek, hanya ada buku. Jadi SMK jurusan sastra mesin yang banyak. Kalaupun ada, mesin-mesin prakteknya, otomotif misalkan kita jumpai, itu mesin kijang tahun 1974 prakteknya di era mobil sudah sekarang elektrik, tenaga surya. Di SMK masih belajar mesin kijang. Ini yang harus pemerintah lakukan supaya kompetensi lulusan SMK juga bertambah.

Satu lagi, soal BLK, sama kondisinya dengan SMK-SMK ini ruang prakteknya. BLK di daerah, terutama yang punya pemda, banyak yang jadul-jadul mesin-mesin. Mesin-mesin CNC yang kita sering lihat di BLK itu jaman Belanda, bikinan Jerman yang sudah kuno masih dipakai, ya terang saja keterampilan kita tidak akan mengejar dengan era yang sekarang.

Yang kedua soal anggaran saya ingin soroti juga, 10 triliun cukup besar untuk 2 juta. Ini saya usul, karena kita belum tahu efektifitas program ini, saya usul dikurangi saja. Sayang anggaran segini. Kita coba dulu untuk tahap pertama/tahun pertama separuh atau seperempatnya, kita lihat efektif tidak dalam penyelesaian masalah pengangguran ini. Saya rasa kalau memang efektif kita naikkan berkali lipat kita setuju. Sementara di sektor lain, kayak UKM, anggarannya mungkin tidak sampai 2 triliun Kementerian UKM. Dulu ada Badan Ekonomi Kreatif, anggarannya pun tidak sampai segitu. Padahal itu salah satu penopang lapangan pekerjaan. Jadi usul saya konkritnya ini dikurangi saja dulu. Kita tunggu evaluasinya satu tahun, efektif atau tidak dalam rangka tadi *outcome*-nya orang bekerja dan orang bisa mandiri. Kalau efektif saya sangat dukung ini kita naikkan berlipat-lipat.

Terakhir, saya lihat data juga, sudah dibicarakan oleh Ibu Dewi Asmara, datanya agak aneh juga. Di Banten misalkan, pengangguran tertinggi tapi lowongannya juga tertinggi. Lalu siapa yang bekerja disana? Jangan-jangan apa yang diviralkan di medsos kemarin betul, di viral itu ada bus-bus yang sedang *ngedrop* tenaga kerja asing sedang di demo oleh tenaga kerja lokal, jangan-jangan seperti itu kasusnya. Itu datanya yang salah atau memang kondisinya seperti itu, sehingga tadi masyarakat setempat tidak bersaing masuklah dari daerah lain atau dari bahkan negara lain.

Saya rasa itu dulu, Pimpinan, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, sebelum kita sambung, kita sudah sampai jam 12.00 siang. Saya ingin tawarkan kepada Bapak/Ibu sekalian dan kepada Ibu Menteri kita tambah lanjut berapa waktu ini?

#### **F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Tambah satu jam, Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Setengah jam atau satu jam? Ini ada dua usulan.

**F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Ketua, sebelah kanan.

**KETUA RAPAT:**

Ini yang bertanya ini masih ada 10 orang sampai 11 orang. Satu jam ya?

**F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Satu jam. Yang mau sholat silakan sholat. Begitu, Ketua, sambil jalan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kita tambah lagi satu jam ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Terima kasih, Pak Nuroji.  
Berikutnya yang terhormat Ibu Netty Prasetyani.

**F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang diberikan.

Ibu Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia,

Pertama-tama sebagaimana teman-teman Komisi IX yang sudah lebih dulu menyampaikan tanggapan dan pertanyaannya, saya juga ingin mengapresiasi lahirnya program atau kebijakan yang sebetulnya bersifat inklusif untuk orang-orang atau kelompok yang tersingkir dari kompetisi. Jadi kan sebetulnya ini kalau kita bicara tentang kebijakan ini adalah strategi kebijakan inklusif bagi orang-orang yang tersingkir dari kompetisi. Jadi sejatinya kalau memang ini diimplementasikan secara benar, sesuai dengan aturan, tentu akan berdampak positif pada upaya kita mengurangi pengangguran, dan juga pasti titik akhirnya adalah kesejahteraan. Namun ternyata, tadi juga sudah ditanyakan oleh Ibu Kurniasih, Ibu Dewi, bahwa ternyata kalau dalam konteks kebijakan *political viability* dari program ini ternyata belum jelas, dukungan politis dalam konteks kewenangan ini masih, kalau kita bilang 'kaki kanan itu sudah keluar, kaki kiri masih di pegang', padahal kalau dalam konteks teknis seharusnya ini ada di Kementerian Tenaga Kerja, karena kita bicara tentang pencari kerja, kita bicara tentang angkatan kerja, tentu harusnya yang mengurus adalah Kemenaker. Jadi kita seharusnya bisa mendorong atau memastikan terlebih dahulu sebetulnya siapa *leading sector* dari kebijakan kartu pra kerja ini. Jangan sampai nanti

kalau Kemenko yang pegang, Kemenko ini tidak tahu mitranya dimana, tidak ada? Itu kan jadi masalah. Jadi cita-citanya baik, cita-citanya mulia, tapi implementasinya ini mengkhawatirkan.

Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang implementasi kartu pra kerja ini saya sepakat dengan Ibu Kurniasih tadi bahwasanya ini harus *sustainable*, harus kemudian berkesinambungan. Jangan sampai kemudian seperti iklan minyak gosok “kok coba-coba”. Jadi artinya kita sudah melihat berbagai program yang hari ini dimulai dari permasalahan data. Sehingga saya ingin menanyakan sekaligus ingin memastikan siapa sebetulnya yang nanti akan menerima manfaat sebagai pencari kerja ini. Karena tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Kurniasih tentang kisruh BPJS, yang harusnya masuk PBI harusnya berhak mendapatkan KIS ternyata tidak. Jangan sampai anggaran yang besar, tadi Pak Nuroji katakan bahwa sebesar apapun kalau dampaknya positif, berkorelasi pada upaya penanggulangan pengangguran, kita pasti akan dukung. Tapi sekecil apapun kalau kemudian inefisiensi terjadi disana-sini, termasuk kebocoran, tentu ini kan akhirnya tidak menyelesaikan masalah.

Kemudian yang kedua, kalau tadi dikatakan oleh Ibu Menteri “kita akan melibatkan BLK”, dan ternyata pada faktanya, tadi disebutkan oleh Ibu Ruskati Ali Baal tadi sudah mengatakan kondisi BLK kita di daerah itu kan sangat beragam. Ada yang mati suri, ada yang cuma ada plangnya. Jadi artinya, kalau kemudian kita ingin menggandeng BLK berarti harus ada program revitalisasi BLK. Termasuk juga bagaimana kita menajamkan orientasi BLK itu sendiri. Kadang BLK nya jenis apa tapi kemudian industri yang berkembang di satu daerah tidak berkesesuaian dengan BLK yang ada di daerah itu. Seperti misalnya di Batam ada industri perikanan, pengelolaan ikan, dan sebagainya, tapi BLK nya tidak *support*. Jadi artinya revitalisasi BLK ini juga menjadi sebuah keniscayaan kalau kita kemudian ingin menggandeng BLK untuk meningkatkan kompetensi dan *skill* dari para pencari kerja.

Kemudian yang ketiga yang juga saya ingin kritisi adalah, selain kesiapan BLK, maka jenis pelatihan ini juga harus bisa merespon tadi perkembangan revolusi 4.0, kemudian tadi disebutkan oleh Ibu Kurniasih ada *disruption*, sehingga kalau kita bicara kerja yang dibutuhkan bukan hanya *skill*, tapi lowongan kerja. Dan kalau kita bicara lowongan kerja selalu saja angkanya pencari kerja jauh lebih banyak/jauh lebih besar daripada lowongan yang tersedia itu sendiri. Rasanya jenis pelatihan yang diberikan harus bisa menangkap revolusi yang hari ini sudah masuk ke ruang masyarakat. Bukan hanya kemudian menunggu lowongan kerja itu datang, tapi kemudian dia bisa menciptakan lapangan kerja itu sendiri.

Dan mohon maaf, kan selama ini orientasi pendidikan kita itu *output* nya adalah *job seeker* (pencari kerja), bukan *job creator*, sehingga kalau kemudian dimungkinkan jenis pelatihan yang harus dikerjasamakan nanti adalah jenis pelatihan yang kemudian memang membangun *entrepreneurship* kewirausahaan. Menjadi *reseller*, kemudian membuka *business online*, atau *start up*, dan sebagainya yang memang dibutuhkan hari ini menghadapi revolusi industri.

Dan terakhir, saya melihat bahwa persoalan hulu ini harus dikomunikasikan. Karena kalau kemudian hari ini kita melihat lulusan SMK tapi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar berarti kan ada yang salah dari kurikulum pendidikan kita.



Saya titip pesan, ketika mungkin nanti bertemu dengan Menteri Pendidikan, atau kemudian dengan KL yang lain, tentu ini harus dibicarakan. Jangan sampai lagi-lagi kita kemudian mengatakan *output* pendidikan kita tidak sesuai dengan dunia usaha atau pasar yang membutuhkan tenaga kerja itu.

Itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai kemudian, kalau teori ekonomi *demand and supply* ya hari ini suplai kita luar biasa besar, tapi kemudian tidak berkesesuaian dengan *demand* yang dibutuhkan oleh pasar atau dunia usaha.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Berikutnya yang terhormat Ibu Sri Meliyana.

**F-GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):**

Terima kasih Ketua.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX, Ibu Menteri dan jajaran yang kami hormati,

Hari ini kita membicarakan kartu pra kerja. Kartu pra kerja itu adalah upaya pemerintah untuk menggenjot investasi SDM, baik melalui BLK pemerintah, LPK swasta, maupun *training center industry*. Intinya kartu pra kerja adalah usaha vokasi pendidikan keahlian.

Saat ini Indonesia ini demam vokasi. Kenapa kami sebut demam vokasi? Periode yang lalu kami di Komisi X, tiga tahun terakhir menggenjot segala usaha pendidikan vokasi, merevitalisasi, mendirikan sekolah-sekolah SMK vokasi, politeknik vokasi. Lulusan SMK dan politeknik wajib memiliki sertifikat kompetensi, dengan kata lain lulusan SMK dan politeknik siap untuk bekerja. Sampai di Komisi IX, di Kemenaker, kita memiliki BLK yang melaksanakan vokasi. Pemerintah membentuk pula BLK komunitas. Sudah dibentuk 1.000 BLK komunitas untuk meningkatkan vokasi. Sekarang pemerintah akan menggelontorkan lagi 2 juta kartu pra kerja yang urusannya juga vokasi. Tapi mari kita kaitkan dengan catatan INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*). Menurut INDEF pada tahun 2018 pengangguran lulusan SMK 1,7 juta orang, pengangguran lulusan politeknik 700 ribu orang. Dari 7 juta orang yang menganggur, 1,18 juta orang pernah mendapat pelatihan kerja di BLK. Inilah kenyataan yang sekarang kita hadapi. Data di atas menunjukkan penganggur terdidik dan terampil meningkat. Banyak hal yang mengakibatkan hal ini, salah satunya kemungkinan kemampuan atau *skill* yang dimiliki oleh tenaga terampil tidak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Jadi menguatkan tadi yang dibahas oleh teman-teman sebelumnya.

Dengan digelontorkannya kartu pra kerja ini apakah para pemegang kartu pra kerja dijamin akan mendapatkan pekerjaan, tidak bernasib sama

dengan pengangguran terdidik dan terampil yang sudah ada sekarang ini? Sudah siapkah PMO (*Project Management Office*) melakukan segala sesuatu untuk memastikan mereka bekerja? Sudahkah PMO memetakan lowongan kerja yang tersedia dan mengkorelasikannya dengan kuota prodivokasi untuk para pemegang kartu pra kerja. Karena PMO akan bertanggungjawab dengan 2 juta pemegang kartu dan 10 triliun anggaran negara. Sebenarnya siapa yang akan menjadi PMO itu nanti?

Jika dihubungkan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang memasukkan vokasi sebagai salah satu program dan kegiatan strategisnya, dan telah pula melaksanakan *piloting* vokasi selama 2019, bagaimana korelasi antara BPJS TK dan PMO? Kerjasamakah, atau malah *overlapping*? Kami ingin sekali mengetahui apa bentuk PMO ini pada pelaksanaan yang akan datang.

Terima kasih, Ketua.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

### **KETUA RAPAT:**

Ibu Menteri tampung dulu. Semua punya ekspektasi tinggi. Ibu Menteri tampung dulu.

Berikutnya kita kepada yang terhormat Bapak Imam Suroso. Biasanya ada nanti dia punya plus-plus.

Silakan, Pak Imam.

### **F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Kalau Pak Ketua sudah bilang begitu kita *ngomong* apa lagi ini?

Terima kasih.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati para Pimpinan Komisi IX, Teman-teman Komisi IX,  
Yang saya hormati Ibu Ida Fauziah/Ibu Menteri yang terbaru dan jajarannya,

Ibu Menteri, tadi sudah saya baca paparan program kartu pra kerja ini, atau program KPK (Kartu Pra Kerja). Menurut saya ini sudah cukup lumayan bagus, berwarna, bisa kita mengerti. Biasanya itu fotocopi, ini *panjeuneungan* lumayan bagus. Perlu diulangi kalau bagus, yang lainnya perlu kita komplain itu.

Ini yang perlu saya tanyakan, saya tidak *mudeng* atau bingung tidak tahu saya, makanya saya tanyakan Ibu Ida Fauziah, pada *slide* ketujuh paparan Ibu Menteri dijelaskan mengenai perkiraan perhitungan anggaran pelaksanaan program kartu pra kerja disebutkan bahwa biaya pelatihan berkisar 3 sampai 7 juta, pelatihannya satu orang 3 sampai 7 juta. Biaya sertifikasi itu sekitar 900 ribu, insentif pasca pelatihan 500 ribu rupiah, pengisian survei 150 ribu, sehingga total kurang lebih sekitar 5 jt.

Kemudian yang saya tanyakan, tolong dijelaskan Ibu Ida, biaya pelatihan berkisar sampai 7 juta itu kira-kira pelatihannya itu bidang apa saja. Nanti jelaskan apa saja yang ditawarkan. Kemudian program kartu pra kerja

apa saja di dalam masuk program pra kerja itu, nanti saya ingin lihat, karena ini kaitannya dengan anggaran.

Selanjutnya, terkait dengan pengisian survei siapa yang akan melakukan survei? Penerima kartu pra kerja atau selaku pelaksana program? Jika pelaku survei disini sudah dianggarkan sebesar 150 ribu, makanya nanti tolong dijelaskan.

Kemudian yang berikutnya, Ibu Menteri, yang kaitannya dengan *slide* dua belas, dalam *slide* dua belas paparan Ibu Menteri dinyatakan bahwa provinsi dengan 5 TPT tertinggi, diantaranya ada Banten, Jawa Barat, Maluku, Riau, Sulawesi Utara, dan yang terendah Bali. Tolong dijelaskan sama Ibu Ida Fauziah, apakah pelaksanaan program kartu pra kerja lebih diprioritaskan pada 5 provinsi tadi? Padahal provinsi kita kan kurang lebih ada 34, nanti tolong dijelaskan? Apakah yang lainnya "tidak usahlah atau usah". Karena anggarannya inikan banyak, ada triliunan.

Yang kedua, bagaimana sistemnya nanti dalam pelaksanaan kartu pra kerja tersebut di masing-masing provinsi? Sama saja atau beda-beda atau bagaimana? Kemudian, apa indikator program kartu pra kerja ini? Kartu pra kerja ini apa indikatornya, ini berhasil/tidak berhasil, ini gagal/ini tidak? Karena ini kaitannya anggaran pula.

Ini kata Pak Ketut tadi, kebetulan Pak Imam di Banggar itu, kalau memang bagus anggarannya ditambah. Kalau tidak ya dikurangi saja, karena merugikan rakyat, ngabis-ngabisin APBN. Harapan saya bagus.

Pertanyaan berikutnya, apakah yang sudah menganggarkan dari, termasuk Komisi IX memperjuangkan, itu melibatkan teman-teman Komisi IX atau dikerjakan sendiri? Nanti tolong dijawab. Kalau dikerjakan sendiri kayak apa, kalau dikerjakan bersama teman-teman Komisi IX kayak apa? Tolong dijelaskan itu nanti. Saya ingin mengerti saja arahnya kemana ini.

Ini yang terakhir, merujuk pada *slide* ketigabelas, fakta yang tidak sinkron dengan *slide* dua belas, tidak sinkron/tidak klop. Pada *slide* dua belas dinyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau termasuk provinsi dengan TPT tinggi. Namun pada *slide* tiga belas, tadi kan *slide* dua belas, ini *slide* tiga belas, Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau, justru salah satu provinsi yang memiliki lowongan kerja terbanyak. Ibu Ida Fauziah dan jajarannya tolong nanti saya dijelaskan terkait hal ini. Apakah fakta ini terkait dengan budaya atau perilaku TPT dari provinsi yang bersangkutan? Atau karena ketidakmampuan kementerian atau pemerintah daerah setempat untuk mendorong TPT yang ada didaerahnya dalam mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang ada didaerahnya.

Terakhir ini, inikan kata Pak Jokowi kita harus semua kerja, visi misinya jadi satu presiden/wakil presiden, upaya-upaya strategis apa yang akan dilakukan Ibu Ida Fauziah kedepan untuk menjawab permasalahan pengangguran? Tolong dijelaskan pelaksanaannya, terus targetnya yang ditetapkan, terus hasil poinnya terakhir kayak apa. Jadi saya dan teman-teman itu mesti mengerti, karena kita yang merancang segalanya, sehubungan dengan saya dan teman-teman itu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan sekaligus legislasi yang membuat undang-undang. Kalau bagus didukung, kalau tidak bagus ya kita revisi undang-undangnya. Kita kan berhak itu kita revisi bagaimana supaya bagus.

Sebenarnya ini masih banyak, Pak Ketua, tapi sementara ini dulu. Karena teman masih banyak.

Terima kasih, Ibu Ida Fauziah.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Imam Suroso, PDI Perjuangan.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.  
Berikutnya yang terhormat Pak Anas Thahir.

**F-PPP (SY. ANAS THAHIR):**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Pimpinan yang terhormat,

Dan salam khusus kepada Ibu Menteri, karena bagi Fraksi PPP ini perkenalan pertama di ruang ini dengan Ibu Menteri. Seminggu yang lalu fraksi kami tidak sempat hadir. Jadi meskipun di luar ruangan ini saya mengenal Ibu Menteri, bahkan dengan keluarganya. Selamat, Ibu Menteri.

Tadinya ada tiga pertanyaan yang mau saya sampaikan. Tapi ternyata yang dua sudah dibajak oleh penanya terdahulu, jadi tinggal satu. Tadi teman-teman terdahulu menyampaikan bahwa ada 5,82 juta angka pengangguran kita sesuai dengan data BPS terakhir. Dan angka ini bisa membengkak kalau ditambah dengan jumlah pekerja aktif/buruh dan angkatan kerja yang terkena PHK, bisa sampai 10 juta atau lebih. Sementara kemampuan kartu kerja kita hanya bisa meng-cover 2 juta dengan biaya 10 triliun, artinya kita hanya bisa meng-cover paling banyak 20 persen dari keseluruhan jumlah pengangguran, atau bahkan kurang.

Dengan keterbatasan biaya maupun keterbatasan jumlah tenaga kerja yang ditangani oleh program ini, ada masalah yang menurut saya sangat krusial untuk menjadi titik tekan perhatian Kementerian Tenaga Kerja dan kita semua, yakni soal rekrutmentasi pemegang kartu kerja. Sebab dengan keterbatasan anggaran yang ada, program rekrutmentasi ini akan sangat mudah dimanfaatkan oleh siapapun yang ingin melakukan penguatan-penguatan basis politik. Bukan politiknya Ibu Menteri, bisa saja oleh basis penguatan politik pelaksana di lapangan.

Pertanyaan saya, Ibu Menteri, bagaimana skema penyaluran program kartu pra kerja untuk pemerataan serapan tenaga kerja ke daerah-daerah seluruh Indonesia? Saya tidak tahu relevan apa tidak, karena tadi sudah dijawab 'seharusnya Kemenko', tapi ini menurut saya penting. Titik tekan pertanyaan saya adalah sekedar *warning* agar program ini tidak dimanfaatkan untuk penguatan basis politik, ini titik tekan saya.

Yang kedua, Ibu Menteri, saya tidak habis pikir kenapa program teknis ini justru ditangani oleh kementerian non teknis, dimana relevansinya, dan bagaimana pada saatnya nanti kita bisa mengawal, kita bisa berkoordinasi, kita bisa melakukan pengawasan. Mungkin rekomendasi kami atau permintaan kami Ibu Menteri bisa melakukan negosiasi tawar menawar dengan presiden agar program kartu pra kerja ini dilimpahkan dari Menko ke Kementerian Tenaga Kerja.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Anas.  
Ibu Menteri dapat peneguhan ini.  
Berikutnya yang terhormat Pak Muhammad Dhevy Bijak.

**F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):**

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,  
Ibu Menteri Ketenagakerjaan bersama jajaran yang saya hormati,

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama saya juga mengapresiasi apa yang sudah menjadi program pemerintah itu, program kartu pra kerja. Tentu kita semua disini sama-sama mengharapkan itu. Sejalan dengan itu kami berharap program kartu pra kerja ini sesuai harapan rakyat Indonesia yang sama-sama kita cintai. Sehubungan dengan itu ada beberapa hal yang saya mau pertanyakan.

Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bersama pelatihan vokasi menjadi hal yang *urgent*. Oleh karena itu berkaitan dengan kompetensi dasar dan keahlian bagi tenaga kerja seringkali tenaga kerja kita menghadapi kendala oleh karena itu tidak memadainya sistem pelatihan vokasi yang tersedia dalam membekali para tenaga kerja kita. Pertanyaan saya, sejauhmana persiapan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyiapkan model pelatihan vokasi yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan program pra kerja yang dicanangkan oleh Presiden Bapak Jokowi.

Yang kedua, sebagaimana yang disampaikan dalam materi tadi bahwa definisi program kartu pra kerja adalah bantuan pelatihan vokasi yang ditujukan untuk mencari pencari kerja, pekerja buruh atau buruh aktif, atau pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, yang membutuhkan peningkatan kompetensi, serta sesuai dengan apa yang tadi dipaparkan yang ada dalam *slide* ini penempatan program kartu pra kerja ini sebanyak 2 juta orang sesuai dengan metode pelatihan vokasi yang memuat tiga hal, atau lebih dikenal dengan *triple skilling* yakni *skilling*, *upskilling* dan *reskilling*, dari hal tersebut maka diperlukan satu akurasi data yang memuat pemetaan atau klarifikasi para calon peserta kartu pra kerja. Pertanyaan saya, apakah di angka 2 juta orang yang menjadi target peserta yang menggunakan anggaran 10 T tersebut ada pemetaan atau kuota pembagian yang memisahkan antara pekerja yang memiliki sertifikasi, *skilling*, *upskilling*, dan *triple skilling*. Jika itu ada, seperti apa presentasinya.

Yang ketiga mengenai prinsip implementasi pada *slide* halaman tiga di materi Ibu tadi, yaitu akurasi data. Disini pada bagian f dijelaskan integrasi berbagai data untuk memfilter penerimaan pra kerja. Berkaca dari berbagai

macam program pemerintah yang gemar menggunakan kartu-kartu, pelaksanaan selalu bermasalah pada akurasi data. Contoh, penerimaan Kartu Indonesia Pintar yang sampai hari ini belum terlalu maksimal dan dianggap ada yang salah sasaran. Terkait dengan akurasi data tersebut seperti apa langkah yang ditempuh dalam memvalidasi data calon peserta, dan siapa saja pihak yang dilibatkan dalam proses integrasi data tersebut.

Terakhir, sebagaimana yang dijelaskan pada tugas PMO adalah membangun ekosistem program kartu pra kerja yang memiliki pembangunan sistem operasional program monitoring dan evaluasi, pelayanan kepada masyarakat, pemanfaatan lembaga pelatihan, dan menjembatani kebutuhan industri, dimana PMO ini akan berada di Kemenko Perekonomian. Pertanyaan saya, sejauhmana kesiapan pemerintah dalam menyiapkan payung hukum dalam menindaklanjuti kebutuhan PMO dalam menjalankan program kartu pra kerja. Yang kedua, dengan terbentuknya PMO maka akan seperti peran Kementerian Tenaga Kerja dalam hal program kartu pra kerja ini.

Terima kasih, mungkin itu saja, Pimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Berikutnya yang terhormat Pak Saleh Daulay.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Terima kasih.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX yang saya hormati,  
Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya yang berbahagia,

Sebaiknya Ibu Menteri senyum dulu supaya kita semangat. Dari tadi kelihatannya agak syahdu, kayak dicecari dengan pertanyaan-pertanyaan.

Saya mulai menanggapi ini dari nama dulu, namanya kan Kartu Pra Kerja. Saya akan kritik dulu ini soal kartu.

Indonesia ini memang sejak Presiden Jokowi ramai dengan istilah kartu mengartu ini. Tadi sudah banyak yang mengkritik juga ini kartu kebanyakan. Kalau orang dapat kartu KIS, kartu KIP, ditambah Kartu Pra Kerja, itu dompetnya sudah penuh jadi tiga kartu.

Kalau kita buka ke data yang disampaikan soal penggunaan anggaran yang 10 triliun itu, tidak ada itu anggaran untuk bikin kartunya. Benar tidak? Yang ada itu kurang lebih nanti ada sertifikat sekian, nanti pelatihan biayanya sekian, sementara biaya operasionalnya tidak ada, sementara tadi ada disebut ini akan dikelola oleh PMO di bawah koordinator Kementerian Menko Ekuin, tapi anggarannya tidak ada yang dijelaskan disitu. Nanti tolong dijelaskan Ibu, soalnya kartu-kartu ini khawatir saya kalau kita cetak kartu ini tidak efektif ini kartu. Kenapa, kan cuma tiga bulan. Kartu inikan cuma tiga

bulan dipakainya, ngapain pakai kartu-kartuan begitu. Takutnya nanti kalau dikasih kartu malah tidak efektif, sayang kartunya. Paling nanti dimuseumkan saja “oh saya dulu pernah dapat kartu”.

Itu satu, ini dari kartu dulu. Ini saya khawatir nanti anggarannya berapa itu. Jangan-jangan 1 triliun sendiri itu bikin kartu, tidak ya? Mudah-mudahan tidak. Ini soal kartu dulu.

Sekarang saya mulai yang kedua, ‘Pra Kerja’. Inikan kita mulai dulu ‘Kartu Pra Kerja’. Pra artinya sebelum, kerja atau kerja, artinya dkartu orang yang sebelum bekerja. Tapi ini program kalau kita lihat definisinya pada *slide* empat, halaman empat atau *slide* empat itu, disinikan disebut bahwa kartu ini ditujukan bagi pencari kerja. Itu betul ‘pra kerja’, bisa jadi termasuk dalam konteks pra kerja. Tapi ada ini ‘pekerja buruh aktif’, ini bukan pra kerja, sudah aktif dia bekerja. Itu tadi yang disebut tadi, *skilling*, *upskilling*, *reskilling* tadi itu. *Upskilling* itu berarti bisa jadi orang yang bekerja dinaikkan kapasitasnya.

Kemudian ada yang pekerja/buruh yang pemutusan PHK, berarti itu sudah pernah bekerja juga, bukan pra kerja lagi. Dia justru pasca kerja namanya. Orang yang diputus hubungan kerja itukan namanya pasca kerja. Kenapa tidak dibuat saja kartu ‘Pasca Kerja’. Ini dari sisi nama ini sebetulnya sudah *semrawut* ini, bahasa Indonesianya tidak jelas ini program ini. Ini mohon nanti ini diperbaiki. Mungkin karena kampanye tempo hari presiden langsung ya ‘Kartu Pra Kerja’ saja begitu, lebih gampang mengingatnya, padahal sebetulnya programnya didesain tidak seperti itu. Kecuali kalau programnya ini dialihkan lagi, “ya sudah orang yang sebelum bekerja saja”.

Jadi, Ibu Menteri, di Indonesia inikan Ibu menjelaskan tadi 7 juta 50 ribu pengangguran sekarang menurut BPS. Tapi menurut fakta yang aktual menurut saya lebih. Apalagi kalau nanti saya tanya definisi pengangguran apa. Begitu berbeda definisi antara satu dengan yang lain, tingkat pengangguran akan naik itu. Kita bisa berdebat soal pengangguran itu apa. Jangan-jangan orang yang gajinya 300 ribu sebulan dianggap tidak pengangguran juga di republik ini, padahal sebetulnya yang 300 ribu belum tentu layak bagi penghidupan. Kalau mau *bikin* definisi tentang pengangguran itu pakailah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Banyak di Indonesia yang kehidupannya tidak layak bagi kemanusiaan. Itu satu yang soal nama dulu ini.

Yang kedua, Ibu Menteri, pada halaman 4 itu atau *slide* empat ada manfaat. Manfaat ini kalau saya baca ini manfaat bagi orang yang ikut ini. Kalau saya ikut di dalam program saya akan dapat pelatihan vokasi, saya akan dapat sertifikasi, dan saya dapat insentif. Ini sangat temporary sekali, tidak ada manfaatnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan ini kalau manfaatnya seperti ini. Ini bagi orang yang ikut saja.

Yang ingin saya dengar itu sebetulnya adalah kalau ini terlaksana manfaatnya apa untuk menciptakan lapangan pekerjaan, manfaatnya apa untuk mengurangi garis kemiskinan, manfaatnya apa untuk mengurangi pengangguran, belum dijelaskan kan.

Saya ingin mendengar Ibu Menteri memaparkan kepada kita, dengan adanya program ini, 10 triliun kita habiskan uang republik ini untuk ini, mestinya kan nanti akan mengurangi kemiskinan sekian, akan mengurangi pengangguran sekian. Inikan hitung-hitungannya ini program ini akan 2 juta orang, akan terjangkau 2 juta orang. Kalau 2 juta orang tingkat pengangguran

kita 7 juta, berarti 7 kurang 2 sama dengan 5. Itu kan matematika itu. Apakah seperti itu?

Karena itu saya ingin melihat ini manfaatnya jangan seperti ini. Kalau ini manfaat bagi orang yang ikut. Kalau orang yang ikut dapat ini belum tentu dapat pekerjaan ini.

Halaman saya mulai dari yang bagian b dulu, satu *data center* dan dikelola satu PMO. Ini saya mau tanya ini, inikan programnya Januari, presiden menginstruksikan akan dilaksanakn pada Januari, saya baca di berita. Benar tidak, Pak Sekjen? Benar ya. Sekarang saya mau tanya ini, *data center* ini dimana sebetulnya adanya. Katanya dikelola oleh PMO, PMO nya kan belum ada. Kenapa PMO-nya belum ada, keppresnya belum ada, perpresnya belum ada, payung hukumnya belum ada.

Kemudian pada *slide* sembilan atau halaman 9, di sana disebut bahwa Kementerian Tenaga Kerja sudah punya sistem. Ini sistem yang mana? Sistem katanya tadi mau dikelola oleh PMO, tapi Kemenaker sudah punya sistem *database*. Ini tumpang tindih ini, ini nanti mohon dijelaskan juga soal itu.

Kemudian ini dua yang berikutnya ini yang d dan e, ini unit *cost* ditentukan oleh PMO. Unit *cost*-nya itu tidak jelas tadi, apakah antara 3 juta sampai berapa tadi, 7 juta itu, unit *cost* untuk pelatihan itu belum bisa ditentukan. Ini kenapa bisa ada angka 3 sampai 7 juta, simulasi dari mana, PMO nya belum ada. Kalau PMO nya belum ada berarti jenis pelatihannya belum ada, berarti belum bisa di prediksi mestinya.

Sama dengan yang berikutnya yang bagian e, kriteria penyedia layanan pelatihannya ditentukan oleh PMO. Berarti belum ada tempat pelatihan kerjanya, karena PMO nya belum ada. Masih panjang ini ceritanya, saya khawatir Januari tidak jalan ini.

Kemudian yang berikutnya, bagian f, itu katanya integrasi berbagai data untuk filter penerima pra kerja. Integrasi data mana, data mana yang dimaksudkan yang mau diintegrasikan disini? Apakah data BPJS, data penerima KIP, data PKH, atau data mana? Karena pemerintah sekarang banyak datanya, tapi banyak yang tidak sinkron, banyak yang tidak *connect* antara satu dengan yang lain. Ini saya minta ini juga dijelaskan.

Kemudian yang berikutnya saya ingin bertanya secara teknis. Misalnya begini, ada sasaran 2 juta yang akan dijangkau oleh program ini, sementara yang menganggur itu 7 juta. Itu ya pra kerja saja, belum tadi yang sedang bekerja dan yang di PHK. Katakanlah 7 juta dulu. Kira-kira apa kriteria yang nanti dilakukan oleh kementerian atau pemerintah untuk memilih yang 2 juta orang ini? Saya khawatir program ini sama dengan program sosial lainnya, ini akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Kalau misalnya Ibu sebut ini saya pilih 2 juta ini, satu, dua, tiga, dan seterusnya 2 juta orang. Kenapa Ibu mendahulukan itu, kenapa tidak yang lainnya? Kan ada 5 juta lagi yang tidak dapat. Kalau yang menganggur saja ini targetnya. Mestinya kan harus ada ini. Biar kita lihat dulu, ini kalau misalnya ini bergulir ini harus adil. Kalau tidak adil melanggar sila kelima, keadilan sosial. Kasihan itu rakyat yang tidak dapat. Apalagi dikasih insentif 500 ribu sebulan, dapat 3 bulan. Mau dapat kerja/mau tidak dapat kerja yang penting ikut pelatihan dulu, setelah itu dapat 1 juta 500. Mudah-mudahan bisalah memperpanjang nasib ini. Kan kasihan kalau program ini hanya sebatas seperti itu. Karena itu tolong dijawab dulu soal keadilan tadi ini supaya kita bisa menjelaskan ke publik nanti.



Saya sampai hari ini, Bapak/Ibu/Saudara, kalau konsituen saya menanyakan kepada saya kenapa saya tidak dapat kartu BPJS yang gratis, padahal saya miskin. Dan terbukti miskin saya datang kesitu lihat persis di depan mata saya ketidakmampuannya. Saya sampai hari ini tidak bisa jawab. Kenapa, karena datanya kan dari pusat di *droping* itu. Tidak bisa jawab sampai hari ini saya. Dan saya merasa berdosa karena tidak mampu memberikan jawaban kepada mereka. Nanti saya khawatir programnya juga begitu, begitu bergulir dia datang kepada kita ramai-ramai ini kawan-kawan Komisi IX, karena mereka tahu kita mengurus tenaga kerja. Kenapa yang sana dapat, ini tidak dapat. Nanti malah mereka *distrust* kepada kita itu, tidak percaya kepada kita. Sudah dijelaskan pun tidak begitu paham juga mereka.

Berikutnya tadi sudah ada juga yang menanyakan, ini sebetulnya menurut saya ini persoalan kita inikan sebetulnya ini bukan persoalan hanya persoalan kekurangan *skill*, tapi memang persoalan lapangan pekerjaannya tidak ada. Saya mau kasih tahu contohnya, ini di dalam data yang Ibu berikan kepada kami ini, pengangguran terbukanya itukan sarjananya mencapai 5,67 persen, artinya setiap lulusan dari perguruan tinggi di Indonesia ini seluruhnya itu mereka akan menganggur 5,67 persen, dan saya kira itu jumlah yang besar. Kemudian SMK 10,42 persen. Tadi ada teman-teman yang bilang SMK kita ini tidak bermutu. Jangan disalahkan dulu SMK-nya. Saya tanya dulu, ada tidak lapangan pekerjaannya sehingga mereka bisa ditampung di situ. Jangan-jangan ini bukan karena mereka tidak punya keahlian. Jangan-jangan hanya karena lapangan pekerjaan tidak ada. Ini tolong nanti di cek dulu ini bagaimana, lapangan pekerjaannya dimana. Kalau mereka yang 2 juta ini nanti sudah dilatih, itu mau ditempatkan dimana? Sudah ada tidak lapangan pekerjaannya? Sudah ada tidak dunia usaha yang mau menampung? Sudah ada tidak investor yang mau menampung mereka, misalnya buka perusahaan industri baru sehingga mereka bisa ditempatkan disitu. Jangan sampai orang sebelum pelatihan menganggur setelah pelatihan menganggur, dua-tiga kali menganggur itu, kasihan. Akhirnya dapat berapa, 1 juta 500. Ditambah kartu satu lagi, sertifikat, kartu juga itu. Ini tolong, Ibu.

Apalagi yang SMK, 10,42 persen, banyak jumlahnya itu. Dan mereka menganggur karena banyak jumlahnya, wajar saja banyak yang menganggurnya. Dan alumni SMK kan banyak itu, wajar saja banyak yang menganggur. Perguruan tinggi kenapa ada 5,67 persen, karena jumlah alumni SMK pasti lebih banyak daripada alumni SMK. Ini tolong dijelaskan dulu kepada kita *link and match*-nya bagaimana. Bagaimana keterkaitan antara program ini dengan yang dunia usahanya.

Kemudian soal BLK dan LPK-nya, ini kan 2 juta orang. Saya tidak tahu ini kriteria LPK yang akan dipakai itu seperti apa. Ini saran saya, saya minta ini harus disortir benar. Jangan sampai ada LPK yang tidak jelas itu malah disuruh dapat. Lembaga-lembaga kayak begini tidak hanya papan nama, itu berbahaya itu. Malah program ini rusak.

Berikutnya saya mau menanyakan tentang evaluasi program BLK ini yang sudah pernah dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kita punya program BLK komunitas, benar tidak Pak Setyo? Kemudian kemarin tahun lalu menjelang pemilu ada BLK pesantren, anggarannya 1 triliun. BLK komunitas sebelumnya juga sudah beberapa. Ini saya tanya, ini sebetulnya kira-kira kalau kita evaluasi bisa menciptakan lapangan pekerjaan berapa dari pelatihan-pelatihan yang ada dilakukan BLK komunitas dan BLK pesantren itu? Tolong dijelaskan dulu kepada kita. Ini ada 10 triliun lagi mau masuk. Kita

berharap program ini, kita dukung program, tapi harus betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Kalau tidak bermanfaat ya mohon maaf ini nanti akan jadi *problem* juga, jadi beban bagi pemerintah, beban bagi Ibu Menteri. Apalagi ini tidak tahu ini tiba-tiba jadi menteri sudah ada program ini, dan harus dikerjakan. Walaupun sebetulnya Ibu menolak juga, misal andaikata menolak kan tidak bisa, karena tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden.

Karena itu saya minta tolong ini nanti dijabarkan pada saya beberapa aspek penting yang menurut saya yang terkait dengan program Ibu Menteri. Karena saya tentu akan mendukung setiap program pemerintah yang betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat luas.

Saya kira itu untuk sementara. Kita dengar dulu responnya Ibu Menteri, baru kita bisa melakukan pendalaman.

*Nashrun Min Allah wa Fathun Qarib Wabasysyiril Mukminin,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Ibu Menteri berpikir panjang kayaknya.  
Berikutnya yang terhormat Pak Ketut.

#### **F-PDIP (I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.):**

Terima kasih.

Selamat siang.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IX/Anggota Komisi IX,  
Menteri Tenaga Kerja dan Jajaran,

Pertama adalah, ini adalah sesuatu yang menurut kami sangat salah mengelola ketika demografi kependudukan kita adalah penduduk yang produktif, sehingga kalau ini sebenarnya menjadi potensi yang nanti akan memberikan negara kemajuan. Tapi kalau salah mengelola tentu ini akan menjadi *boomerang* masalah sosial, pengangguran, kriminal, demo, dan sebagainya. Sehingga harus pintar-pintar. Memang sudah ada dalam visi misi presiden, tapi tidak musti. Visi misi itu kan harus di evaluasi ketika nanti program ini gagal. Karena anggarannya cukup besar ini. Kalau kita idealis urusan rakyat kalau memang ke depan ini DPR ini. Apalagi saya orang baru.

Kedua adalah program ini saya lihat bukan untuk bagaimana mengurangi pengangguran. Pasti mereka itu akan mengincar insentifnya, karena dapat 500 ribu, gratis ini, kan begitu. Karena saya lihat sekarang kenapa orang berbondong-bondong mencari CPNS, karena banyak sekali pengangguran yang sudah punya keterampilan.

Dulu waktu kita bagaimana agar SMA/SMK, SMK di target 60 persen, tujuannya adalah, ketika mereka tamat SMK siap kerja. Tetapi banyak sekali anak SMK sekarang menjadi pengangguran. Sehingga akhirnya lari menjadi Gojek yang tidak akan menjamin masa depan mereka berkelanjutan.

Yang kedua, lemahnya *database*. Saya tidak mengerti juga kenapa tiba-tiba 2 juta dipakai. Apa dasar 2 juta? Apakah ini hanya sekedar program hanya asal-asalan saja? Karena semestinya harus ada data yang jelas,

dijelaskan 2 juta seperti ini, kemudian yang tidak punya keterampilan sekian datanya, kemudian yang sekian ini dibantu untuk pelatihan.

Semestinya benar yang dikatakan oleh Pak Saleh. Umpama sebagai contoh, nanti kita inikan ada membuat mobil listrik. Nanti ada seperti Pak Luhut bilang ada 44 triliun membangun baterai. Disana tidak punya STM, itu dilakukan pelatihan baru benar.

Kalau sekarang tidak jelas pelatihannya, tentu pengangguran tamatan SMK pariwisata, SMK kesehatan, belum lagi kursus-kursus keterampilan, itu saja tidak bisa ditampung. Semestinya ini yang perlu dicari.

Makanya kalau kami di Bali mereka itu bagaimana sekarang melakukan *G to G* antara provinsi dengan negara lain, tujuannya agar lebih banyak lapangan pekerjaannya. Baru nanti dari tamatan itu bisa disalurkan seperti itu. Kalau sekarang yang kita lihat ini, inikan kami melihat kemarin bahwa ini dikasih kepada yang pengangguran, karena masyarakat itu pikirannya "wah kita nanti kalau belum kerja nanti dapat insentif". Ternyata tidak, ini hanya pelatihan, sehingga tidak sama.

Ini bebannya cukup berat buat Ibu Menteri, karena nanti kan yang diinginkan adalah *output*-nya. Apalagi yang mengelola ini adalah nanti Menko. Tapi teknisnya ada di Kementerian Tenaga Kerja. Maka dari itu tentu kami ingin apa yang ditanyakan oleh teman-teman tadi ini adalah ingin agar nanti ada kepastian nanti apa yang didapat ketika nanti kartu pra kerja ini sudah jalan. Karena anggarannya cukup besar, 10 triliun, besar sekali anggaran. Dari segi anggaran saja saya kira juga tidak terlalu lihat. Kenapa buat sertifikat 500 ribu, apa pertimbangannya buat sertifikat hanya satu lembar saja seperti itu. Berarti inikan suatu perencanaan yang belum matang. Memang ini visi misi ini kan harus jalan. Tentu ini kami ingin kalau memang tidak bisa dikerjakan jangan dipaksakan, karena inikan menyangkut uang negara.

Saya kira itu saja.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Ketua.

Berikutnya yang terhormat Ibu Dewi Aryani.

#### **F-PDIP (Dr. DEWI ARYANI, M.Si.):**

*Bismillaah,*

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Salam kenal, Ibu Menteri. Mungkin baru kali ini perkenalan, saya belum hadir waktu itu. Saya, Dewi Aryani dari Fraksi PDI Perjuangan.

Yang pertama saya ingin mengingatkan mengenai, mungkin teman-teman sudah ada yang bertanya atau meminta soal ini, yaitu RKAKL sampai satuan tiga. Dari kementerian yang lain sudah memberikan, jadi kalau bisa kita di *copy* sebanyak anggota di *flashdisk* yang kecil-kecil, supaya kita bisa menganalisa, bisa mengawasi, dan juga membantu. Tidak hanya anggaran, tapi juga pengawasan seluruh program dari Kemenaker.

Terus terang saja Kemenaker yang sekarang saya berharap banyak, karena yang sebelumnya koordinasinya kurang, jarang rapat juga. Jadi kita-

kita kalau rapat sama Menaker juga jadi malas, karena kadang-kadang bilang datang terus tidak datang. Ini karena Ibu Ida kita lihat kinerja, dan visi misi presiden juga sangat didukung oleh Ibu Menteri, saya harapkan lebih proaktif daripada Pak Menteri yang sebelumnya.

Yang kedua, saya ingin mempertanyakan pertimbangan Ibu Menaker apa waktu rapat dengan Menko Perekonomian, kok mau diambil kesana *oke-oke* saja. Padahal ini adalah *marwah* atau wajah Kemenaker periode yang ada sekarang itu justru di kartu pra kerja. Kinerja bagus/jeleknya, kemudian baik/tidaknya kinerja menteri dan jajarannya itu di kartu pra kerja. Jadi saya pikir kalau dipegang oleh Menko, ngapain ada Kemenaker. Tidak perlu ada Kemenaker. Atau suruh Pak Menko nya saja jadi Kemenaker. Saya yakin kalau tukar tempat kartu pra kerja akan ditarik juga sama Pak Menko, karena saya yakin ini keputusannya keputusan politik, bukan teknis. Kita kan kalau sudah di jajaran kabinet kita tidak mikirin lagi soal politik. Bagi-bagi kursi sudah ada. yang kita fokuskan sekarang adalah bagaimana program Jokowi sampai ke masyarakat dan betul-betul dilaksanakan oleh kementerian teknis, sehingga kementerian teknis yang punya mitra kerja dengan Anggota DPR di semua komisi teman-teman ini bisa mengawasi secara efektif sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tidak hanya mengawasi, tapi juga memberikan dukungan anggaran.

Tadi Pak Imam sudah bilang, di Banggar pun berapapun akan kita siapkan untuk mensukseskan program Pak Jokowi ini. Tapi kalau dari awal kita sudah salah langkah, nanti kebelakangnya akan *chaos*. Ibu Menteri bisa bayangkan pelaksanaan kartu pra kerja ini nanti akan pelik. Peliknya begini, yang pertama soal jumlah 2 juta tadi. Teman-teman sudah menjelaskan kenapa harus 2 juta. Kemudian Pak Saleh sudah menjelaskan, namanya 'pra kerja' berarti diberikan untuk yang belum pernah kerja. Bukan yang pengangguran, terus tidak dapat kerjaan, di-PHK, dapat kerja. Jadi prioritasnya bukan itu, tapi pra kerja.

Ada satu yang di sini saya ingin sampaikan gambaran umum yang dituliskan Ibu Menteri di sini kriteria penerima kartu ini hanya ada tiga, warga negara Indonesia, kemudian berusia 18 tahun ke atas, tidak ada batas umurnya. Ini harus ada batasnya, jangan sampai nanti sampai 50 tahun juga dapat. Pra kerja inikan ada batasnya, 18 sampai 20 berapa misalkan. Kemudian belum bekerja, jadi bukan yang di-PHK kalau menurut saya. Betul-betul belum bekerja, saya setuju dengan Pak Saleh.

Kemudian mengenai kategori kondisi sosial ekonomi. Belum kerja, orang tuanya mampu, dia mampu, karena malas kuliah ingin ikut kartu pra kerja, itu juga tidak bisa. Dia harus masuk dalam kategori miskin. Maka dari itu data dari BPS saya tidak sepakat, karena dari BPS itu datanya sudah kuno, tidak akurat di lapangan, itu sudah kejadian dengan kartu PKH, Kartu Indonesia Pintar. Bahkan KIS PBI karena awalnya menggunakan data BPS itu amburadul di bawah, berantem semua rakyat. Karena yang mampu dapat, yang tidak mampu justru tidak dapat. Ini kriteria kartu pra kerja harus ada klasifikasi bahwa dia memang mungkin. Maka harus ada koordinasi dari kementerian dan seluruh kepala daerah untuk data yang berkaitan dengan data miskin itu dikoordinasikan, di sinkronisasi. Ini yang kemarin kita ingatkan juga, Pak Menkes dengan Pak Mensos juga harus bekerjasama, supaya penerima Kartu KIS PBI juga tepat sasaran. Maka kartu pra kerja ini juga wajib tepat sasaran. Maka 2 juta kartu yang nanti diterima itu betul-betul kepada orang yang berhak.

Kemudian mengenai PMO, ini kaitannya dengan kenapa harus ke Menko tadi ya, PMO inikan saya tidak tahu nanti di Kementerian Tenaga Kerja PMO ini siapa dia, ini barang apa, siapa pelaksananya, dan dia di bawah koordinasi siapa. Apakah *outsourcing*, apakah ada di salah satu dirjen.

Jadi nanti ibaratnya begini, Ibu, mirip-mirip BPJS. Pelaksananya BPJS, yang kena getahnya Menteri Kesehatan. Tadi Pak Suir Syam juga menyampaikan. Tadi terjadinya begitu, yang melaksanakan Menko yang tidak tahu apa-apa, dan sementara tupoksi Menko itu hanya mengkoordinasikan, dia tidak punya otoritas untuk melaksanakan program karena dia bukan kementerian teknis, dan dia tidak punya mitra kerja spesifik di DPR RI, maka nanti yang bagi-bagi pelaksanaan segala macam yang ngatur Menko, nanti yang kena getahnya Ibu Menteri, Ibu Menteri bakal di caci-maki sampai *ledeh* kalau bahasa jawanya, yakin saya. Sampai lecet kata Pak Suir Syam. Sudah datanya amburadul, tidak sinkron, *bla-bla* segala macam. Ini harus diperhatikan.

Kemudian mengenai kuota. Data kuota ini harus disesuaikan dengan jumlah pra kerja di setiap daerah itu berapa, yang akan lulus itu berapa, dan yang akan lulus dan tidak mampu atau miskin itu berapa di seluruh wilayah Indonesia. Menurut saya data dari BPS tadi prosentase Banten apa segala macam itu data sampah, prosentase doang, tidak ada riil datanya. Riil data itu dari pemkab, karena pemerintah kabupaten/kota dia yang tahu SMA, SD, SMP, SMK/SMA mana yang akan meluluskan dalam sekian periode tahun ini. Dan jumlah yang sudah lulus dan masih menganggur itu berapa, itu pasti mereka punya.

Kemudian sesuai dengan variabel kriteria tadi juga itu harus disinkronisasi jumlah data per wilayah kabupaten/kota dengan variabel-variabel kriteria tadi saya sebutkan. Jadi kriterianya juga harus diperbaiki, tidak hanya tiga itu. Tidak segampang itu kita menentukan siapa nanti yang berhak menerima kartu pra kerja.

Kemudian yang penting lagi yang perlu saya ingatkan mengenai lembaga yang nantinya dijadikan tempat untuk melakukan pelatihan atau *training*. Di sini cuma disebutkan lembaga pelatihan vokasi yang ada di *website* atau di Apps. Ini siapa, apakah BLK? Kalau BLK hampir semua teman-teman di Komisi IX BLK kita sudah usang. Tidak cuma gedungnya yang mau ambruk, alatnya pun sudah pada karatan semua. Saya berkali-kali sidak sendiri, baik reses maupun tidak reses, ke BLK. Bahkan orang-orangnya pun SDM-nya di BLK pun tidak ada, sepi. Di dapil saya, di tapil teman-teman, semua begitu. Peralatannya sudah jadul, karatan. Kadang-kadang kita sidak kesana kepala BLK-nya tidak ada, karyawannya tidak ada, tidak ada manusianya sama sekali di situ. revitalisasi memang harus dilakukan, tetapi berapa waktu lamanya revitalisasi ini nanti dikaitkan dengan percepatan pelaksanaan pelatihan kerjanya harus sinkron.

Kemudian 1.000 BLK komunitas yang kemarin sudah direalisasi dan tahun ini rata-rata sudah berjalan, tolong didata dari 1.000 BLK komunitas itu bidang apa saja. Karena dugaan saya rata-rata komputer, mungkin 70 persen komputer, 30 persennya apa? Berarti kan pra kerja ini nanti mayoritas yang akan di-*training* di BLK komunitas yang tahun lalu itu hanya di bidang komputer saja, tidak di bidang lain. Sementara minat mereka pada saat mereka lulus dan ingin kerja kemana saja kan kita tidak tahu, itu harus didetailkan juga. Ada berapa SMK yang ada di Indonesia, jurusan otomotif berapa, jurusan kecantikan berapa, jurusan busana berapa, jurusan komputer

berapa. Ini tidak mudah, Ibu Menteri, maka perlu kerja keras. Dan yang pertama harus dilakukan oleh Ibu Menteri adalah segera menolak pelaksanaan atau implementasi dari program kartu pra kerja ini ke Kemenko sebelum *chaos* dilapangan. Ibu Menteri harus berani *fight*, karena ini wajah menteri dan kawan-kawan di Kemenaker. Kalau ini diambil Kemenko, kasarnya ini Ibu Menteri ya, tidak ada gunanya ada Kemenaker, buat apa, ngabis-ngabisin duit, kinerjanya tidak ada. Program prioritas Jokowi justru dilaksanakan oleh Kemenko yang dia tidak punya hak untuk melaksanakan program kerja.

Kemudian saya juga mohon ada Ibu Menteri untuk membuat klasterisasi yang tadi saya sebutkan. Jadi klasterisasi itu nanti poin-poinnya adalah wilayah-wilayah seluruh kabupaten/kota. Nanti dibuat per provinsi, setiap provinsi ada kabupaten/kota. Nanti dicatat di situ berapa lulusan dalam tahun depan ini dari SMK, SMA dan lain sebagainya. Kemudian dari semua yang di data ini yang kategori miskin berapa. Dicek lagi yang sudah kategori miskin ini apakah mereka sudah masuk di BDT (Bank Data Terpadu) masyarakat miskin yang ada di Kemensos. Ini harus ada koordinasi juga dengan Kementerian Sosial. Jangan pakai data BPS, karena BPS itu tidak pernah akurat. Mereka kalau melakukan survei ulang asal-asalan. Kita sudah pernah beberap kali melakukan pengintaian dan pemantauan juga, mereka tidak sepenuhnya menjalankan itu dengan sangat baik.

Kemudian mengenai jumlah yang 2 juta Pak Ketut sampaikan tadi. Saya ingin menambahkan juga, kenapa 2 juta? Kalau alasan dari Ibu Menteri 2 juta itu tahun pertama dengan jumlah pengangguran tadi itu sekitar 7 juta. Harus dibedah lagi ini, pengangguran 7 juta itu klasifikasinya ini siapa. Pengangguran yang sudah berumur 40 tahun ke atas, berkali-kali kerja malas dipecat bosnya atau 7 juta ini adalah 7 juta pra kerja yang baru lulus dan memang membutuhkan kartu ini. Maka ini ketemu lagi, tidak sinkron datanya. Jadi tolong dihitung ulang lagi yang masuk di kategori pra kerja itu berapa dan untuk sampai lima tahun ke depan itu jumlahnya berapa. Maka tim dari Banggar akan betul-betul menyiapkan untuk mengoptimalkan dan mensukseskan program ini. Mereka bisa kawal anggaran itu sampai lima tahun ke depan.

Kemudian mengenai insentif pasca pelatihan di sini hanya ditulis 500 ribu. 500 ribu ini satu kali atau tiga kali tiga bulan atau enam bulan? Seingat saya Presiden Jokowi pada saat kampanye dia tidak memberikan spesifik bahwa nanti akan diberikan insentif sebelum dapat kerjaan. Ini kan menjadi tanda tanya. Maka menteri yang harus bisa menangkap itu, apakah cukup setelah anak-anak ini dilatih kerja dan satu bulan Kemenaker bisa menyalurkan mereka kepada tempat-tempat yang sesuai dengan bakat dan minat dan sesuai dengan pelatihannya. Berapa lama perlu waktunya?

Saya juga minta perusahaan-perusahaan manufaktur ataupun apapun di seluruh Indonesia yang siap bekerja sama menampung anak-anak ini di mana saja. Setidaknya minimum Anggota Komisi IX bisa cek di Dapil masing-masing sesuai tidak ini datanya. Kayak misalnya data Dapil saya, Tegal-Brebes, saya tahu datanya. Berapa manufaktur, berapa perusahaan ini, berapa perusahaan itu apa segala macam. Dan apakah juga mereka sedang membutuhkan tambahan tenaga kerja, kan kita tidak tahu juga, karena saat ini banyak juga justru yang *motong-motong* jumlah tenaga kerjanya. Jumlah ini juga Ibu Menteri harus punya klasterisasi setiap daerah, sehingga sinkron, nanti *gampang*. Paling tidak dalam satu waktu yang sangat singkat ini *bikin*

dulu *pilot project*. Satu tim *bikin pilot project* bagaimana ini caranya *bikin* klasterisasi. Nanti tinggal di-*template* untuk daerah-daerah yang lain, sehingga mudah. Ini jumlah 10 triliun saya tidak tahu data detailnya seperti apa. Untuk biaya pelatihan, sertifikasi, pasca pelatihan, termasuk insentif 500 ribu itu berapa bulan.

Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Tapi maksud saya dari semua yang disampaikan teman-teman tadi pintu masuk kesuksesan kartu pra kerja ini adalah segera ditarik kembali mengenai implementasi atau *leading sector* dari program ini adalah Kemenaker. Saya yakin mungkin Ibu Menteri Keuangan dan juga Presiden Jokowi dan Pak Wapres setuju dengan ini. Karena *wagu* banget, masak Menko ada program. *Wagu* itu apa ya selain bahasa Jawa? Tidak elok/tidak pantas, Tupoksinya di Menko bukan itu. *Lagian* kalau dipikir-pikir ini Menko kan kerjanya sudah banyak, *ngapain* mengurus *printil-printil* 10 triliun. Sudahlah kasih Ibu Ida saja, *bikin* repot. Menko kan banyak yang diurus, koordinasinya kementeriannya banyak.

Saya tanyanya sama Ibu Menteri, Ibu Dewi, bukan sama Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah pasti tahu, dia urusannya banyak. Maka menteri yang harus menangkap itu. Makanya saya minta Ibu Ida untuk... Kita Komisi IX mendukung untuk mendorong atau menggeser program ini untuk dikelola oleh Kemenaker.

Demikian dari saya.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita sudah Jam 13.07 menit. Kita skors sidang sampai Jam 14.00. Pertanyaan masih ada 7 orang, 7 orang masih ada dalam daftar tunggu. Saya tawarkan, kita skors sidang sampai Jam 14.00, setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

**(RAPAT DISKORS PUKUL 13.07 WIB)**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Boleh skors sampai 13.30 tidak?

**KETUA RAPAT:**

Skors saya cabut dulu ya.

Skors saya cabut.

**(SKORS DICABUT PUKUL 13.07 WIB)**

Sebentar, ini kan ada pada mau makan, mungkin mau sholat.

**INTERUPSI F-GERINDRA (Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.):**

Pimpinan, interupsi.

Mengingat karena ini masih pra dan persiapan, kami usulkan agar pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai kita teruskan sembari bergantian sholat, sehingga dengan demikian nanti bisa diteruskan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Saya kembalikan lagi. Ada dua opsi, kita sampai Jam 14.00 atau sampai Jam 13.30? Ibu Menteri tawarkan kita 13.30 lebih cepat.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Izin, Pimpinan.

Kita dengar dulu alasannya kenapa 13.30 Ibu Menterinya. Jangan-jangan Ibu Menteri supaya cepat selesai rapat ini. Padahal kita kan ingin sampai selesai tuntas jawabannya. Kita dengar dulu alasannya. Kalau tidak kan kita juga buru-buru makan, buru-buru segala macam, setengah jam itu biasanya tidak cukup.

Jadi saya usul begitu, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Mungkin bisa Ibu Menteri sampaikan alasannya.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Kalau alasan Jam 13.30 bukan berarti saya tidak mau menjawab dengan tuntas dan bukan berarti saya tidak mau mendengar, Pak Saleh Daulay. Repot kalau kemudian ingin Jam 13.30 diartikan seperti tidak mau mendengar dan tidak mau tuntas. Prinsipnya saya ingin mendengar dan ingin tuntas.

Pak Ketua, mohon izin, saya terjadwal nanti malam buka acara di Bali. Jadi jika dimungkinkan saya bisa masih tetap berkegiatan di Bali, maka saya berharap Jam 13.30 dimulai, nanti bisa terus sampai kapanpun jika Bapak/Ibu masih butuh saya ada di sini saya akan batalkan di Bali.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Ibu Menteri sudah sampaikan alasannya. Kita memutuskan bersama, kita putuskan 13.30 atau Jam 14.00? 13.30 ya kita masuk lagi.

**(RAPAT: SETUJU)**

**(RAPAT DISKORS PUKUL 14.00 WIB)**

**KETUA RAPAT:**

Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi IX yang terhormat,  
Ibu Menteri dan jajarannya,



Dengan ini skors saya cabut.

**(SKORS DICABUT PUKUL ..... WIB)**

Kita sambung dengan beberapa pertanyaan yang masih tersisa.  
Berikutnya kami persilakan yang terhormat Pak Nur Yasin, silakan.

**F-KB (H. Ir. NUR YASIN, M.B.A., M.T.):**

Terima kasih, Ketua.

*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

Pimpinan Rapat dan Teman-teman Anggota Komisi IX yang saya hormati,  
Ibu Menteri dan jajarannya yang saya hormati,

Saya hanya mau memberi masukan sebetulnya berkaitan dengan program kartu pra kerja ini. Maksudnya begini, dari tadi kita bahas semua itu dari sisi *supply side* sebetulnya, dari sisi memberi pekerjaan, dari sisi menyuplai tenaga kerja. Kita belum bicara sama sekali yang berkaitan dengan *demand side*. Antara suplai atau penghasil tenaga kerja, lembaga pendidikan, pelatihan, dan lain-lain, inikan harusnya *link and match* dengan jenis pekerjaan yang ada di masyarakat atau di Indonesia ini. Dari tadi kita juga belum bicara sedikitpun tentang *demand* ini. Oleh karena itu program kartu pra kerja ini akan sangat baik manakala dikoordinasikan dengan para pelaku bisnis di lapangan. Artinya, pelaksanaannya bisa kerjasama, ditambah lagi karena tempat-tempat BLK atau pelatihan kerja yang ada di kita itu sudah sangat ketinggalan. Saya tidak usah bahas, karena tadi teman-teman semua sudah membahas. Alangkah baiknya manakala itu dikerjasamakan dengan grup-grup bisnis yang ada di lapangan, yang besar seperti Samsung, Toyota, dan lain-lain. Dan disamping mereka punya peralatan yang sangat canggih saat ini di industrinya, langsung bisa untuk *job training* disitu. Dan tentu lebih siap untuk masuk ke bidang kerja yang ada di masyarakat.

Program yang telah diuraikan tadi kalau kita melihat ke negara-negara lain itu banyak sekali yang menjalankan. Saya pelajari ada lima negara setidaknya, Rusia, Jepang, Estonia, Irlandia, dan Perancis. Saya punya datanya, mereka umumnya menyebut tunjangan pengangguran. Dan sistemnya itu macam-macam. Ada yang kalau di Perancis itu dana yang dipakai diambilkan dari sebagian tenaga kerja yang sedang bekerja. Ada aturannya lah, sehingga tidak memberatkan pemerintah. Kalau di Rusia itu semacam di kita yang Ibu jelaskan tadi, tidak jadi didanai oleh pemerintah.

Jadi memang program pra kerja ini bukan kita sebagai pendahulunya, masih banyak di tempat lain yang berhasil maupun kurang berhasil. Sehingga dengan demikian mungkin tidak ada salahnya, Ibu Menteri, selama mendesain program ini juga dilakukan atau mengirim orang untuk mempelajari atau memanggil duta besarnya untuk ditanya tentang program yang sama di negaranya masing-masing. Atau katanya kita kunker kesana. Kita berharap semua program ini berhasil.

Yang lain, saya tadi *ngetes* suruh mengakses Sisnaker di luar. Saya dapat laporan 'agak *gampang* diakses'. Agak *gampang*, tidak rumit-rumit *banget*. Karena kemarin BP POM itu sulit diakses.

Hanya ada satu, Ibu, dia laporan yang kami minta dibantu untuk mengakses dari luar itu agak berat. Pasti Ibu ada ahlinya kenapa berat. Misalnya bisa juga dilengkapi dengan *micro services* misalnya, itu bisa mempercepat proses untuk bekerjanya *web* Ibu/*web* Kemenaker. Jadi memang benar tadi *gampang* diakses sekali lagi. Hanya tetap perlu perbaikan-perbaikan supaya lebih cepat. Karena sekarang masalah cepat ini sangat penting.

Terakhir, saya ingatkan saja, banyak peristilahan di konsep ini, peristilah proyek sebetulnya. Jadi mungkin vendornya jangan terlalu banyak masuk pada tahap sekarang, sehingga proyek ini berhasil dan *gampang* dipertanggungjawabkan. Kalau terlalu banyak masuk dari sisi vendor mungkin nanti agak kesulitan dalam pertanggungjawabannya.

Saya hanya itu saja, karena banyak yang lain tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman. Sekali lagi saya berharap kegiatan ini berhasil. Saya tidak menyebut proyek sebetulnya, di sini banyak kata-kata proyek. Saya menyebutkan kegiatan atau program kerja ini berhasil.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Berikutnya yang terhormat Ibu Anggia.

**F-KB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Pimpinan dan teman-teman Komisi IX yang saya hormati,  
Ibu Menteri dan semua pejabat yang hadir,

Pertama saya mau mengapresiasi Ibu Menteri. Dari beberapa kali kita rapat dengan pemerintah kadang *slide*-nya itu tidak dimengerti. Jadi ini saya tadi mengikuti perjalanan paparan ini mudah dimengerti, meskipun kemudian didalamnya kita banyak pertanyaan. Tetapi paling tidak teman-teman disini memahami apa sebenarnya yang dipaparkan oleh Ibu Menteri. Ini apresiasi saya setulus-tulusnya, karena memang kemarin setelah agak bingung memahami paparan dari teman-teman mitra lain.

Yang kedua adalah rapat kita kali ini kan tentang Kartu Pra Kerja (KPK), ini adalah kerja-kerja umat. Saya sangat mengapresiasi sebenarnya, ini adalah kerja yang luar biasa, karena akan memberikan akses pada masyarakat, kepada orang-orang yang memang membutuhkan untuk penghidupannya.

Tetapi memang kemudian banyak juga dipertanyakan oleh teman-teman yang lain dan saya yakin sebagian besar yang tadi sudah bertanya mempertanyakan kenapa kemudian pengelolaannya. Jadi kita agak lucu saja, karena kalau misalnya di Kemenko yang sebenarnya tidak punya mitra di DPR, jadi bagaimana kita akan melihat kinerjanya, mengevaluasi atau

memantau apakah itu berhasil atau tidak. Tupoksinya pasti bukan di Kemenko.

Mungkin nanti, seperti yang diutarakan oleh Mbak Dewi dan beberapa teman yang lain tadi, kita boleh usul misalnya. Ini menjadi bagian dari risalah kita dari rapat kali ini untuk dipertimbangkan. Entah bagaimana nanti Ibu Menteri bisa diteruskan kepada presiden atau kepada siapa *stake holder* yang memang harus dikomunikasikan. Karena sebagian besar dari teman-teman, dan saya yakin diluar sana, tupoksi yang jelas untuk isu inikan memang Kemenaker. Bagaimana caranya ini benar-benar menjadi risalah kita, menjadi salah satu rekomendasi dari Komisi IX untuk pengelolaan kartu pra kerja.

Kalau untuk alasan dan semuanya tadi teman-teman sudah memberikan argumentasi dari A sampai Z, sudah banyak banget, kenapa kemudian kita harus lebih memosisikan/mendudukan isu ini pada porsinya. Saya pikir itu saja untuk memperkuat, karena sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain.

Saya pikir itu.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Yang berikutnya pendatang baru, yang terhormat Pak Fadholi.

**F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

Bapak/Ibu Pimpinan Komisi IX dan Bapak/Ibu Anggota yang saya hormati;  
Ibu Menteri dan seluruh jajarannya yang sangat saya hormati,

Izinkan yang pertama saya memperkenalkan diri dan tadi sudah diawali oleh yang mulia Bapak Ketua.

Mensikapi apa yang sudah disampaikan tadi pada prinsipnya tadi sudah banyak sekali dari hulu sampai hilir ini sudah ditanyakan sebetulnya. Tetapi saya hanya akan sedikit menyampaikan beberapa hal saja.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Saleh itu sangat bagus sekali. Kalau disebut dengan Kartu Pra Kerja kemudian disingkat dengan KPK. Kalau saya lebih baik bagaimana kalau itu disebut dengan Kartu Panggilan Kerja, sehingga orang yang mendapatkan kartu itu nanti bakalnya akan dipanggil untuk kerja. Itu akan lebih bagus mungkin istilahnya semacam itu.

Jadi kalau masih Kartu Pra Kerja itu kan sama dengan kartu pengangguran kan. Tetapi kalau sudah mendapatkan kartu itu, maka harapannya akan mendapatkan panggilan untuk kerja. Atau mau Kartu Siap Kerja juga boleh.

Kemudian yang kedua, ini kan persoalannya yang mengelola dan di sini ada setiap ada satu kata-kata tenaga kerja ini kan mesti harus di wilayah Menteri Tenaga Kerja. Saya akan tanya, apakah program ini Menteri Tenaga

Kerja itu akan menerima *output* saja, ini loh 2 juta yang menerima kartu pra kerja ini atau panggilan kerja ini, silakan tenaga kerja mencarinya, apakah itu yang dimaksud? Kalau itu yang dimaksud sama dengan kita itu sudah menampung hasil daripada pendidikan yang tadi sudah disebutkan tadi, ada SMK, ada ini macam-macam. Itu kan tidak jauh berbeda sebetulnya.

Kalau memang ini menjadi satu domain bahwa Menteri Tenaga Kerja ini tidak sekedar menerima daripada hasil atau *output* 2 juta orang ini, maka bagaimana caranya itu bisa terlibat sejak awal bersama-sama untuk bisa proaktif. Tentu tidak akan meninggalkan dari Menko, ini ada satu kerjasama yang bagus. Tetapi harus ada *leading sector*-nya bagaimana, ini yang sangat penting menurut saya.

Kemudian yang kedua, apakah ini program yang sudah harus dilaksanakan dan sudah matang dan sudah tidak bisa diganggu dan sudah tidak bisa dibahas lagi? Kalau ini satu program yang memang harus segera dilaksanakan dan tidak bisa dikutak-kutik, sekarang yang akan kita bahas beda. Tetapi kalau itu masih memungkinkan untuk bisa ada celah kita akan membahas, maka cara pembahasan dan yang akan kita bahas juga beda.

Yang pertama, ini dari yang kedua ini, a begitu, kalau ini memang satu program yang masih memungkinkan untuk bisa kita kutak-kutik, maka program ini bisa dikategorikan ada dua program. Yang pertama adalah program pelatihan mandiri, dalam arti orang yang sudah dilatih itu kemudian diberikan satu pengalaman/edukasi yang kemudian hasilnya itu bisa langsung mandiri dan kemudian dikasihlah kartu setelah pelatihan kerja, sehingga di situ dia sudah tidak punya lagi hak untuk bisa mencari-cari lagi sebagai tenaga kerja, karena sudah dianggap bahwa setelah hasil pelatihan itu mereka sudah bisa mandiri. Kalau dengan semacam itu berarti kan biayanya akan berbeda. Bagaimana kalau sebagian itu di-*switch* untuk bisa.

Kita tidak perlu 2 jutanya, tetapi bagaimana kalau kita bisa mendidik 500 ribu, tetapi itu sudah bisa melakukan kerja-kerja yang bagus, itu akan lebih bagus daripada kita mencetak yang 2 juta tetapi *toh* prakteknya masih menunggu panggilan kerja. Karena itu masih menunggu panggilan kerja sama dengan sama saja ini akan membebani pada Menteri Tenaga Kerja.

Kemudian yang kedua, jadi a tadi, sekarang b, tadi sudah banyak dibahas siapa yang akan melakukan ini? Saya pikir ini harus tegas dan jelas bahwa lembaga pengelola yang nanti akan melakukan pekerjaan ini dipersyaratkan bahwa kalau dia mau mendidik boleh, tetapi dengan syarat bahwa yang dia didik harus bisa disalurkan minimal 70 persen, sehingga kalau lembaga yang mengelola itu tidak bisa menyalurkan tenaga kerjanya minimal 70 persen tidak usah dikasih.

Kalau hanya pembekalan-pembekalan itu sudah cukup di banyak tempat. Oleh karena itu mesti harus dicari yang profesional yang mempunyai satu hubungan yang luas dengan pihak manapun, sehingga orang yang masuk kerja di situ masuk melakukan satu pembekalan di situ dia akan mendapatkan jaminan bahwa nantinya dia akan disalurkan menjadi pekerja. Kalau ini yang dilakukan, maka ini akan sangat-sangat bagus. Tapi prinsipnya bahwa program ini sangat bagus sekali, kita akan sangat mendukung. Oleh karena itulah maka kalau ini masih bisa dikutak-kutik, masih bisa kita bahas dan sebagainya, ini bisa kita bahas dengan cara misalkan:

1. Bahwa persyaratan yang dimaksud pendidikan ini adalah pendidikan mandiri, dan

2. Bahwa lembaga yang akan mengelola ini, apapun namanya, dari manapun, bagaimana dia, tetapi dia harus berani memberikan satu jaminan saya akan ikut mengelola pelatihan ini tetapi saya akan sanggup untuk bisa menyalurkan minimal 70 persen dari program yang itu diberikan. Kalau itu dilakukan, ini sangat bagus.

Tetapi kalau hanya sekedar kursus-kursus biasa, setelah kursus dikasih kartu, setelah kursus dikasih ini, ini saya pikir ini perlu. Ini bagus, tetapi masih perlu dikaji ulang dari sisi asas manfaatnya.

Kalau berbicara untuk mendukung ini, mempercepat ini bisa terlaksana, saya pikir kalau tidak berpikir dari sisi asas manfaatnya, kami ini seorang politik-politik senang-senang saja, apalagi kalau dilibatkan untuk bisa mencari sebanyak mungkin, itu bisa saja, siap-siap saja, kan begitu tidak ada masalah. Apalagi kalau menjelang Pemilu, itu lebih bagus lagi.

Tetapi kita berpikir bukan sekedar itu. Kita akan berpikir dari sisi manfaatnya, karena mempertanggungungkan uang yang tidak sedikit. 10 triliun ini adalah angka yang sangat fantastis untuk bisa kita selesaikan bersama. Saya yakin bahwa Ibu Ida ini mempunyai satu hal yang sangat bagus, dan nanti pasti akan mempunyai terobosan-terobosan yang bagus. Sejauh ini untuk kepentingan masyarakat secara pribadi saya selaku komisi yang ditempatkan di sini saya akan mendukung sepenuhnya. Tetapi untuk itu bagaimana kita akan bisa menghindari yang disebut dengan mubazir itu.

Demikian, Pak Ketua. Atas kekurangannya mohon maaf.

*Akhirul kalam.*

*Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baru datang tapi menguasai *banget*, Pak Fadholi.

Berikutnya yang terhormat Pak Sutan.

#### **F-GERINDRA (Ir. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan, Rekan-rekan Komisi IX, Ibu Menteri, Pak Sekjen beserta seluruh jajaran.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Terkait pembahasan kita yang sungguh sangat strategis saat sekarang, Ibu Menteri, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, Pimpinan, Ibu Menteri ini saya lihat orang yang cerdas. Kenapa? Karena beliau memahami bahwa tenaga kerja ini harus ada di Menteri Tenaga Kerja, makanya di bahannya terakhir pun beliau tidak sembunyi-sembunyi menyampaikan bahwa ini ada di Menko. Untuk itu saya melihat karena ini sungguh teknis mengusulkan dan melalui Pimpinan nanti masuk ke kesimpulan, kita bantu solusi terhadap hal ini. Ibu Menteri yang sangat cerdas itu membaca tanda-tanda ini bakalan ada bahaya di belakang dan ada manfaat yang luar biasa agar ini *leading sector*-nya adalah Menteri Tenaga Kerja. Kenapa? Karena ini teman-teman semua tadi, saya juga mendengar,

apalagi tadi Pak Saleh, itu anak yang sholeh itu, kenapa saya katakan kalau sudah seperti itu. Ini kan sesuatu niat baik daripada pemerintah harus diikuti juga dengan cara yang baik. Jangan niat baik ini nanti caranya tidak baik malahan menjadi persoalan di belakang hari.

Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa program kartu pra kerja ini Ibu Menteri sudah membuat persiapan. Artinya bahwa Ibu Menteri sudah siap sebenarnya. Hanya tinggal lagi, saat sekarang kan belum ada regulasi, inilah momennya yang tepat untuk kita beri masukan agar nanti Perpresnya dan juga ketentuan-ketentuan yang terkait dengannya memang betul-betul, baik itu PMO-nya, diawasi oleh Menteri Tenaga Kerja.

Hal lain, Ibu, tadi saya dengar teman-teman, termasuk Pak Saleh tadi, sangat mengkhawatirkan, apabila sudah dilakukan pelatihan, terus pelatihannya sudah khusus vokasi dan sudah diberikan sertifikat, tentu kita tahu SDM-nya pasti meningkat, ini apakah sudah ada kerjasama yang dibuka, baik itu perusahaan yang menerima maupun institusi lain? Kalau belum ada saya khawatir ini nanti kembali lagi sia-sia. Karena kita ketahui dananya ini cukup besar, 10 triliun. Dan malahan kita mengusulkan, karena ini baru langkah awal, ini barangkali Pimpinan perlu kita kehati-hatian, bila perlu setengah dulu dari itu. Tapi kalau ini memang berjalan dengan baik, ini kan adalah membuat pelatihan, setelah itu berikan sertifikat, jadi jika ini berjalan dengan baik, saya tadi melihat dukungan teman-teman Komisi IX yang ada di Banggar luar biasa, akan menaikkan berlipat-lipat. Artinya apa? Kita semua mendukung program ini, karena kita ketahui program ini cukup baik.

Hanya tinggal lagi kembali kami ingatkan, sebagai perbandingan, kami sebelumnya di Komisi X, kami sampaikan bahwa upah itu di tingkat SMK itu sekitar 2,87 juta, kalau SMA 2,84 juta, SMP 2,1, SD 1,80 dan Diploma itu 7,75 dan di tingkat universitas sampai 4,5. Artinya kalau kita rata-ratakan dengan upah nasional ini kurang lebih 2,9 juta. Yang ingin kami sampaikan kepada Ibu Menteri, terkait dengan anggaran yang mau khusus pra kerja ini kalau untuk 20 juta itu kan ada 10 triliun, artinya ini perlu ada dilakukan verifikasi. Yang kembali lagi kepada PMO ini siapa yang bertanggungjawab, sehingga nanti jenjang pendidikan, karena kita ketahui semakin tinggi jenjang pendidikan tentu upah kerjanya semakin tinggi. Ini mohon menjadi sesuatu catatan penting juga.

Selanjutnya terkait dengan PMO ini, karena ini kan tenaga kerja ini menjadi sesuatu persoalan di seluruh provinsi, nanti kalau mau dibentuk PMO ini, karena kita belum melihat bagaimana Juklak dan Juknis, ini apakah dibentuk di seluruh provinsi di Indonesia? Apakah sampai ke kabupaten dan sampai sejauh mana? Sehingga dengan demikian kita ketahui persoalan-persoalan yang *urgent* itu adalah di tingkat kabupaten/kota. Karena kalau provinsi itu adalah wakil daripada pemerintah pusat.

Barangkali itu, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Berikutnya kita ke yang terhormat Pak Suir Syam.

Yang terakhir baru Pak Rahmat ya.

**F-GERINDRA (dr. H. SUIR SYAM M.KES., M.M.R.):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

Terima kasih, Ketua.

Yang kami hormati Ibu Menteri beserta jajarannya,  
Pimpinan Komisi IX beserta seluruh Anggota,

Tadi sudah banyak saran-saran/pertanyaan daripada teman-teman.  
Saya mungkin agak beda sedikit.

Ibu Menteri yang kami hormati,

Sekarang ini banyak terjadi PHK-PHK. Pengangguran sudah banyak, PHK juga banyak, antara lain adalah disebabkan mungkin perubahan teknologi. Perilaku belanja yang sekarang orang lebih suka *online*, sehingga toko-toko *retail* dan sebagainya yang banyak pekerjanya juga sudah banyak tutup. Kemudian juga banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang masuk yang besar sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri juga sudah mulai tutup, sudah mulai banyak PHK-PHK. Seperti pabrik semen, kemudian pabrik besi dan sebagainya itu, karena tidak bisa bersaing sehingga banyak PHK-PHK.

Kemudian kita sekarang ini mengeluarkan kartu pra kerja untuk 2 juta orang. Yang menganggur saja sekarang sudah 7 juta, kemudian yang mencari pekerjaan juga sudah banyak sekali. Saran saya tidak usah kita jual kartu pra kerja ini. Yang perlu sekarang ini adalah membuka peluang kerja.

Negara kita ini negara agraris, tetapi kita masih mengimpor pangan. Negara kita ini negara banyak mengandung bahan-bahan, tetapi kita masih mengimpor. Jadi oleh sebab itu saya menyarankan kepada Kementerian Tenaga Kerja bagaimana kalau kita memikirkan pelatihan-pelatihan untuk pertanian dan untuk perkebunan. Negara kita negara agraris, tapi kita mengimpor beras. Negara kita termasuk juga mengimpor BBM dan sebagainya yang cukup besar. Sebenarnya itu bisa kita atasi dan sekaligus juga bisa menampung tenaga kerja.

Kenapa kita tidak hitung berapa kita mengimpor pangan dalam satu tahun? Kalau kita tanam itu berapa kita butuhkan lahan? Lahan kita banyak. Hutan-hutan yang rusak itu bisa dijadikan untuk lahan pertanian atau lahan perkebunan, diberikan kepada masyarakat/kepada petani. Kita latih petani itu 3 sampai 7 juta kartu pra kerja ini mungkin sudah bisa untuk membuat sawah satu hektar, sehingga nanti banyak sawah-sawah di Indonesia ini yang baru, sehingga kita tidak perlu mengimpor pangan lagi.

Yang kedua juga masalah BBM itu bisa kita atasi dengan menanam bahan bakunya. Juga seperti itu, diberikan kepada masyarakat yang menganggur, kita latih mereka, sehingga kita jangankan mengimpor energi, kita bisa mengeksport.

Jadi oleh sebab itu anekdot kami ini tidak usahlah masyarakat yang kita latih bekerja itu. Yang kita latih yang pertama itu pejabatnya yang mengambil keputusan, menterinya yang mengambil keputusan, apa yang harusnya diperbuat supaya masyarakat tidak menganggur. Sama dengan yang disampaikan obat gosok tadi, jangan sakit kepala digosok kepala pakai

perut, perut digosok. Kalau sakit yang lain? Ada bahaya yang digosok. Di kampung saya ada juga mantri/perawat, dulu perawat praktek ini, apa yang sakit dia suntik, kepala sakit disuntik kulit kepala, perut sakit disuntik perut. Jangan-jangan semuanya dia suntik.

Jadi oleh sebab itu perlu dievaluasi lagi perlu tidak kartu pra kerja ini. Biaya yang 10 triliun lebih yang terbuang sia-sia saja. Yang sudah siap bekerja sudah banyak, kita latih lagi dengan uang yang cukup banyak, sedangkan kita tahu uang itu kita pinjam, kita hutang ke luar negeri yang semuanya kita juga yang akan bayar, mungkin perlu dievaluasi lagi.

Terima kasih.

*Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Yang terakhir dari Anggota Dewan, Pak Rahmad.  
Silakan yang terhormat, Pak Rahmad.

**F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):**

Terima kasih, Ketua.

Ibu Menteri dan seluruh jajarannya, Ibu/Bapak sekalian yang saya hormati,

Sudah banyak sebenarnya apa yang sudah disampaikan teman-teman sekalian. Ini saya berbaik sangka sajalah kalau program ini, gagasannya besar, ide besar luar biasa dan dananya juga saya kira untuk satu tahun luar biasa besar. Tetapi dengan gagasan ide besar itu tentu wajar kalau ada yang mempertanyakan, ada pertanyaan, ada yang mempersoalkan, bahkan ada yang men-*support* sana-sini kekurangannya. Saya tidak masuk ke situ, tetapi saya masuk dalam ada suatu hal yang janggal. Suatu program besar, ide dasar yang luar biasa bagus, tapi ada kejanggalan. Meskipun apa yang saya sampaikan ini sudah hampir disampaikan semua teman-teman. Apa itu? Masalah pengelolaannya, Ibu Menteri.

Hari ini kita rapat dengan presiden melalui Menteri Tenaga Kerja, sedangkan program yang mulia besar ini adalah terkait dengan bagaimana mengurangi pengangguran melalui pelatihan untuk siap bekerja. Tentu nanti apa yang disimpulkan pada hari ini tentu adalah laporannya atau irisannya tentu dengan presiden, saya kira begitu Ibu Menteri ya.

Menyambung tadi masalah kejanggalan terkait dengan..., saya baru menyadari dan baru melihat fakta bahwa organisasinya yang kecil, yang notabene biasanya Menko itu hanya sebagai sebuah organisasi dirjen dengan staf yang terbatas, dengan sangat minimalis, kemudian pada saat sekarang ini Menko diberikan suatu kekuasaan luar biasa bisa memveto, meskipun kita mendengar dari media, tiba-tiba diberikan suatu *policy*/ kebijakan dengan isi yang luar biasa, 10 triliun. Logika berpikirnya dari mana? Organisasinya kecil, minimalis, sempit, tiba-tiba *digerojok* anggaran dengan program yang kalau boleh dikatakan 'ambisius' ini. Ambisius bukan berarti jelek, dalam rangka untuk meraih kesejahteraan masyarakat baik-baik saja, tetapi kurang tepat, Ibu Menteri.



Saya menyadari suasana batin Ibu Menteri. Tetapi kami sebagai parlemen tidak boleh menutup mata dengan apa yang terjadi seperti ini. Anggaran besar, kemudian Tupoksi masalah tenaga kerja, tidak dilakukan/dibarengi ketika program berjalan. Kita tidak bisa melakukan secara langsung. Kenapa? Menko itu mitranya dengan siapa? Ketika terjadi di lapangan berbelok atau membelok tidak sesuai dengan rel tujuan yang kita rencanakan, siapa yang akan mengawasi? Dengan parlemen. Tugas pokok kita kan tiga: anggaran (*budgetting*), legislasi dan pengawasan. Nanti pengawasan yang terkait pra kerja, komisi kerja kan kita, Komisi IX.

Saya kira tidak perlu panjang lebar, teman-teman sekalian. Mau menggunakan logika bagaimanapun, namanya Menko itu ya Menko, koordinator, dirjen, tidak bisa teknis. Kecuali ada kekuatan atau ada ide dasar karena Menko itu tidak ada kegiatan kemudian diberilah kegiatan, jadi lucu. Ketika parlemen/teman-teman Komisi IX ditanya, "Itu bagaimana?" "Ini bukan kami, itu Menko." Jadi rancu dan aneh.

Karena kita mendapatkan amanah dari rakyat untuk membidangi ketenagakerja berbicara dengan presiden, ini kita luruskan. Programnya besar, ide dasarnya luar biasa, ketika diimplementasi di lapangan terjadi suatu hal yang tidak *match*, jadi pertanyaan di kemudian hari. Kalau memang itu tidak ditentukan di pra kerja atau tidak diberikan ke Kementerian Tenaga Kerja, berikanlah bentuk program yang dengan tidak nomenklaturnya 'pra kerja'. Kewirausahaan misalnya yang bisa ditempok di koperasi atau yang lain. Tapi substansinya kan adalah karena ada kata kerja program pra kerja itu yang basisnya adalah rakyat kita bagaimana untuk bisa bekerja. Itu Tupoksinya di tenaga kerja/Kementerian Tenaga Kerja dan mitranya tentu yang pas dan tepat, bukan tetap, memang hanya di Komisi IX.

Saya kira, Pimpinan/Ketua, saya bisa menyimpulkan, semuanya hampir menyuarakan begitu. Saya kira nanti kita *bikin* masukan kesimpulan ini.

Yang kedua masalah anggaran. Walaupun ini tidak anggaran, tetapi paling tidak ini ada *inhern*, ada sinkronisasi dengan dunia kerja. Saya menyarankan agar dirjen yang barangkali serapannya tidak sesuai dengan target harus diberikan evaluasi. Bukan evaluasi kerja, tapi evaluasi program.

Saya suka pra kerja, tetapi ketika yang ada di sini ketemu dengan masyarakat selalu ditanya. Seolah-olah DPR itu sebagai sapu jagad, semua yang diminta. Padahal bukan urusan kita. Kita harus mendengarkan dan harus selalu untuk terbuka untuk menyampaikan. Makanya ini ketika kami kunjungan ke lapangan di daerah Dapil pemilihan, "Pak, kami ingin proposal untuk *bikin* ternak kambing", misalnya. "Pak, kami punya kelompok ini remaja-remaja yang ingin untuk otomotif bengkel", misalnya. "Kami ada komunitas HP, tapi ketika rusak bagaimana? Bagaimana Bapak, kami membuat proposal untuk *bikin* pelatihan dan ada program usaha untuk pelatihan HP", misalnya.

Saya mengusulkan, walaupun itu waktu kemarin saya di mitra Komisi IV itu ada program yang luar biasa dan usulan saya juga diterima, itu masih *pilot project*. Saya mengusulkan yang ada di sini juga, bagaimana saya mengusulkan untuk program kewirausahaan mandiri. Wirausaha itu basisnya kelompok. Arahnya tentu..., *output*-nya adalah pekerjaan juga, dunia kerja juga. *Base*-nya adalah bisa pondok pesantren, bisa lembaga, bisa komunitas, bisa LSM, bisa yayasan, bisa koperasi yang berkelompok mengajukan proposal kepada pemerintah. mungkin proposal untuk 20 orang atau 30 orang

untuk 100 juta pengajuan ternak kambing misal. Mungkin dalam rangka untuk proposal pengajuan dari daerah wilayah masing-masing untuk membuat proposal untuk penyusunan usaha bengkel las atau perkebunan. Tadi senior saya dari Gerindra menyampaikan usul.

Kalau memang itu anggaran-anggaran yang barangkali kemarin disisir kembali yang tidak optimal penyerapannya untuk 2020 barangkali bisa dialokasikan untuk pengajuan kewirausahaan mandiri atau wirausaha mandiri. *Base*-nya kelompok dalam rangka tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja. Barangkali kalau satu kelompok itu bisa 50 juta-100 juta, kalau itu bisa 10 orang dalam kelompok yayasan, komunitas, koperasi atau pondok pesantren, luar biasa itu *multi effect*-nya. Dibandingkan sebatas pelatihan-pelatihan, efeknya/*output*-nya apa. Kalau pelatihan tentu akan "Pak, kami setelah dilatih mau apa, kami butuh modal kerja". Ya sudah, yang sudah punya *basic* yang luar biasa, sudah punya proposal, kemudian ditinjau dengan positif ternyata layak, ya oke silakan dikasih bantuan 100 juta hibah dana sosial, dengan *basic* tentu sudah punya badan hukum.

Begitu, Ketua, saya tidak banyak. Paling tidak saya mengamini apa yang sudah disampaikan Ibu/Bapak yang disampaikan di muka.

Terima kasih.

Salam sejahtera.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Merdeka!

#### **INTERUPSI F-GERINDRA (OBON TABRONI):**

Interupsi, Ketua. Satu lagi.

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Obon.

#### **F-GERINDRA (OBON TABRONI):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,*

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Terima kasih Pimpinan, Ibu Menteri dan jajaran yang saya hormati dan banggakan.

Pertama berkaitan dengan program, ini hampir berkaitan dengan program pemagangan, salah satunya di sini kan adalah pelatihan, yang tentu tujuannya adalah bagaimana meningkatkan *skill*, sehingga pekerja-pekerja Indonesia bisa lebih berkompetisi dalam dunia kerja. Kami banyak permasalahan yang di lapangan yang kita temukan, salah satunya adalah peserta pemagangan ini justru menggusur pekerja tetap yang bekerja di perusahaan tersebut. Perusahaan akan lebih asyik menggunakan peserta pemagangan, pelatihan. Karena mereka biasanya kalau dalam aturan itu hanya mendapatkan uang saku atau yang lain-lain. Perlu ada aturan yang lebih jelas, sehingga yang terjadi tidak peserta pemagangan/pelatihan masuk ke perusahaan, katakan perusahaan itu dengan kapasitas 500 orang yang selama ini bekerja, ada pekerja karyawan tetap dan kontrak, justru yang

terjadi adalah pekerja karyawan tetap dikurangi oleh perusahaan dengan alasan apapun dengan masuknya peserta pelatihan tadi.

Saya mengusulkan beberapa hal. Yang pertama adalah aturan-aturan yang nanti/aturan ikutan yang nanti ketika program ini dijalankan. Yang pertama, kalau bicara pelatihan ya pelatihan, bukan bekerja. Kan beda berlatih dengan bekerja. Berlatih tentu untuk meningkatkan *skill*. Aturan yang ada adalah harus jelas berapa komposisi antara teori dan praktek.

Kemudian yang kedua dengan jam kerja. Jangan juga disamakan antara jam kerja pelatihan itu dengan jam kerja yang biasa dilakukan oleh pekerja dengan 40 jam per minggu atau yang lain-lain, mereka tentu harus lebih sedikit dari itu semua.

Kemudian yang ketiga, selain tadi komposisi, kemudian yang lain-lain, harus jelas juga. Karena yang terjadi itu di lapangan, mereka masuk ke pekerja tanpa pelatihan mengerjakan pekerjaan yang tidak jelas, katakanlah hanya mengerjakan mesin itu saja, ya mesin itu sangat-sangat monoton, kemudian setelah itu prosesnya 6 bulan atau 1 tahun selesai, tidak mendapatkan sesuatu yang berarti atau ilmu yang ada. cuma pencet tombol atau segala macam hal-hal yang kelihatannya sangat-sangat sederhana.

Intinya itu tadi, Ibu. Yang pertama jangan sampai juga program ini justru nantinya membuat pekerja yang sudah bekerja dengan status karyawan tetap hilang digantikan oleh magang, karena dari biaya/dari sisi struktur biaya biasanya lebih murah. Karena di sini kan saya lihat salah satunya di pogram ini adalah program pelatihan masuk ke sini.

Terima kasih, Ibu.

Itu saja.

*Billaahit Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih yang terhormat Pak Obon.

**INTERUPSI F-PKS (dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M., A.V.):**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Adang.

**F-PKS (dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M., A.V.):**

Terima kasih.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Adang Sudrajat dari Dapil Jabar II, Fraksi PKS.  
Pimpinan yang saya hormati, para Anggota,  
Ibu Menteri yang saya hormati,

Kementerian Tenaga Kerja ini kan sebetulnya menteri yang mengurus limbah dari pendidikan yang tidak pas. Yang satu itu. Yang kedua, juga ada limbah-limbah lain yang memang dibuat oleh kementerian yang lain berakibat menjadi PR bagi Kementerian Tenaga Kerja. Misalnya begini, kita melihat impor tidak terkendali, akibatnya pabrik-pabrik di dalam negeri itu tidak bisa bersaing dan tutup. Akhirnya apa? Tenaga kerjanya pada *nganggur* karena pabriknya tutup dan itu jadi PR Menteri Ketenagakerjaan.

Yang kedua, misalnya ada lima yang dibuat sendiri yaitu memudahkan misalnya tenaga kerja asing untuk kerja di Indonesia. Ini juga otomatis akan mengambil lahan dari tenaga kerja kita. Saya melihat jangan sampai kebijakan pra kerja ini sebagai permen yang bisa meninabobokan angka bangsa kita, sehingga dia rela dengan bayaran kecil, program yang mungkin tambal sulam, tapi sebenarnya secara substansi dia kehilangan harga diri. Karena bagi kita ini sebagai laki-laki sebetulnya bekerja itu harga diri. Jadi bukan hanya sekedar dapat uang 500 ribu, dapat pelatihan apa, bukan. Dia harga diri. Jadi diusahakan harga diri bangsa ini kan diamanatkan juga di Undang-Undang Dasar, bagaimana kita mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga ini menjadi... Jangan sampai Menko mengambil alih kerja teknis, terus koordinasi tadi yang Menteri Perdagangan jangan impor sembarangan, terus jangan sampai mendatangkan tenaga asing secara begitu *gampang*, sehingga akan membuat pekerja kita kehilangan lahan pekerjaannya. Karena tadi seperti Pak Saleh katakan, bisa jadi bukan karena sistem pendidikannya yang kurang pas juga, tapi karena memang ada lahan-lahan lapangan kerja yang diambil oleh tenaga asing, sehingga kita tidak kebagian. Kalaupun kebagian mungkin kebagian yang sisa-sisanya saja. Ini mungkin nanti mohon di rapat terbatas Menko itu disampaikan juga, jangan sampai ada satu kebijakan dengan kebijakan lain saling *men-delete*. Karena ini akhirnya apapun yang kita lakukan menjadi tidak efektif.

Begitu saja barangkali, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Adang.

Berikutnya dari meja Pimpinan ada yang ingin memberikan tanggapan.

Silakan dari Ibu Felly.

#### **F-NASDEM (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.):**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

*Om Swastiastu,*

*Namo buddhaya,*

*Shallom.*

Yang saya hormati Ibu Menteri bersama jajarannya dan Rekan-rekan Komisi IX,

Ini dari satu buku ini yang saya lihat halaman 9 saja domainnya Ibu Menteri sebetulnya. Ini untuk sistem informasi dengan halaman 11. Untuk halaman 9 yang sistem informasi ini saya ingin tahu apakah dari kementerian,

karena ini ada hubungannya dengan lowongan pekerjaan nasional di halaman 14. Apakah dari Kementerian Tenaga Kerja sudah buat semacam penelitian untuk urusan? Kalau kita lihat nomor 4 dari halaman 14 di sini ada yang namanya lowongan pekerjaan berdasarkan golongan pokok jabatan. Yang nomor 4 ini operator dan perakitan mesin. Operator apa?

Kemudian yang nomor 7, pekerjaan terampil pertanian. Kita lihat ini untuk pekerja terampil pertanian, kehutanan dan perikanan. Mungkin ini kali usul dari kami, kan ada Balai. Karena kalau kita bilang ini yang pra kerja dan sebagainya satu tahun itu hanya 2 juta, inipun saya tidak tahu sampai kapan. Kita lihat bahwa untuk pemutusan hubungan kerja sekarang saja sudah banyak, yang retail-retail sudah mulai mati, sudah banyak yang sudah mulai mati. Berapa banyak saja ini yang putus.

Kemudian setiap tahun ini kan kalau terakhir kalau kita lihat penurunannya tidak sampai 1 persen penurunannya dari kebutuhan. Angka untuk orang yang pengangguran kebutuhannya dia punya penurunannya tidak sampai 1 persen penurunannya per tahun. Kemudian ini kita cuma 2 juta, berarti cuma selisih berapa itu. Belum lagi yang baru yang sudah selesai sekolah. Kita tertarik yang dibidang 'limbah pendidikan' oleh Pak Adang Sudrajat.

Karena ada kaitannya dengan SMK. SMK ini seingat saya waktu itu digenjut untuk tujuannya setelah dia selesai dari SMK dia bisa mandiri, kan tujuannya seperti itu. Tapi apa yang terjadi sekarang, justru mereka dari SMK yang penganggurannya semakin tinggi kalau lihat data ini. Berarti ada yang salah. Ini memang bukan Ibu Menteri Ketenagakerjaan saja, karena ini memang harus rapat lagi bersama dengan Menteri Pendidikan dan sebagainya. Karena ini tujuan kita bersama ini tujuannya satu, bagaimana supaya kita mengurangi beban negara dengan persoalan-persoalan yang ada. Jadi harus duduk lagi bersama.

Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman juga, bagaimana SMK mesin yang ada atau apa yang diberikan ke SMK itu sendiri sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi pelatihan yang diberikan ketika dia bekerja tidak sama lagi. Alat yang digunakan sudah jaman tempo dulu, sementara sekarang sudah *high technology*, yang akhirnya dia *bengong* juga di situ. Jadi mungkin ini perlu juga diperhatikan.

Memang saya senang tadi dibidang limbah pendidikan, Menteri Ketenagakerjaan yang mendapatkan ini semua yang akhirnya harus mencarikan solusi. Tapi saya punya harapan, Ibu Menteri, dengan BLK-BLK itu coba dihidupkan kembali, dilihat, di klaster setiap daerah kebutuhan atau minat dari daerah atau provinsi tersebut lebih ke mana.

Mungkin itu, Ibu Menteri, masukan dari saya. Karena kalau bicara masalah peningkatan, ada bantuan, belum tahu lagi dia punya regulasinya seperti apa, bisa tidak terjadi dengan 2 juta itu. Tidak tahu masalahnya yang tunggu di belakang ini seperti apa. Belum lagi itu Kementerian Tenaga Kerja punya urusan karena ada lagi di kementerian yang lain, ini tidak mudah. Karena kami sudah banyak sekali RDP dengan persoalan-persoalan yang saya bilang klasik, karena dari waktu ke waktu seperti itu. Kalau memang harus ada yang memang kita harus apresiasi ya apresiasi. Tapi ini jangan kita *lip service*, cuma bicara seakan-akan bicara di atas kertas, di media dan lain sebagainya tapi kenyataannya tidak sesuai harapan dan tidak sesuai apa yang di-*publish*.

Saya kira itu, Ibu Menteri, masukan dari kami. Jadi untuk balai-balai bisa diperhatikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Ibu Felly.

Berikutnya, Pak Ansory.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Salam sejahtera buat kita sekalian.*

Saya Ansory Siregar, Nomor Anggota 414, Dapil Sumatera Utara III, dari Fraksi PKS.

Hormat saya kepada Pimpinan dan Anggota semuanya,  
Juga kepada mitra, Ibu Ida Fauziah dan jajarannya semuanya,

Saya, sebenarnya sudah banyak Anggota yang menyebutkan tadi, saya mau mencari kata-kata, maksudnya kata-katanya ini yang pas, tajam. Cuma saya bingung ini biar tajam ini apa. Istilahnya kan banyak kita dengar kartu, Kartu Indonesia Sehat, itu Kemenkes teknisnya itu, baru dia yang *ngerjain*. Apalagi kita dengar KIP (Kartu Indonesia Pintar), Kemendikbud teknisnya itu. Baru dia menyerahkan ke kabupaten/kota/provinsi. Ada lagi kartu KKH (Kartu Keluarga Harapan), kan Mensos diserahkan kesitu. Ini saya mau bahas apa kalau KPK ini diserahkan ke Menko. Istilahnya KPK Kartu Pra Kerja kan, saya tidak tahu mau bahas apa ini ke pemerintah ini biar menyerahkan ke Kemenaker, bahas apa kira-kira dari kita semua. Tadi ada berapa kartu? Ada tiga kartu diserahkan ke ini. Ini ada kartu baru yang saya dengar tadi bukan ke menteri terkait.

Kemudian yang kedua, dulu kan pernah kita mendengar bencana, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, penanganan bencana itu amburadul. Pada wapres siapa yang salah, kita salahkan ini tidak, kita salahkan ini, siapa *leading sector*-nya tidak tahu kita, anggaran triliunan, uang 20 M, 30 M menguap begitu saja. Akhirnya dibuat satu badan namanya, saya ikut panja disitu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Akhirnya terurai semuanya masalah-masalah.

Pernah kita mungkin 10 tahun-20 tahun lalu juga masalah hukum kita. Sampai sekarang sebenarnya masih bermasalah. Tapi 12 tahun-20 tahun lalu jauh lebih bermasalah. Kepolisian bobrok, kejaksaan bobrok, pengadilan bobrok. Tidak tahu masyarakat itu mau apa. Akhirnya reformasi mengamanahkan untuk membuat salah satu badan namanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Mulai sedikit hukum itu.

Kemudian juga tenaga kerja dimana 10 tahun-20 tahun lalu juga yang terbunuh, yang disiksa, yang diperkosa, yang di seterika. Saya pernah beberap kali ke Jawa Barat itu, pernah kita buat surat ke Pak Nyoman siapa waktu itu, Menteri Tenaga Kerja yang pertama waktu sebelum Herman Suparno, tolong di sana ada yang matanya sudah buta, disetrika. Akhirnya

saya bawa tiga stasiun TV ke sana sendiri dengan lima wartawan. Baru besoknya di sini, "Maaf Pak Ansory", kata Pak Herman Suparno sama dirjenya. Akhirnya pada waktu itu istilahnya permasalahan TKI itu dengan adanya BNP2TKI sedikit ini, sehingga kita bisa menyalahkan ini. Sebelumnya kan tidak bisa kita, siapa *leading*-nya siapa ini. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kita menanganinya sama-sama.

Kemudian, kalau tadi kan ada bencana, ada hukum, kesehatan. Tenaga kerja ini jangan sampai kita ada masalah disini. Kita tangani dengan baik, dengan bagus.

Ibu Ida Fauziah, yang *ujug-ujug* itu biasanya bahaya. Bahayanya apa, kalau bahaya itu berarti banyak nanti masuk bui. Mungkin Pak Sekjen dan dirjen-dirjen lain kalau kita membahas program disini, satu program itu kita bahas, kita seminarkan, kita FGD kan, kita bahas berminggu-minggu, kita konsinyering, padahal program itu cuma 50 M, 100 M, kita bahas bagaimana penanganannya, bagaimana ini. Kita bahas dengan baik, bagus, sehingga jalannya pun baik, bagus.

Coba saya berikan contoh yang *ujug-ujug*. Ada tahun 2004 yang *sekonyong-konyong* stimulus fiskal 2009 pembangunan Indonesia tertinggal, masuk bui banyak disitu. Suap menyuap disana-sini. Kemudian setelah 2004, 2009-2014 ada istilah PPID. Jadi kalau dulu itu orang bilang itu kalau stimulus itu "ah, Mbak Stimulus masuk penjara", karena mulus-mulus saja, tidak ada pembahasan, tidak ada ini. Itu yang stimulus kan langsung 10 triliun, malah ditambah pemerintah waktu itu 2 triliun, jadi 12 triliun. Jadi ini yang biasanya yang belum bahas secara baik/bagus di sini.

Inipun kalau bisa sebenarnya untuk 2021 saja ini, kita bahas dulu setahun ini. Saya takut nanti kalau bermasalah nanti kartu pra kerja ini kita yang disalahkan. Tapi saya sudah *ngomong* di depan Ibu kalau nanti ada masalah, maka mohon nanti direkam semua ini kita. Pak Rahmad Handoyo, semua yang bilang tadi, direkam semuanya, dari Komisi IX dulu Anggota Komisi IX sudah pernah *ngomong* bahwa program ini harus hati-hati, sehingga kalau ada nanti tahun depan jangan sampai ada yang masuk. 10 triliun loh. Ada badan atau kementerian anggarannya cuma 500, ada yang masuk itu. Ini 10 T. Mudah-mudahan ada KPK di atas, biasanya ada KPK di atas yang dia kirim secara ini. Tolong kalau ada yang KPK di atas tolong ini dicatat, jangan sampai ada di sini penyimpangan. Kita sayang sama Ibu Ida Fauziah dengan jajarannya semuanya kita juga. Tapi karena hasil keputusan ini tolong sampaikan ke Pak Jokowi bahwa salah Kemenko itu, salah. Tadi sudah banyak yang bilang. Bahasa apa lagi yang mau dibilang oleh komisi ini. Apakah nanti 50 orang ini nanti bicara di paripurna atau bagaimana. Tapi yang jelas ini kalau bisa mungkin kalau mau diserahkan ke Menko, kita nanti tanya, kita akan rapat nanti maraton. Karena sekali lagi, memang program ini sangat bagus sekali untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kalau bisa nanti kita putuskan besar-besar di sini, pengelolaannya diserahkan kepada menteri terkait. Nanti kalau umpamanya keputusan kita tidak diterima, kita sudah putuskan di sini. Kalau bisa nanti di fax ke istana keputusan Komisi IX ini, biar di sana juga berpikir juga.

Itu mungkin sekedar untuk menguatkan teman-teman saja dari semua dari saya.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Ansory.

Nanti sebelum mungkin Ibu Menteri menyampaikan penjelasan nanti saya berharap nanti yang berproses dari awal di program ini, kan Ibu Menteri baru jadi menteri, yang Sekjen, Dirjen dan pihak terkait yang urusan pra kerja ini juga mungkin bisa menjelaskan kenapa sampai ceritanya seperti ini.

Yang Ibu Menteri sampaikan tadi kan cuma hasil Ratas 9 November 2019 tiba-tiba sudah keputusannya begini. Kan ini bukan *ujug-ujug* jadi begini. Jadi bagaimana proses yang juga terjadi sampai kemudian dalam Ratas itu tiba-tiba putusan seperti begini. Sekali lagi, ini juga bukan *ujug-ujug* juga. Kan pasti ada proses ini. Bapak/Ibu yang sebagai penghuni lama sebelum Ibu Menteri masuk ke sini pasti tahu. Apa semua sudah disampaikan kepada Ibu Menteri atau belum kita belum tahu. Tapi coba disampaikan apa adanya, jadi kita sendiri tahu duduk perkaranya di mana. Kalau memang ini masalahnya tadi itu di sektor tertentu ya kita segera kerjakan ke situ. Jangan sampai kita nembaknya di A masalahnya di B. Jadi tolong disampaikan apa adanya di sini, sehingga hasil Ratas 11 November menjadi seperti ini. Kita ini kan sudah dapat di hasil Ratasnya, tiba-tiba hasil Ratas sudah seperti yang dari tadi teman-teman semua persoalkan. Ini perlu disampaikan kepada kami apa adanya, sehingga kami pun juga harus merespon seperti apa, menjadi kesimpulan rapat hari ini juga jelas. Jadi tolong sampaikan apa adanya. Jadi jangan buat Ibu Menteri juga terbebani sendiri. Semua yang dari awal jajaran Kemenaker yang ikut dari awal, ketika Pak Jokowi *ngomong* kan semua sudah pasti mempersiapkan, kalau Pak Jokowi menang bagaimana mengimplementasikan gagasan dia tentang kartu pra kerja ini. Ini tolong disampaikan apa adanya, sehingga kita *clear* harus merespon dengan cara apa. Mungkin demikian.

Silakan, Ibu Menteri.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX yang saya hormati,

Saya mendengar dengan baik dan mencatatnya seluruh masukan yang Bapak/Ibu sampaikan. Ada 25 Bapak/Ibu Anggota dan termasuk Pimpinan yang menyampaikan catatannya. Kalau boleh saya menyimpulkan dari ke-25 Bapak/Ibu yang menyampaikan hampir semua memberikan dukungan program kartu pra kerja dengan berbagai catatan-catatan yang ada.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Sebelum saya menjawab satu persatu yang disampaikan oleh Bapak/Ibu, saya ingin menyampaikan dimana posisi Kementerian Ketenagakerjaan. Saya pernah sampaikan pada waktu rapat yang lalu, Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menjalankan visi dan misi presiden pada isu ketenagakerjaan. Dan saya sampaikan lagi bahwa



Bapak Presiden menyampaikan tidak ada lagi visi dan misi menteri, yang ada adalah seluruh pembantunya menjalankan visi dan misi presiden.

Kalau lihat dari visi dan misi presiden, maka visi presiden adalah terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian yang terkait dengan misi yang dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia,
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Yang ketujuh pada misi perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pada visi dan misi itulah kami bekerja.

Pada waktu yang lalu kami juga menyampaikan kepada Bapak/Ibu sebenarnya di mana posisi ketenagakerjaan menjalankan tersebut. Jadi kalau dilihat pekerjaannya Kemenaker pada posisi bagaimana angkatan kerja kita yang sejumlah 133 juta koma 56 juta, di situlah kita bergerak, dengan komposisi 126,51 juta yang bekerja, kemudian pengangguran kita yang 7 juta 50 ribu. Di sinilah Kementerian Ketenagakerjaan bekerja. Yang bekerja mereka harus dipastikan tetap bekerja dan mendapatkan perlindungan sosialnya. Kemudian yang menganggur mereka mendapatkan kesempatan kerja.

Kemudian kalau dilihat yang bekerja yang di sektor formal itu ada 56,02 juta, kemudian sektor informal 70 juta 49 ribu. Apa yang dilakukan dengan pekerja informal? Tentu saja ingin menggarisbawahi oleh Bapak/Ibu pada waktu itu, tidak juga kementerian ini mengalihkan yang mereka kerja di sektor informal dialihkan menjadi kerja formal, tidak juga seperti itu. Yang dibutuhkan adalah kalau mereka membutuhkan *skilling*, maka di sinilah tempatnya kementerian ini bekerja. Kemudian bagaimana kami harus memberikan perlindungan sosial kepada mereka. Jadi, Bapak/Ibu, saya ingin mengatakan di sinilah ranahnya pekerja.

Angkatan kerja kita saya pernah sampaikan bahwa 58 persen mereka adalah memiliki pendidikan rendah, SMP ke bawah. Dalam kondisi seperti ini maka bisa dibayangkan apakah mereka yang bekerja di sektor formal atau bekerja di sektor informal dengan tingkat kompetensi yang sangat rendah.

Mereka yang bekerja di sektor formal, mereka yang kerja di sektor informal dan mereka yang tidak bekerja atau penganggur, dalam kondisi mereka yang tidak memiliki kompetensi. Dalam kondisi seperti itu saya kira Bapak/Ibu seorang presiden pasti harus bisa menjawab bagaimana kebutuhan itu dilakukan dalam program-programnya.

Jadi konsentrasi Bapak Jokowi, presiden adalah pada pengembangan sumber daya manusia dengan kondisi mereka yang kompetensinya sangat rendah. Salah satu diantara cara mem-*push* bagaimana peningkatan kompetensi itu dilakukan adalah dengan cara membuat program kartu pra kerja. Apakah program peningkatan kompetensi itu tidak dilakukan oleh Kemenaker? Dilakukan.

Saya mau sampaikan, maaf ini saya sekaligus menjawab apa manfaatnya, saya kira kalau kita lihat sasaran makro pembangunan 2020-2024, maka TPT kita itu harus ditekan sampai 0 sampai 46 persen. Ini, Pak Saleh Daulay, apa tujuannya? Yang Bapak tanyakan itu manfaat program mendapatkan vokasi. Tapi sebenarnya *outcome*-nya/*output*-nya dalam menekan TPT dari 5,2 persen menjadi 4,4 sampai 46 persen. Kemudian tingkat kemiskinannya kita juga bisa tekan 6,5 sampai 7 persen, yang

sekarang ada di angka 9. Meskipun sudah tinggi dan turun, tapi Pak Presiden meminta agar tingkat kemiskinannya itu bisa ditekan sampai dengan 6,5 sampai 7 persen. Kemudian PDB perkapitanya juga harus naik menjadi 5.780 sampai 6.160. Kemudian secara otomatis kita bisa tingkatkan indeks pembangunan manusianya. Kita berharap tahun 2024 sampai 73,35 persen. Dan rasio gininya juga turun dari 0370 sampai 0374.

Kita bekerja pada wilayah ini, ini menjadi sasaran makro. Pak Jokowi menyampaikan berkali-kali, seluruh kementerian dan lembaga bekerja secara sungguh-sungguh yang *goal* dari seluruh pekerjaan itu adalah cipta lapangan kerja. Jadi kalau lihat dari sasaran makro yang dibuat ini, ini pekerjaan yang sangat serius dan tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Jadi butuh ada terobosan. Salah satu terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja kita diantaranya adalah melalui kartu pra kerja. Apakah hanya dengan melalui kartu pra kerja dan di mana letak Kementerian Ketenagakerjaan? Maka kalau kita lihat sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaannya adalah meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja yang sangat fleksibel. Ini menghadapi revolusi industri 4.0. Kemudian apa yang dilakukan? Yang pertama, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas.

**INTERUPSI F-PDIP (Dr. DEWI ARYANI, M.Si.):**

Interupsi, Pimpinan.

Ini materinya Ibu Menteri tidak ada di kita ya?

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Sudah saya sampaikan pada waktu rapat yang pertama.

**KETUA RAPAT:**

Kalau ini materinya yang kita sebelumnya sudah sampai.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Maaf Bu, saya mohon maaf, ini materi sebelumnya.

Saya menyampaikan agar menyambung apa sesungguhnya program kartu pra kerja dengan visi dan misinya Pak Jokowi dan Tupoksi Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi materi ini sudah saya sampaikan pada waktu Raker yang lalu.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja kompetensi tenaga kerja itu memang menjadi bagian dari tupoksinya Kementerian Ketenagakerjaan. Apakah hanya itu? Kartu pra kerja salah satu. Mengurus ketenagakerjaan harus dibangun ekosistemnya, yang setelah dilatih maka berikutnya adalah bagaimana menempatkan dan memberdayakan tenaga kerja kita. Setelah ditempatkan terjadilah hubungan industrial. Dan bagaimana jaminan sosialnya terpenuhi, maka program yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial.

Kemudian tidak cukup hanya di situ, perlu juga mereka ini diawasi agar perlindungan tenaga kerja dan pengembangannya bisa dilakukan dengan baik.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Jadi kalau dilihat dari sini, maka sesungguhnya program kartu pra kerja adalah bagian kecil dari Tupoksi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk membangun sistem yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya kami membuat satu sistem yang tidak hanya sekedar sistem informasi saja, tapi ingin membangun sistem layanan ketenagakerjaan. Maka kami membangun Sisnaker. Nanti mohon beberapa menit kami diberi waktu untuk menyampaikan itu. Pak Yasin, terima kasih sekali.

Sistem ini memang masih baru dan kami akan berusaha agar sistem inilah yang mengintegrasikan dan mempermudah seluruh *stakeholders* ketenagakerjaan bisa terhubung secara sistemik. Jadi terbangun antara pencari kerja dan pemberi kerja atau lapangan kerja. Kami berharap sistem ini basisnya masih *web*. Kami merencanakan dalam bulan April sudah bisa diakses melalui *gadget*, melalui android, sehingga semudah itu kita bisa mengetahui dan memastikan bahwa ekosistem ketenagakerjaan itu berjalan dengan baik.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Karena kartu pra kerja ini ini menjadi bagian dari sistem yang kita bangun, maka harapan kita memang sistem ini tidak terpisah dengan sistem yang dibangun oleh program kartu pra kerja. Di manapun tempatnya PMO itu diberikan oleh presiden mandatnya, maka sistem ini akan terus terkoneksi dengan program kartu pra kerja.

Pak, saya ini santri, saya ini biasa bekerja itu berdasarkan perintah yang memberi. Saya biasa *sami'na wa atho'na*. Jadi kalau misalnya presiden menganggap bahwa karena ini terkait dengan mengkoordinasikan kementerian atau lembaga, maka mungkin Menko menjadi pilihannya.

Jadi saya mendengar dengan baik pandangan Bapak/Ibu. Tapi izinkan saya, biarlah kami bekerja dengan perintah yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kalau Bapak/Ibu ingin menyampaikan mungkin tidak lewat saya, Pak Ketua. Bapak/Ibu punya jalan dan jalur sendiri untuk menyampaikan itu kepada Bapak Presiden.

**INTERUPSI F-PDIP (Dr. DEWI ARYANI, M.Si.):**

Interupsi, Pimpinan. Sedikit saja.  
Maaf Ibu, saya potong.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Ibu Dewi.

**F-PDIP (Dr. DEWI ARYANI, M.Si.):**

Terima kasih.

Saya mencoba menyikapi langsung yang soal sistem tadi. Dari tadi kan saya ingatkan bahwa kartu pra kerja ini untuk mereka-mereka yang lulus sekolah, putus sekolah dan miskin. Sekarang sistemnya kalau harus daftar pakai android apa iya mereka semua punya android? Saya tidak yakin. Jangan-jangan nanti yang bisa mengakses hanya orang-orang yang ada di kota besar saja. Bagaimana dengan wilayah-wilayah lain?

Kalaupun di wilayah lain punya android belum tentu mereka ada 4G, belum tentu mereka ada sinyal. *Blank spot* di negara kita ini masih dimana-mana, karena kita negara kepulauan. Satelit kita belum bisa menjangkau semua daerah, karena tidak semua daerah ada BTS-nya. Jadi harus dipertimbangkan juga. Jangan sampai nanti penyerapannya hanya di kota-kota besar, hanya orang-orang pengangguran yang umurnya sebetulnya bukan pra kerja. Yang pra kerja ini kan belum tentu punya HP android.

Demikian masukan dari saya.

**MENTERI TENAGA KERJA RI (IDA FAUZIAH):**

Saya mau jawab dulu. Saya belum menyelesaikan tentang kartu pra kerja. Hanya beberapa pertanyaan. Saya baru menyambungkan antara visi presiden dengan tugas Kemenaker dan program kartu pra kerja.

**KETUA RAPAT:**

Nanti biar Ibu Menteri kasih penjelasan dulu, baru nanti kita tanggapi setelah selesai.

Silakan, Ibu.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Jadi tidak ada interupsi? Tidak?

**KETUA RAPAT:**

Pokoknya kalau ada yang penting *banget* pastinya ada yang *nyambung*.

**INTERUPSI F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H.):**

Interupsi. Justru berkaitan, nanti sudah kelewat.

Melalui Pimpinan, terima kasih.

Terima kasih, Pimpinan.

Ibu Menteri, sebelum lebih lanjut, tadi secara jelas Ibu mengatakan karena kartu pra kerja ini tentunya akan meliputi lintas sektoral, lintas kementerian. Itu saya yakinkan memang seperti itu, jadi ada banyak kementerian yang akan terlibat, baik mungkin mereka yang memiliki sarana-sarana vokasi maupun program-program tertentu supaya tidak terjadi duplikasi anggaran. Memang harus ada menteri yang mengkoordinasikan.

Hanya yang ingin saya minta melalui Ibu Menteri untuk juga dalam kesempatan ini, karena Ibu adalah mitra dari Komisi IX. Pertanyaan kami, kalau ini program memang atas perintah presiden dijalankan oleh Menko, maka siapa yang mengawasi dan mengontrol di DPR ini. Apakah Ibu setiap

saat *on be half of Menko*? Sejalan dengan tadi, karena sistemnya ada di Ibu, kartunya dan biayanya ada di Menko, ini apakah dimana? Karena Menko itu tentu tidak merupakan mitra dari keseluruhan komisi-komisi. Apakah dari sisi keuangannya di Komisi XI, apakah nanti di Badan Anggaran yang tentunya baru rapat berdasarkan siklus?

Paling tidak yang ingin diketahui, ini kan menggunakan anggaran negara, kita berbicara mengenai sektor tenaga kerja, pasti ada irisan dengan kementerian Ibu. Yang ingin kami tanyakan, katakanlah 10 triliun itu kan besar sekali, tapi yang langsung memang dipegang oleh Ibu? Mungkin kalau yang lintas kementerian lain tidak, berapa nantinya? Sehingga kita bisa melakukan pengawasan. Sebab kalau tidak, Ibu menerangkan hanya sekedar menerangkan. Kita mau bertanya ataupun kita mau memberikan keberatan ataupun pengawasan tentunya tidak *nyambung*.

Jadi kita sebetulnya ingin membantu Ibu juga. Dan sama-sama, karena kita ini di Komisi IX punya marwah. Sepanjang menyangkut tenaga kerja sekecil apapun, jangankan bicara 10 triliun, mungkin 1 miliar pun kita akan pertanyakan. Saya ambil contoh, beberapa waktu yang lalu ketika itu Pak Anies Baswedan masih Menteri Diknas, ingin mengadakan pelatihan-pelatihan. Saya langsung potong ketika di Badan Anggaran. Karena saya katakan, pelatihan untuk orang yang tidak bersekolah lagi bukan Tupoksi Diknas, itu adalah Tupoksi daripada Kemenaker. Jadi tidak boleh ada duplikasi anggaran.

Dengan situasi yang sama, kami percaya maksud daripada dialihkan kepada Kemenko mengingat 10 triliun. Anggaran Ibu saja 7 triliun, pasti tidak akan mampu. Tapi maksud kami, dalam irisan berkaitan dengan ketenagakerjaan yang di bawah Ibu harus ada rambu yang jelas yang mana yang dalam *scoop* Ibu dan itulah yang bisa kita bantu mengawasi ataupun mungkin ingin kita perjuangkan juga. Tentunya jangan dilihat bahwa kita di sini katakanlah memberikan kesulitan kepada Ibu. Justru nanti hasil keputusan rapat bisa Ibu pakai sebagai bahan untuk rapat dengan presiden yang akan membantu untuk sama-sama menegakkan marwah daripada kementerian yang Ibu pimpin yang juga adalah mitra kami. Jadi itu sebetulnya yang supaya jelas. Karena kalau tidak, kita rapat berjam-jam ini apalah gunanya sekedar kita tahu, Ibu sekedar menyampaikan. Tapi kita ini terhubung tapi tidak *ringing*, cuma bunyi tapi tidak terkoneksi. Karena seperti Ibu katakan tadi, Ibu tidak ada kewenangan dan tentunya jadi menyulitkan kita.

Itu kira-kira, Pimpinan, supaya kita juga dalam hasil keputusan rapat nanti memberikan *support* dalam keputusan, sehingga mencari kejelasan agar jangan yang namanya kartu pra kerja atau apapun namanya nanti sepanjang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ini adalah tahun SDM, maka sudah wajar dan kewajibanlah bagi Komisi IX untuk menegakkan marwahnya. Dan sampai sejauh mana? Tentu kita tidak bicara 10 triliun itu. Apapun irisannya, yang mana yang bisa kita awasi, supaya jelas dan tidak kita rapat pada *grey area*.

Mungkin itu, Pimpinan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Silakan, Ibu Kur.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Izin menambahkan, Pimpinan. Menyambung dari Ibu Dewi tadi.

Kami sangat memahami apa yang dirasakan oleh Ibu Menteri, suasana batin seperti apa kami juga sangat mengerti. Tetapi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Dewi dan semua teman-teman di Komisi IX ini bahwa hal yang terkait dengan ketenagakerjaan dan tadi juga Ibu Menteri sudah sampaikan menjalankan tiga misi dari ketenagakerjaan itu *leading sector*-nya adalah Kementerian Tenaga Kerja.

Pimpinan dan sahabat Komisi IX yang saya sayangi,

Di Perpres 8 Tahun 2015 tentang Kemenko jelas fungsi Kemenko itu apa: Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Justru nanti kalau implementasi dari kartu pra kerja ini ada *missed*, Kemenko bisa melakukan pengawasannya, tegurannya, pengendaliannya. Jadi saya agak merasa apa tidak *missed leading* kalau kemudian yang mengerjakan itu justru Kemenko, karena fungsi Kemenko itu sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, pengendalian, semua kementerian yang terkait di bawah Kemenko. Artinya ini menjadi pertanyaan besar, Pimpinan. Penjelasan berikutnya dari masukan dan pertanyaan dari teman-teman terkait kartu pra kerja rasanya jadi *useless* kalau diteruskan diskusinya. Maksudnya, samakan dulu persepsi dari Ibu Menteri dan para jajarannya, ini sepakat tidak dengan pandangan kita di Komisi IX bahwa ini sebenarnya *leading sector*-nya adanya di Kemenaker, sehingga kita bisa bantu *endorse* dan *support* supaya ini menjadi kewenangan juga dari Kemenaker untuk implementasi pelaksanaannya, bahkan mengatur sistemnya dari hulu ke hilirnya, sehingga semuanya bisa di-*support* dari Komisi IX.

Kalau bicara tentang adanya irisan dengan kementerian yang lain saya kira tidak hanya kartu pra kerja. KIS juga sama, KIP juga sama. BPJS dalam penentuan PBI tidak bisa. Sudah melakukan data *cleansing* ini kemarin kita capek-capek bahas tidak bisa disahkan di sini. Harus maju di rapat tingkat menteri, baru itu data *cleansing* hasilnya itu bisa disahkan. Semua program pasti akan melibatkan lintas kementerian. Justru kita, tadi seperti disampaikan oleh Ibu Dewi dan teman-teman yang lain, kita ingin ini kembali kepada *leading sector* yang sesungguhnya.

Terima kasih Pimpinan.

**INTERUPSI F-PP (SY. ANAS THAHIR):**

Tambah, Pimpinan. Anas Thahir.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Anas.

**F-PP (SY. ANAS THAHIR):**

Terima kasih.

Saya bisa maklum kalau sebagai santri Ibu Menteri tentu terbiasa dengan melaksanakan perintah, *sama'an wa tho'atan*, dan kita akan memberikan beban terlalu berat untuk membantah kepada presiden.

Cuma barangkali perlu ada mekanisme baru yang kita usulkan, Pak Pimpinan, bagaimana Komisi IX mengusulkan kepada Pimpinan DPR agar berkirim surat kepada presiden supaya wewenang kartu pra kerja ini dari Menko dilimpahkan kepada Menteri Tenaga Kerja tanpa membebani Ibu Menteri.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi sebenarnya tadi kan kami berharap Ibu Menteri menyampaikan apa adanya. Sekali lagi, teman-teman tadi kan banyak sekali memberikan catatan, tapi rasanya Ibu Menteri belum menceritakan apa adanya soal kenapa sampai keputusan Ratas tanggal 11 November itu. Karena jangan sampai kan kita ini maunya di A, pemerintah putusan di B, tidak ketemu kita ini. Kita mau desak apapun juga, pemerintah maunya B. Antara DPR ini maunya A, pemerintah maunya B, kita tidak ketemu, karena masing-masing punya otoritas sendiri-sendiri ini.

Kalau boleh, Ibu Menteri, kan puncaknya ini kan hasil Ratas tanggal 11. Coba kami diceritakan, sehingga kita tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan atau membantu soal ini. Karena mungkin kita ini rapat terbuka, jadi mungkin Ibu Menteri cerita apa adanya.

#### **INTERUPSI F-PDIP (MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.):**

Interupsi, Pimpinan.

Saya juga merasakan suasana batin teman-teman Komisi IX ini. Saya ingin menambahkan, kalau tadi Ibu Menteri mengatakan *sami'na wa atho'na* dengan presiden, saya harus mengatakan *qullil haqqa walau kaana murrn*. Tapi Ibu Menteri ini kan sudah berperiode-periode di DPR RI, jadi saya kira tahu persis kedudukan fungsi dan posisi. Jadi kalau hanya menyampaikan kepada presiden terkait suara dari Komisi IX pasti akan didengar. Suara rakyat saja didengar, apalagi suara wakil rakyat.

Terima kasih.

#### **INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Interupsi, Pimpinan.

Saleh Daulay, A-480.

Jadi begini, Ibu Menteri, supaya agak mengarah sedikit ini saya tanya dulu, uangnya ini sekarang di kementerian mana yang pra kerja ini? Sebentar Ibu, maksud saya begini, nanti ada kaitannya dengan semua yang bertanya tadi. Kalau uangnya itu mungkin sekarang sudah ada di Menko, tiba-tiba dipindahkan ke sini, berarti kan agak repot itu. Atau mungkin kalau dia Kementerian Keuangan mitranya kan bukan kita. Makanya ini penting diluruskan dulu supaya nanti mengarah. Oleh karena itu kita buat formulasi pengawasan yang bisa dilakukan oleh Komisi IX.

Sama dengan BPJS. BPJS Kesehatan itu kan uangnya bukan di sini, tapi di Komisi XI. Kita hanya yang regulernya saja itu, 26 triliun. Kalau ada tambahan untuk defisit itu tidak dibicarakan di sini malah justru, catatannya Komisi XI.

Jadi tolong diperjelas dulu itu supaya duduk perkaranya jelas ini. Yang mengangggarkanlah yang berhak untuk mengawasinya. Komisi IX ini kalau tidak salah kemarin itu tidak ikut mengangggarkan ini. Tiba-tiba muncul ini pra kerja.

Jadi saya minta penjelasan itu dulu, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Mungkin bisa langsung Ibu Menteri bisa menyampaikan yang untuk khusus punya Pak Saleh dulu.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX yang saya hormati,

Tidak ada yang saya tutup-tutupi dari penjelasan saya. Jadi itulah adanya. Dan saya kira Bapak/Ibu punya mekanisme sendiri untuk menindaklanjuti apa yang diputuskan di Komisi IX ini. Seperti yang disarankan oleh Pak Anas Thahir misalnya, saya kira itu kewenangan ada di Bapak/Ibu dan Bapak/Ibu tahu cara bagaimana menyampaikan hasil Komisi IX ini.

Saya langsung jawab pertanyaan Pak Saleh Daulay. Uang itu ada di Kementerian Keuangan Pak, masih di BA BUN, masih ada di Kementerian Keuangan. Yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan itu adalah 50 miliar untuk PMO-nya. Kalau misalnya keputusan akhir Perpresnya mengatakan bahwa PMO ada di Kemenko, maka uang ini tentu akan dialihkan ke Kemenko.

Posisi sekarang uang 50 miliar itu ada di Kementerian Ketenagakerjaan, karena mungkin desain awalnya memang program ini, meskipun dikelola PMO tetap di bawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Menteri Ketenagakerjaan. Jadi memang sejak awal desainnya memang, mohon maaf karena mungkin Bapak/Ibu Komisi IX yang juga lebih tahu, desain awalnya memang didesain menjadi bagian dari Tupoksinya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi uang 50 miliar untuk PMO, termasuk tadi untuk misalnya untuk kebutuhan, meskipun sudah masuk.

Cetak kartu itu tidak secara fisik. Jadi jangan khawatir, dompetnya tidak akan penuh, karena bentuknya bukan fisik, tapi berbentuk kartu *digital*.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Kan ada yang reguler kartunya.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Ada yang reguler.



**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Berarti kan ada cetakan juga.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Tidak seperti yang dibayangkan akan mencetak 2 juta kartu. Jadi kira-kira begitu, uangnya tidak ada, yang 10 triliun tidak ada di Kemenaker. Tapi untuk PMO-nya ada di Kemenaker.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Izin, Pimpinan. Saya ada menarik ini.

Jadi kalau ada di dana BUN berarti itu kan Bendahara Umum Negara. Artinya itu sebetulnya kemarin itu belum dianggarkan secara khusus di kementerian mana, makanya disimpannya di BUN.

Karena dia belum dianggarkan, ini supaya jelas teman-teman, karena belum dianggarkan ditaruh di mana sajakapun, misalnya kementerian yang terkait belum jelas, maka masih ada peluang bagi Komisi IX itu mendesak pemerintah untuk memindahkannya ke Kementerian Tenaga Kerja. Jadi itu yang mesti harus kita pelajari supaya nanti tidak salah *state*. Misalnya ketika kita *ngomong* begini malah *diketawain* orang pula di luar sana. Ini kan tidak begitu. Ternyata penjelasan Ibu Menteri itu karena ada di dana BUN.

Sama dengan dana bencana, Bapak/Ibu, dulu Komisi VIII. Dana bencana di Komisi VIII itu tidak pernah dibicarakan misalnya dia harus dapat sekian. Tapi dia ada *buffer*-nya, *buffer*-nya itu diperkirakan mungkin nanti dapat 8 triliun misalnya. Setiap tahun seperti itu. Tapi bukan berarti yang 8 triliun itu harus dihabiskan. Itu yang kalau ada bencana/*emergency* saja baru dipakai. Sama dengan ini, sudah dibuat batas atasnya, berarti paling banyak 10 triliun, kurang lebih begitu. Target sarasannya 2 juga peserta, tapi batas atas uang yang akan dipakai yang disiapkan oleh pemerintah di dana BUN itu adalah 10 triliun. Betul ya, Pak Dirjen? Jadi kurang lebih begitu, jadi masih bisa kita alihkan, kita dorong pemerintah untuk pelaksanaan program ini diawasi langsung oleh Komisi IX. Nanti kalau tidak ya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja juga repot nanti ditaruh di mana lagi.

Jadi saya kira itu, teman-teman.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Silakan Ibu Menteri melanjutkan sekaligus dengan yang lain.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Berikutnya saya ingin merangkum beberapa catatan yang diberikan oleh Bapak/Ibu. Izinkan saya merangkum, tidak menjawab satu persatu, karena hampir sama mempertanyakan program kartu pra kerja.

Yang pertama, kartu pra kerja ini diharapkan akan mampu menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi berorientasi kepada manfaat. Manfaatnya itu pada penempatan, apakah di pasar kerja atau wirausaha. Jadi yang dibutuhkan terlebih dahulu, yang sekarang dilakukan adalah *assessment demand*-nya dulu.

Kita benar-benar berharap, janganakan pelatihan, punya sertifikat saja itu sekarang banyak juga yang tidak ada gunanya. Maka kita ingin mereka yang mendapatkan pelatihan vokasi itu *output*-nya adalah penempatan. Apakah penempatan di pasar kerja atau berwirausaha.

Rapat terakhir yang kami ikuti yang dilakukan/dikoordinasikan oleh Bapak Wakil Presiden, ini semua kementerian dan lembaga bersinergi dalam konteks cipta lapangan kerja. Kalau konteksnya misalnya adalah penciptaan wirausaha, melahirkan pekerja-pekerja pada sektor informal, apakah mikro/kecil, UMKM, maka diharapkan semua berkontribusi untuk mendukungnya.

Salah satu kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan adalah menyiapkan kompetensinya. Jadi setelah dilatih, apakah menggunakan skema kartu pra kerja, kalau mereka tidak diterima di pasar kerja maka mereka juga harus mendapatkan kesempatan dengan mendapatkan KUR. Ini juga sudah disepakati dalam Ratas. KUR itu yang bunganya dari 7 persen diturunkan menjadi 6 persen. Kemudian plafonnya dari 25 juta dinaikkan menjadi 50 juta. Harapannya apa? Pelaku UMKM kita rata-rata mereka yang tidak memiliki *skill* pengelolaan kewirausahaannya. Jadi harapan kita diantaranya program kartu pra kerja ini mereka juga langsung disambut.

Kalau mereka mau berusaha, maka diberikan modal usahanya. Kalau mereka pilihannya itu misalnya harus bekerja di luar negeri, kan banyak kesempatan kerja yang ditawarkan kepada kita, misalnya peluang dari Jepang dan beberapa negara yang lain, mereka juga diberi kesempatan untuk menggunakan dana KUR tersebut.

Jadi saya sependapat dengan Bapak/Ibu semua, menyiapkan *demand*-nya terlebih dahulu. Nanti akan saya sambungkan bagaimana *demand* itu dipertemukan sistem. Nanti saya minta dijelaskan ketemunya *demand* dimana dan kenapa ada banyak yang tidak *nyambung* antara beberapa, ini akan kami jelaskan.

Kemudian yang kedua, pelaksanaan program pelatihan melibatkan lembaga pelatihan pemerintah (LPKS) dan lembaga pelatihan industri. Jadi kalau Bapak Presiden malah dahulukan yang perusahaan swasta yang sudah memiliki balai latihan (LPK), baru kemudian lembaga-lembaga pelatihan pemerintah.

Kemudian sasaran peserta ditentukan pada mereka yang pencari kerja, selain juga pekerja yang ter-PHK, lebih pada dua itu. Untuk mereka yang sudah bekerja tapi membutuhkan peningkatan *skill*, maka memang ada ruang itu. Tapi memang lebih diprioritaskan mereka pencari kerja dan mereka para pekerja atau buruh yang terdampak PHK. Kalau ini yang terjadi, mereka yang ter-PHK kan tidak bekerja. Kalau mereka yang pencari kerja kan berarti mereka menjadi tidak bekerja. Jadi definisi itu menjadi masuk kalau ada dari Bapak/Ibu yang menanyakan definisinya 'kartu pra kerja', padahal mereka bekerja tapi ter-PHK. Kalau dia ter-PHK kan berarti tidak kerja. Sebenarnya ini pilihan-pilihan dan program kartu pra kerja ini.

Tadi Pak Yasin menyampaikan memang program kartu pra kerja ini bukan program baru bahwa negara ini yang menerapkannya. Bahkan

mungkin yang paling dekat Singapura, itu juga menerapkan. Bahkan itu diberikan kepada seluruh warga. Soal dipakai atau tidak, tapi masyarakat warga negara Singapura memiliki hak untuk mendapatkan kompetensi melalui pelatihan vokasi. Saya ini sependapat kalau Bapak/Ibu ingin mengetahui banyak program-program kartu pra kerja di negara lain.

Kemudian sasaran peserta diutamakan pencari kerja, sudah saya sampaikan tadi. Program pelatihannya mengacu pada pasar kerja. Pada Ratas yang terakhir semua menteri terkait diharapkan sudah menyiapkan prospek lapangan pekerjaan.

Kemudian distribusi kuota berdasarkan jumlah pencari kerja tiap wilayah. Tadi saya mengatakan kita sudah punya *mapping profiling* dari para pencari kerja. Kita juga akan punya *profiling* dari mereka yang terdampak PHK. Dari situlah kemudian kuota itu diberikan. Soal siapa yang cepat, siapa yang akan dapat pelayanan, itu setelah kuota itu terpenuhi. Saya sependapat dengan Bapak/Ibu, kita mesti sangat hati-hati, karena tidak sedikit yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Defiasi setiap program pasti ada dan kita berharap bisa kita tekan, sehingga program ini bisa tepat sasaran.

Kemudian, lembaga pelatihan di seleksi untuk menjamin kualitas lulusan. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ini melatih warga negara untuk menjadi kompeten, maka harus dilakukan oleh lembaga yang kompeten juga. Mereka harus pertama teregistrasi dulu, kemudian yang kedua terakreditasi, baru boleh mendapatkan peluang melakukan pelatihan vokasi ini. Jadi mohon maaf, tidak ada ruang bagi LPK yang abal-abal. Jadi prosesnya register dulu, baru kemudian terakreditasi.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya minta waktu sebentar untuk menjelaskan tentang Sisnaker. Tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis. Program ini tidak hanya dilakukan secara *online*, tapi juga membuka ruang bagi warga negara yang tidak memiliki akses internet. Memang kalau rencananya 2020 Palapa Ring tersambung, dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang *blank spot*, semua bisa mengakses internet. Harapannya begitu. Meskipun begitu kita menyadari bahwa kenyataannya tidak seperti yang direncanakan, masih banyak daerah-daerah tertentu yang tidak terakses internet. Maka ruang untuk mereka ini diberikan 500 ribu untuk yang mendaftar melalui *offline*. Jadi tidak semuanya dilakukan secara *online*.

Banyak pertanyaan teknis, apakah mereka mendapatkan insentif selama 3 bulan? Tidak, Bapak/Ibu. Insentif itu diberikan sekali 500 ribu, sekali saja 500 ribu. Maaf, setelah mengikuti latihan ada insentif untuk biaya transportasi mencari kesempatan kerja. Meskipun ruang itu sebenarnya ingin dibangun melalui sistem, tapi kita mesti jugaantisipasi tidak semua sistem itu bisa diakses, maka ada insentif bagi mereka sebesar 500 ribu. Sekali saja diberikan setelah kartu pra kerja. Jadi tidak benar juga kalau ini kasih *duit* buat penganggur, tidak juga Pak. Dilatih dulu, kemudian ada insentifnya.

**F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M):**

Bukan selama belum kerja, selama belum kerja dikasih uang?

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Tidak, Pak.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Tidak, tadi Pak Saleh bilang per 3 bulan, berarti tidak benar 3 bulan dikasihkan?

Terima kasih.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Yang 500 ribu cuma sekali?

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Sekali, Pak.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Bukannya 3 bulan, sambil menunggu masa kerja dia dapat kerja 3 bulan, masa menunggu kerjanya 3 bulan?

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Ini sementara kita membicarakan di K/L diberikan 500 setelah mendapatkan pelatihan.

**KETUA RAPAT:**

Ini konsep tentang program pra kerja ini sebenarnya sudah *finish* belum di pemerintah?

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Kan dari awal saya menyampaikan, ini proses sedang dilakukan pembicaraan antar kementerian dan lembaga. Jadi *feeding* dari pembicaraan antar kementerian/lembaga harus kami katakan bahwa *feeding*-nya adalah dari Kemenaker, karena selama ini Kemenaker yang mengawal program itu ketika digagas sampai hari ini.

Semua yang saya sampaikan tadi di awal itu adalah hasil pembicaraan antar KL, paling terakhir dua hari yang lalu. Jadi sejak awal dari pertama saya menyampaikan, karena saya ingin menghormati Komisi IX yang meminta kami untuk menjelaskan program kartu pra kerja, maka posisi kami menjelaskan apa yang menjadi bagian yang dilakukan oleh Kemenaker yang prosesnya sudah saya sampaikan di depan. Selanjutnya tahapan-tahapan itu tentu saja menunggu payung hukum terkait dengan program ini.

Banyak Bapak/Ibu yang menyampaikan, misalnya *roadmap*-nya seperti apa. Kalau kami sudah menyiapkan *roadmap*-nya, tapi ini kan *roadmap* ketika

kami menjadi *leading sector* program ini. Berikutnya saya merasa tidak memiliki kompetensi untuk menyampaikan *roadmap* itu.

**KETUA RAPAT:**

Bapak/Ibu Anggota DPR yang terhormat,  
Ibu Menteri dan jajarannya,

Sekali lagi yang kita bahas dari tadi ini kan ternyata baru rencana. Baru rencana ini kan bisa berubah, bisa juga tetap dan masih dibahas juga di kementerian. Daripada kita membahas rencana-rencana ini, saya kira kita bicarakan saja sekarang kesimpulan. Karena kalau kita bicara semua ini, inikan rencana semua ini.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Makanya, Pimpinan, tadi saya katakan kan. Artinya..., karena dari awal posisi juga masih belum jelas, pembahasan berikutnya nanti saja.

**KETUA RAPAT:**

Jadi saya kira, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap semua pertanyaan yang mungkin belum selesai dijawab dan juga menghormati bahwa Ibu Menteri ini saya lihat kesulitan menjawab, karena yang kita minta itu memang sudah lagi dibahas, belum diputuskan ataupun mungkin belum dibahas sama sekali.

Jadi menurut saya begini, semua kita punya maksud baik ini ditampung. Ibu Menteri dan kita ini juga nanti sama-sama melakukan pengendalian, berbagai cara kita coba memahami situasi ini.

**INTERUPSI F-PDIP (I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.):**

Pimpinan, interupsi.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, kan saya masih bicara. Sebentar dulu, Pak Ketut.

Sehingga daripada nanti ini Ibu Menteri juga kesulitan menjawab, bahkan kita sudah kasih kekuasaan pun Ibu Menteri, "Jangan saya *deh*." Kan ini kita masih memahami situasi di pemerintahan. Kan ini kita mau kasih beban besar Ibu Menteri, lalu Ibu Menteri juga ada situasi juga yang itu berbeda, bukan sama dengan kita. Kita juga musti menyerahkan kepada beliau juga dan kita juga sama-sama mencari cara, sehingga maksud baik kita ini bisa berjalan. Kan kita punya maksud baik agar urusan ini masuk di kita punya komisi. Ini masih perencanaan, lagi dibahas, belum selesai, belum diputuskan.

Jadi untuk Bapak/Ibu semua para Anggota DPR yang terhormat saya usulkan, daripada juga kita bahas terus menerus juga ini Ibu Menteri bilang belum pasti juga, saya berharap agar kita mungkin membahas yang non pra kerja saja diselesaikan oleh Ibu Menteri. Urusan pra kerja nanti kita mungkin agendakan lagi di waktu tertentu. Kita rumuskan kesimpulannya khusus pra

kerja. Kalau yang lain saya kira bisa mungkin Ibu Menteri menanggapi di luar urusan pra kerja.

**F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):**

Pimpinan, izin.

Jadi ini bukan masalah rencana. Ini sudah diputuskan, dalam Ratas sudah diputuskan. Bahwa kita ini tidak mengadendakan ya kita harus mengambil kesimpulan hari ini terkait dengan pra kerja ini mau dibagaimanakan. Karena ini pra kerja sudah diputuskan di dalam Ratas bahwa 11 November 2019 sudah berjalan. Sudah tinggal kerjaan. Kita sebagai tugas fungsi dan pokok sebagai pengawasan kita jangan sampai *melenceng*, tidak boleh menunggu. Program rencana ke depan saja kita rencanakan, apalagi yang sudah di depan mata menjadi program *idol* unggulan. Harus diputuskan hari ini. Panjang lebar seluruh hari ini kita hanya bicara tentang program pra kerja, harus diputuskan hari ini sikap Komisi IX itu mau seperti apa. Tidak bisa tidak, kita tidak bisa menunggu. Itu bukan wacana, itu sudah program unggulan, dunia kerja. Jadi harus diputuskan sekarang ini, tidak bisa tidak, harus, program sekarang harus diputuskan. Terlepas itu menteri terkait siap/tidak siap, itu urusan mereka. Ini tugas negara, dalam hal ini konstitusi sebagai parlemen pokok fungsi kita sebagai Komisi IX ini membidangi ketenagakerjaan mau siap/tidak siap anda harus bekerja. Tidak boleh dikembalikan kepada pemerintah. Siap/tidak siap kerja dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja harus bekerja, harus siap. Dan saya kira kementerian juga tidak mengatakan tidak siap. Saya harus putuskan sekarang, ini harus mengambil keputusan politik sekarang.

Begitu, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Jadi begini, yang saya mau coba hentikan adalah diskusi soal menyangkut program kartu pra kerja ini janganlah kita diskusikan. Kita mau bicara kesimpulan.

Yang saya minta kepada Ibu Menteri adalah Ibu Menteri mencoba menjawab di luar kartu pra kerja yang masih belum selesai. Nanti soal program kartu pra kerja kita akan putuskan di kesimpulan.

Sepakat ya? Ini memang belum kesimpulan. Kita berikan kesempatan Ibu Menteri menyelesaikan semua yang masih tersisa di luar soal menyangkut program kartu pra kerja. Soal program kartu pra kerja kita putuskan di kesimpulan.

Silakan, Pak Ketut.

**F-PDIP (I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.):**

Pertama adalah kalau tidak ada Raker seperti ini kita tidak tahu masalahnya. Apalagi ini kan sudah dianggarkan 10 triliun. Makanya kita merasa bersyukur bahwa ini ada Raker dan anggaran itu ada di Kemenkeu. Berarti anggaran itu belum diposkan di Kemenko, belum, ini kan baru di Menteri Keuangan, sehingga kesimpulan sekarang bagaimana sekarang agar

program pra kerja ini masuk di *leading sector*. Karena secara teknis ini kan semua nanti diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja dari persiapan sampai pelaksanaan. Nanti kesimpulannya itu agar bagaimana kita Komisi IX dengan segala cara agar apa yang dianggarkan itu masuk di Kementerian Tenaga Kerja. Pertama adalah masalah pengawasan, kemudian masalah distribusi, persiapan dan sebagainya. Kita makanya jangan..., terima kasih Ibu Menteri, kan seperti ini informasinya cukup banyak sekali. Kan seperti itu, walaupun kita tahu. Karena ini programnya baru, tentu belum maksimal.

Terima kasih.

**F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Saya sedikit tambah, Ketua.

Jadi apa yang disampaikan teman-teman tadi betul, ini kita Raker dengan Menteri Tenaga Kerja, ini baru pra kerja, program kartu pra kerja. Justru Ibu Menteri tadi sudah mengerti, sudah 86 *lah* bahasa Inggrisnya. Kalau baru rencana, nanti kalau Ibu Menteri rapat gabungan sama Menteri Koordinator ya *ngomong* mintanya Komisi IX itu kalau ada program pra kerja, itu kan memang tugasnya Menteri Tenaga Kerja, itu yang mengerjakan tenaga kerja dan rakyat se-Indonesia. Ini se-Indonesia ini Komisi IX. Itu arahnya, walaupun baru rencana. Rencana pun harus kerja menteri. Karena Presiden Jokowi pun sudah janji ke masyarakat mau menjadi pra kerja. Pra kerja ini tugas dan tanggung jawabnya Menteri Tenaga Kerja dengan teman-teman Komisi IX. Kalau sudah mengerti tadi teman-teman seperti itu ya silakan nanti kalau rapat seperti itu arahnya, tidak boleh dikerjakan menteri lain. Untuk kartu pra kerja yang mengerjakan ya Menteri Tenaga Kerja, artinya bekerja dengan Komisi IX.

Itu saja, Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Ibu Netty.

**F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

Jadi saya menegaskan saja, bahwa karena memang kebijakan kartu pra kerja ini tadi saya sebutkan sebagai kebijakan inklusif yang berdampak pada kelompok masyarakat yang terkena dampak atau yang tidak bisa keluar dari kompetisi/tidak menjadi pemenang dari kompetisi itu, sehingga bagi saya justru pembicaraan atau pertanyaan-pertanyaan yang lain itu semuanya terkait dengan pra kerja. Dan yang menjadi penting buat rapat ini adalah bagaimana caranya dengan kewenangan yang ada Pimpinan di Komisi IX ini bagaimana kemudian kita menahan kebijakan ini tidak lahir secara prematur dan kemudian salah menempatkan pada *leading sector* seperti itu. Tadi kan sudah disebutkan tadi Perpres atau apa tadi itu bahwa Tupoksi Kemenko hanya sebagai koordinasi, bukan melaksanakan secara teknis seperti itu, sehingga kita berharap, tadi di awal saya katakan Ibu Menteri bahwa jangan sampai ini *political viability*-nya ini yang kemudian justru jadi berat. Karena sebuah kebijakan itu kan perlu dukungan. Kalau salah menempatkan *leading*

sector saya khawatir tahapan kedua *technical visibility*-nya tidak bisa dipenuhi, secara teknis tidak bisa dilaksanakan.

Demikian, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ini kita mau lanjutkan dengan Ibu Menteri menjawab atau kita langsung kesimpulan? Kesimpulan saja ya? Oke. Pasti Ibu Menteri ikut saja, lebih cepat lebih baik.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Sudah ter-*cancel*.

Pak Ketua, sebelum disimpulkan, izinkan saya memberi kesempatan untuk menjelaskan Sisnaker. Ini tidak hanya terkait dengan kartu pra kerja, tapi kami ingin mendapatkan dukungan dari Bapak/Ibu agar sistem inilah yang bisa menjadi jembatan bagi seluruh *stakeholder* ketenagakerjaan. Jadi mungkin tidak lama, biar Bapak/Ibu paham. Karena saya berharap sosialisasinya bisa sangat masif untuk memastikan semua *stakeholder* itu bisa menjadi bagian dari sistem ini.

Pak Sekjen, silakan. Sebentar saja, Pak Sekjen. Singkat, Pak.

**SEKJEN KEMENAKER:**

Terima kasih Ibu Menteri.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan, dan  
Seluruh Bapak/Ibu Anggota Komisi IX yang kami hormati,

Mohon izin, Ibu Menteri.

Terkait dengan Sisnaker kalau boleh kami jelaskan sedikit. Memang ini diinisiasi menjawab tuntutan daripada kebutuhan akan data dari ketenagakerjaan. Sejak beberapa tahun lalu, 2018 awal, ada perintah Bapak Presiden terkait dengan pentingnya satu data. Terus kedua adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik itu kan harus sudah diterapkan. Kementerian Ketenagakerjaan menginisiasi bagaimana seluruh layanan ketenagakerjaan ditransformasi didalam bentuk pelayanan digital.

Saat ini seperti yang Ibu Menteri sudah sampaikan tadi, sejak September sebagian besar layanan ketenagakerjaan sudah bertransformasi dalam bentuk digital. Salah satu layanan yang paling kita prioritaskan adalah dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yaitu pelatihan, pemagangan, sertifikasi.

Salah satu program Sisnaker ini memberikan pelayanan kepada tiga *stakeholder* ketenagakerjaan. Yang pertama adalah terkait dengan perusahaan. Kenapa perusahaan? Karena di sinilah bernaung tenaga kerja kita. Yang kedua adalah lembaga pelatihan. Kenapa lembaga pelatihan? Karena di sinilah lembaga yang mensuplai tenaga kerja yang kompeten. Yang menjadi tugas fungsinya Kemenaker adalah bagaimana memberikan pembinaan dalam konteks kredibilitas lembaga pelatihan. Yang ketiga adalah data pencaker (pencari kerja). Jadi tiga *stakeholder* ini yang kita layani di dalam satu sistem yang sistem ini merangkum berbagai layanan. Yang kita



sudah *mapping* ada sekitar 24 layanan, tetapi saat ini baru sebesar 16 layanan yang sudah kita selesaikan. Dan tahap inipun sedang dalam konteks perkuatan *database*-nya. Sebagai misal, yang kita juga sudah menggaungkan atas arahan Ibu Menteri bahwa perlunya ada *database* ketenagakerjaan. Di sini ada salah satu aplikasi di dalam Sisnaker yang kita sebut wajib lapor. Di sini kalau wajib lapor ini adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, seluruh perusahaan wajib melaporkan datanya ke pemerintah. Saat ini sudah ada aplikasi yang *online*, jadi pengusaha itu tidak perlu lagi datang ke dinas-dinas, ke kantor, cukup melalui kantor masing-masing melapor *by online* dan akan secara sistem selesai pelaporan. Yang kita ambil datanya dari atau yang wajib dilaporkan variabelnya adalah terkait dengan ketenagakerjaannya dia, jumlah tenaga kerjanya dia, profilnya tenaga kerja mereka *by name by address*. Yang kedua adalah lowongan pekerjaan. Inilah yang menjadi data yang ditunggu-tunggu oleh semua *stakeholder* terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Yang berikutnya adalah hubungan industrial ketenagakerjaannya. Yang keempat adalah terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dari data WLKP, coba dipresentasikan Pak Bram, kita bisa melihat profil tenaga kerja kita dari tingkat nasional sampai dengan kabupaten/kota. Jadi sistem ini seluruh instansi ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, itu mengakses sistem yang sama, sehingga data itu akan menjadi satu, tidak ada *redundancy data*. Dan bagaimana menjamin data ini valid? Sistem ini melakukan kerjasama dengan Dukcapil menggunakan data NIK kependudukan, sehingga siapapun yang mengakses ini data itu pasti valid dan tidak ada *redundancy*-nya.

Selanjutnya kami sudah melakukan integrasi dari berbagai kementerian. Sebagai misal OSS di bawah BKPM, terus Kementerian Keuangan, terus BPJS, terus imigrasi, sudah terintegrasi di dalam sistem. Sistem kita terintegrasi dengan sistem-sistem kementerian itu dan akan terus kita kembangkan untuk berintegrasi. Inilah yang kita coba dukung untuk pelaksanaan kartu pra kerja antara lain.

Jadi nanti pelayanan masyarakat dengan Sisnaker ini masyarakat di manapun juga bisa mengakses mendapatkan layanan pelatihan itu ada di mana saja, programnya apa saja. Terus yang kedua, dia juga bisa melihat lowongan kerja itu ada di mana saja. Apabila dia tertarik atau dia *interest* untuk meng-*apply* langsung *by online* itu diproses melalui sistem kita. Dan dengan sistem inipun nanti kita bisa memonitor dan mengendalikan capaian daripada sasaran program. Sebagai misal seperti yang Ibu Menteri tadi sampaikan berapa yang dilatih, berapa yang ditempatkan, *by name by address* sudah bisa terdata datanya. Sebagai misal contoh sederhananya ketika dinas mempunyai kewenangan untuk memberikan satu izin penyelenggara pelatihan, karena dinas itu memang kewenangannya di kabupaten/kota yang memberikan izin, pada hari ini dinas Kabupaten X mengeluarkan izin, pada saat itu juga data itu sudah kita dapatkan. Begitu *diapprove* secara sistem data itu sudah tercatat bahwa ada lembaga pelatihan yang diberikan izin oleh dinas Kabupaten X dengan profil lembaganya seperti apa, itu sudah kita miliki. Jadi data ini dari tingkat pusat sampai daerah tidak akan *redundancy* dan data ini akan valid karena memang terverifikasi melalui sistem data NIK. Data puluhan ribu yang dimiliki oleh perusahaan pun itu akan mudah diakses oleh si perusahaan.

Saya kira itu Ibu untuk sementara sedikit informasi terkait dengan... Yang kami butuhkan sebetulnya, seperti yang Ibu Menteri sampaikan adalah bagaimana mendorong seluruh *stakeholder* ini bisa saat ini secepatnya mengakses sistem. Sebagai misal, kalau saya boleh sampaikan saat ini per hari ini perusahaan yang melapor baru 266 ribuan dengan data tenaga kerja baru sekitar 7 jutaan. Itu *by name by address*. Kita mau melihat perusahaan itu sektor apa saja yang paling tinggi, terus jumlah tenaganya seperti apa profilnya, lowongan kerjanya juga *by name by address*. Misalnya perusahaan yang membutuhkan di wilayah ini lowongan kerjanya seperti apa. Misalnya ternyata di Kabupaten X lowongan kerja yang paling besar adalah di sektor manufaktur misalnya, itu sudah kelihatan, sehingga harapannya dengan data ini lembaga pendidikan maupun lembaga pelatihan harusnya sudah berorientasi pada data tersebut, karena ini menunjukkan *demand* daripada kebutuhan kerja.

Reorientasi program yang dicanangkan oleh Kemenaker itu harus berorientasi pada data lowongan kerja yang ada di wilayah masing-masing, sehingga *missed match*-nya tidak timbul lagi, sehingga sudah *matching* antara program yang di inisiasi oleh lembaga pelatihan maupun pendidikan sudah sesuai dengan *demand* yang ada di wilayah masing-masing. Dengan demikian harapan kita dalam konteks pembangunan SDM mengurangi *missed match* yang selama ini muncul, dan akan sangat jelas kelihatannya. Syaratnya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan itu secara masif melapor.

Kalau data BPS saat ini jumlah perusahaan menengah besar itu sekitar 450 ribuan, kecil/mikro itu ada 26 juta. Kalau kita punya target yang besar menengah saja masuk ke dalam sistem kita, kita akan bisa mendapatkan informasi yang lumayan baik. Sebagai contoh, kalau sekarang data 268 ribu ini dimana menengah besarnya baru 40 ribuan yang melapor, tetapi lowongan kerja yang kita peroleh seperti tadi Ibu Menteri sampaikan ada 170 ribuan. Andaikata 450 ribu itu perusahaan masuk datanya ada di kita, lowongan itu sudah ada sekitar hampir 1 jutaan yang formal di besar menengah. Belum lagi yang kecil/mikro. Inilah yang kita berharap kalau perusahaan ini secara masif secara nasional melapor ke dalam sistem kita, data kita akan cepat baik. Begitu juga kalau pencari kerja mengakses kita dorong untuk mendaftar melalui sistem kita akan dipertemukan dengan sistem yang kita sebut di dalam Sisnaker ini ada aplikasi Karir HAP. Karir HAP itu aplikasi pelayanan pencari kerja yang mempelajari dari *provider-provider* seperti di bidang *job street* kita rangkum dengan pola yang baik, sehingga secara IoT akan mempertemukan. Sebagai misal, apabila perusahaan yang mendaftar meng-*upload* lowongannya, pada saat itu juga nanti perusahaan itu akan tahu siapa saja yang sesuai kompetensinya. Begitu juga dari sisi suplainya.

Saya kira itu, Ibu Menteri, mohon maaf kalau ada memakan waktu.  
Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**INTERUPSI F-PDIP (I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.):**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Ketut.

**F-PDIP (I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.):**

Saya ingin tanya, di Kemenko ada tidak penjelasan seperti ini? Ini kan tadi sangat teknis sekali dari persiapan itu sudah sangat dipersiapkan betul di kementerian, sehingga sangat aneh ini kartu pra kerja akan dikelola Kementerian Bidang Perekonomian. Tidak ada di Kemenko penjelasan seperti itu. Maka dari itu tidak ada alasan lagi bahwa memang harus ini dikelola oleh yang teknis. Jangan sampai nanti kasus seperti ini membuat kartu, kasus e-KTP dan sebagainya. Kita ingin ini adalah betul-betul nanti dalam pengawasan teknis persiapan itu nanti ini ada di kementerian. Kami yakin tidak ada. Makanya ini adalah sesuatu yang aneh. Maka dari itu kesimpulan sudah, tidak usah disimpulkan lagi. Saya sudah membayangkan bahwa disimpulkan dalam rapat ini bahwa pengelolaan dari kartu pra kerja ini harus di kementerian. Apalagi anggarannya sekarang kan belum didistribusikan, baru ke kementerian yang lain.

Saya kira itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kita langsung masukkan ke kesimpulan, tolong dinaikkan.

Poin 1, karena terkait dengan soal konsep ini juga kita belum mendapatkan secara komprehensif, nomor 1 kita drop.

Sebentar, kita tanya Ibu Menteri dulu.

Silakan, Ibu Menteri.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Nomor 1 didrop maksudnya? Kami tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan lebih detail soal kartu pra kerja, kecuali kami mendapatkan perintah dari Menko atau dari presiden melalui Menko untuk menjelaskan itu, kami akan jelaskan.

**KETUA RAPAT:**

Nomor 1 kita drop ya.

Nomor 1 sekarang.

1. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan kepada presiden agar pengelolaan dan pelaksanaan program kartu pra kerja ini diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI sebagai kementerian yang membidangi pembangunan ketenagakerjaan.

**INTERUPSI F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM):**

Sebentar, bahasanya *meminta* itu kurang *joss*. *Mendesak* kepada kementerian.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):**

Interupsi, Pimpinan.

Kita baca dulu versi kita, nanti baru tanya pemerintah.

Ini satu baru ditanya pemerintah. Kita dulu selesai semua, baru minta tanggapan pemerintah.

**KETUA RAPAT:**

Kita pakai *mendesak* atau *meminta* ini?

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Didesak saja tidak dikasih, apalagi diminta.

**INTERUPSI F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H.):**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Ibu Dewi.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H.):**

Mungkin secara redaksional nanti terserah buatnya di poin berapa. Yang kita inginkan di sini adalah bukan mendesak Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi mendesak justru adalah pemerintah, tapi di sini melalui Menteri Tenaga Kerja. Antara lain juga yang harus kita lakukan adalah kita/komisi itu melalui Pimpinan DPR yang akan menyampaikannya. Jadi ada dua hal. Bagaimanapun juga tadi dikatakan, kalau kita bilang kita *mendesak* kemudian menteri bicara ke presiden, sebelum sampai ke presiden saja sudah ada Menko. Di Menko itu kan bukan mitranya siapa-siapa, jadi ketinggian kalau untuk langsung ke presiden. Sebelumnya untuk jalur Menko itu ditempuhlah melalui surat dari Pimpinan DPR. Jadi Pimpinan Komisi berkirimlah surat kepada Pimpinan DPR yang akan kemudian mengirim surat tentunya.

Jadi itulah yang namanya kesimpulan daripada pengawasan yang dilakukan oleh parlemen disuarakan melalui Pimpinan DPR kepada pemerintah. Jadi bukan lagi bicara Komisi IX ke presiden atau Komisi IX ke Kemenko ataupun kepada Kementerian Tenaga Kerja. Jadi itu, sehingga kita tidak simpang siur membuat kesimpulan yang ada kata tapi tidak ada maknanya sama sekali. Jadi jelas Tupoksinya apa. Jangan kita pandai merangkai kata tapi tidak ada makna.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Ibu Dewi.  
Saya ulangi lagi membacakan ya:

*“Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI.”*

Melalui menteri ya?

**INTERUPSI F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):**

Begini, *mendesak kepada pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk menyampaikan kepada presiden dihapus saja.*

**KETUA RAPAT:**

Ini memang kita punya semangat yang sama. Cuma merumuskan ini biar juga posisi masing-masing juga ini. Cari rumusan yang pas.  
Silakan, Ibu Anggia.

**F-KB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Usul, Pimpinan.

Sebenarnya tadi Ibu Dewi sudah menjelaskan dengan detail, artinya kita/Komisi IX mendesak pemerintah. Kalau misalnya ke Kemenaker, *wong* Kemenaker itu masih ke Menko. Kan balik lagi saja. Kita usulannya langsung ke pemerintah saja.

Jadi ada dua hal. Pertama, kita ke pemerintah, lalu kemudian dalam intern parlemen/DPR kita usul ke Pimpinan DPR.

Terima kasih.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Saya izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Usulan dari Ibu Kurnia, kemudian ke Pak Saleh.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Iya, biar cepat.

*“Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah agar pengelolaan dan pelaksanaan program kartu pra kerja menjadi wewenang penuh Kementerian Ketenagakerjaan RI sebagai kementerian yang membidangi pembangunan ketenagakerjaan.”*

**F-KB (Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M.):**

Redaksi Ibu Kurniasih dikunci dulu.

**KETUA RAPAT:**

Sebelum Ibu Nur, Pak Saleh dulu.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Ini tadi *mendesak pemerintah* ya, bahasanya begitu?

Pemerintah itu ada Mensos, ada Menaker, ada yang lain-lain. Mitra kita kan pemerintahnya itu Kemenaker, mestinya harus ada di situ.

Sebentar dulu. Nanti Kakak bicara. Tadi Kakak bicara kan boleh. Walaupun sebelah-sebelahan duduknya harus tetap dikasih kesempatan bicara. Kalau mau berbicara yang tertib. Saya kan tertib ini, sambil lipat tangan saya bicara begini.

Jadi maksud saya yang poin 1 itu tetap saja *Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Tenaga Kerja* untuk tadi itu berbicara dengan presiden, justru tidak ada masalah. Masak menteriya tidak bisa bicara dengan presiden. Kan ada Ratas-ratas, ada Rapat Kabinet. Kalau menteri kan sudah ada surat keputusan rapat di sini, itu kan bisa dibacakan di Rapat Kabinet, poin 1 dari kesimpulan itu adalah begini. Kalau di republik ini itupun saja tidak boleh diusulkan, itu bubar saja kita bernegara ini. Mengusulkan itu saja tidak boleh, otoriter sekali presidennya. Kan tidak begitu presiden kita. Presiden kita kan sangat demokratis. Maka karena itu jangan takut membuat di sini *Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Tenaga Kerja RI untuk menyampaikan kepada presiden agar program kartu pra kerja ini diawasi atau dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja* atau katakanlah *dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja secara penuh*, kurang lebih begitu. Karena kalau tidak ya tadi itu, rapat sini, surat lagi ke Pimpinan DPR. Memang Pimpinan DPR kerjanya *beginian* juga. Kan belum tentu juga mau itu Pimpinan DPR mengerjakan itu, belum tentu mau. Orang kita mau rapat gabungan saja nanti repotnya minta ampun juga itu. Saya kan sudah merasakan juga *bikin* rapat gabungan itu kayak mana. Kemarin kita mau rapat gabungan tiga komisi. Satu komisi tidak datang, menteriya suruh pulang. Menteri Sosial kan kemarin sudah hadir di sini, tapi di-SMS sama pimpinan komisi sebelah, "Bapak jangan di situ". Pulang itu Menteri Sosialnya. Ini lebih bagus mitra kita, mitra kita saja diminta/didesak. Kalau Ibu Menteri Tenaga Kerja tidak mau ya kita desak terus lagi, desak lagi, desak lagi, desak lagi, sampai mau.

Demikian. Sekarang silakan Kakak Dewi kalau mau bicara.

**KETUA RAPAT:**

Ibu Nur, kemudian ke Ibu Dewi lagi.  
Silakan, Ibu Nur.

**F-KB (Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya *simple*, sepakat dengan redaksi dari Ibu Kurniasih, mendesak pemerintah untuk memberikan kartu pra kerja ini menjadi wewenang Kementerian Ketenagakerjaan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Ibu Dewi silakan.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H.):**

Jadi sebenarnya begini, Ibu Menteri, sebetulnya tidak usah khawatir kalau seandainya ada perkataan '*mendesak Kementerian Ketenagakerjaan*'. Kalau hasil rapat ini dibawa kepada presiden pun tidak ada masalah. Dulu Pak Hanif sering, malah kadang-kadang minta dimasukkan. Misalnya mau tambah anggaran, *mendesak kepada kementerian untuk mengusulkan bla-bla-bla*. Kan *toh* Pak Presiden tahu bahwa ini adalah parlemen yang membuat kesimpulan dan Ibu kan tentunya yang mewakili Pak Presiden sebagai mitra Komisi IX. Untuk membantu bahwa Ibu menyampaikan seperti ini keputusan rapat, Ibu katakan saja. Menyampaikan keputusan rapat kan tidak ada salahnya, memang begitu adanya. Baru nanti yang kedua, itu kita secara internal juga membantu, membantu di sini menyuarakan kepada pemerintah.

Di sini melalui pimpinan tetap kita tidak bisa/komisi tidak bisa melalui pimpinan bersurat kepada presiden itu tidak ada ceritanya. *One gate*, hanya ada satu pintu. *Speaker* daripada DPR ini adalah Pimpinan DPR. Jadi Pimpinan bersurat nanti Pimpinan DPR *lah* yang akan meneruskan apa yang menjadi keinginan daripada Komisi IX. Itu yang harus dirumuskan oleh Pimpinan. Jadi mungkin tidak detailnya yang ada di sini, itu nanti kita secara internal merumuskan. Hanya prinsipnya saja bahwa pimpinan akan menyurat.

Kalau seandainya Pimpinan DPR nanti misalnya, kata Pak Saleh, susah, tidak setuju, kan belum tentu. Tentunya kan itu kan masih banyak. Di situ ada fraksi-fraksi. Kan banyak sekarang wakilnya, Pak. Jadi biarkanlah itu menjadi ranah mereka. Tidak usah juga semua kita putuskan di sini. Berjenjang saja. Jadi seperti itu, supaya kita bisa membantu mitra kerja kita agar supaya ini bisa terlaksana.

Kalau saya tidak salah, ada 50 miliar sudah dialokasikan untuk PMO-nya. Mungkin 50 itu kan, PMO itu kan semacam kayak badan pengelolaan BPJS-nya *lah*, mungkin nanti yang mengelola itu badan pengelola kartu pra kerja nanti adalah di bawah Kemenaker. Apakah mungkin itu nanti yang kita awasi adalah pengelolaannya. Kita kan sekarang ini masih belum tahu. Tapi kalau keinginan kita bahwa Kemenaker itu mengelola seluruhnya secara utuh penuh boleh-boleh saja kita suarakan, meskipun kita tahu tidak mungkin nanti mengelola misalnya penggunaan vokasi yang ada di kementerian lain. Karena kementerian lain itu punya anggaran yang dipakai untuk membentuk vokasi tersebut. Kalau dikoordinasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja mungkin bisa, tapi pasti adalah tiap-tiap kementerian tidak ingin begitu saja. Oleh karena ini pembicaraan yang belum selesai juga di pemerintah, marilah kita secara internal merumuskan kita ingin apa. Dan kalau masih ingin kita sampaikan juga kepada Pimpinan DPR. Daripada kita di sini hanya berkuat untuk kesimpulan antara yang tidak bisa disepakati Ibu Menteri. Terus kita juga bagaimana? Kan semua sama-sama punya *standing point* yang masing-masing dengan alasannya sendiri. Marilah kita saling menghargai.

Ibu Menteri saya rasa juga memang kalau menyampaikan keputusan DPR, dalam hal ini mitra kerja Ibu, itu dilakukan semua menteri. Menteri Kesehatan pun melakukan yang lalu di sini. Bahkan Pak Hanif pun melakukan juga. Saya rasa pasti Presiden juga sudah biasa. Ini adalah justru bentuk bahwa Ibu sudah melakukan tugasnya dengan baik, berkoordinasi, dan ada masukan. Kemudian kita sendiri menindaklanjuti secara internal dengan jalur yang semestinya.

Mungkin itu saja, Pimpinan.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Ini ada dua opsi kira-kira ya. Opsi pertama kan adalah mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan kepada presiden agar pengelolaan dan pelaksanaan program ini dilakukan oleh kewenangan penuh Kemenaker RI. Yang kedua adalah Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah agar pengelolaan dan pelaksanaan program kartu pra kerja menjadi wewenang penuh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai kementerian yang menangani pembangunan ketenagakerjaan. Untuk kita di Anggota DPR RI Komisi IX sepakat? Nomor 1 atau nomor 2? Kalau begitu kita *voting* fraksi ya? Sepakat?

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Ini lucu, Pimpinan.

Halo, Pimpinan, ini jangan apa-apa langsung *voting* begitu. Orang masih ada hak pemerintah bicara, belum tentu pemerintahnya mau. Kalau misalnya pemerintah tidak mau tidak jadi kesimpulan ini.

**KETUA RAPAT:**

Kita juga belum bersepakat ini.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Makanya kita sepakati dulu, baru tanya pemerintah. Kalaupun kita *voting* versi A, nanti pemerintah tidak mau bagaimana? Makanya jangan *voting* begitu.

**KETUA RAPAT:**

Pak Saleh, kita putuskan antara kita dulu, baru kita tawarkan kepada Pemerintah.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Silakan. Tapi tidak mesti harus *voting*. Sia-sia *voting* kalau misalnya pemerintah tidak setuju.



**KETUA RAPAT:**

Jadi sekarang kembali ke teman-teman, kita putuskan yang mana? Masih mau dibahas lagi atau musyawarah atau kita *voting*?

**INTERUPSI F-KB (Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M.):**

Pimpinan, alternatif dua.

Karena jelas ya, kalau misalnya kita *ngomong* tentang pemerintah itu kan kalau kita di komisi, kan mitranya jelas ini siapa, berarti Komisi IX misalnya Kemenaker, Kemenkes dan lain sebagainya, jadi saya pikir ini lebih oke *lah* untuk alternatif yang kedua. Jadi Komisi IX mendesak pemerintah *bla-bla-bla* sampai seterusnya.

Saya pikir itu.

**KETUA RAPAT:**

Yang lain silakan.

**INTERUPSI F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Pimpinan, diizinkan?

Sebenarnya sepakat saja sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Ini kan masalah redaksi, sebenarnya substansinya sama, bagaimana mendesak agar program kartu pra kerja ini kewenangannya ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi karena jelas kita maunya itu dipegang oleh Kementerian Ketenagakerjaan, makanya yang redaksi nomor 1 menurut saya lebih tepat, karena sudah lebih jelas ditujukan kepada Kementerian Tenaga Kerja juga yang akan memperjuangkan juga. Artinya landasannya tentu dari hasil kesimpulan rapat hari ini untuk mereka sampaikan kepada presiden.

Itu, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, ada lagi yang lain tanggapannya?

Pak Imam silakan.

**F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Jadi saya setuju dengan Mbak Putih tadi yang intinya kan Menteri Tenaga Kerja harus kerja. Jangan kerja untuk menteri lain, itu namanya *ora mudeng*. *Ora mudeng ora usah kerjo, genti ae*.

Jadi Ibu Menteri, jangan sampai *nggelundung koyok ball*. Jelas ya, kalau Ratas *ngomong*, Komisi IX *owner*-nya, yang punya *duit* Komisi IX, mintanya tanggung jawab kartu pra kerja itu yang mengerjakan Menteri Tenaga Kerja. Begitu, intinya seperti nomor 2 itu saja tidak apa-apa itu, intinya ini harus dikerjakan Menteri Tenaga Kerja, artinya bekerja. Kita selaku Komisi IX (anggaran, pengawasan dan undang-undang) *clear*.

Ini semua ada anggaran 10 triliun kan, menteri ini kan ada 7 triliun, ada tambahan itu ya tidak masalah. Ketika kita rapat di Banggar kita perjuangkan. Kalau Menteri Tenaga Kerja *clear* dengan komisi berarti kita perjuangkan, "Ayo cairkan, cairkan", cair. Namun kalau Menteri Tenaga Kerja tidak jelas, yang kerja Menteri Tenaga Kerja tapi dimanfaatkan/dioperasikan menteri lain ya saya *cancel* di Banggar besar. Saya *cancel*, karena tidak sependapat dengan pikiran teman-teman Komisi IX. Ini serius ini, ini kita Raker negara ini. Kita ini masyarakat seluruh Indonesia, tidak main-main ini.

Terima kasih, Ketua.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalaam*, Mas Imam.

Oke, saya kira kita cuma dua opsi. Ini kita masih mau membahas ini atau kita mau ambil keputusan ini?

Silakan, Pak Haruna. Habis ini kita ambil keputusan.

**F-KB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Apa memungkinkan dua-dua diambil? Karena di sana nomor 1, di sini nomor 2.

Begitu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Karena masih belum ada kesepakatan, saya tawarkan lagi, kita ambil keputusan atau masih mau ada pembahasan lagi ini? Oke, kita pakai *voting* fraksi ya.

PDI Perjuangan?

**F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Ketua, 1-2 PDI sama saja, intinya tadi seperti saya sampaikan. Yang 2 pun lebih tajam menurut saya. 2 saja, karena biar jelas.

**KETUA RAPAT:**

Fraksi Partai Golkar, Ibu Dewi?

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H.):**

Kalau menurut hemat saya kita tegas yang pertama, Pimpinan. Karena juga tidak ada salahnya marwahnya Komisi IX. Ini kan bukan soal salah/benar memberi usulan kepada presiden. Berarti ini namanya kita kerja. Kalau alternatif kedua pemerintah siapa.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, 1 Golkar.  
Gerindra?

**F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Tadi sudah disampaikan, 1. Karena kan hal yang sama kita buat juga waktu dengan Menteri Kesehatan, konsisten saja.

**KETUA RAPAT:**

Oke.  
Fraksi Partai Nasdem?

**F-NASDEM (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.):**

Untuk Partai Nasdem kami sepakat dengan yang pertama.

**KETUA RAPAT:**

Pertama ya.  
Kebangkitan Bangsa?

**F-KB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Yang kedua, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Fraksi Partai Demokrat?

**F-PD (ANWAR HAFID):**

1, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Fraksi Keadilan Sejahtera?  
Fraksi Partai Amanat Nasional?

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

*Loh kok* PKS nomor 2? Dia memang nomor 2? Kalau begitu kami 1.

**KETUA RAPAT:**

Fraksi PPP tidak datang ya.  
Berdasarkan *voting* fraksi 6-2-4-5 yang memilih di poin pertama dan 3 memilih di poin kedua. Jadi kita ambil opsi berarti apa yang kita putuskan poin pertama.

**F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Setuju, tidak masalah, 1/2 sama. Jadi 1 saja.

**KETUA RAPAT:**

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi IX DPR RI akan menyampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk mengantarkan surat kepada presiden terkait peralihan kewenangan penyelenggaraan program kartu pra kerja

Ini masih perlu tidak ini? Menimbang catatan dari Pak Saleh tadi, masih perlu tidak ini kita buat?

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):**

Saya usul, Ketua. Izin.

Menurut saya ini tidak perlu. Nanti kita dengar laporan dari Menteri Tenaga Kerja saja. Nanti sudah disampaikan ke presiden tapi presidennya tidak setuju, kita dengar alasannya. Yang penting kan pesannya sampai ke presiden. Kalau ke DPR lagi tumpang tindih dengan ini. Menurut saya kita kasih kepercayaan kepada Ibu Ida. Ibu Ida ini kalau sudah senyum sudah selesai semuanya.

**INTERUPSI F-KB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Pimpinan, maaf, boleh izin?

**KETUA RAPAT:**

Dari mana? Silakan, Ibu Anggi.

**F-KB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Mesti lupa sama saya.

Pimpinan, saya pikir begini. Karena kita punya mekanisme dua jalur, karena ini masalah yang menurut saya penting untuk kita pikirkan secara seksama, dengan melalui jalurnya kementerian lalu juga melalui jalurnya Pimpinan DPR, supaya lebih kuat antara yang menjadi aspirasi. Inikan usul dari DPR ini kan kita sampaikan ke pemerintah. Tetapi kita juga ngomong melalui Pimpinan DPR.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Ibu Anggia.

Untuk tawaran kedua ini Pak Saleh tadi mengusulkan dengan situasi praktisnya. Pasti kan ini Ibu Menteri mungkin pada saat ratas bisa langsung menyampaikan kepada presiden tanpa menunggu surat dari Pimpinan DPR. Ataukah dari Ibu Anggita tadi, kita masih tetap secara formal meminta Pimpinan DPR menyurati presiden.

**F-KB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Mohon maaf, karena kita punya dua mekanisme, ini kita manfaatkan secara maksimal. Usulan untuk mengembalikan atau untuk mendudukkan tupoksi secara jelas. Inikan usulan dari Komisi IX ini, maka kita juga melakukan jalur itu.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Kembali ke Bapak/Ibu sekalian para Anggota DPR RI yang terhormat silakan memutuskan usulan ini kita teruskan apa kita drop?

**INTERUPSI F-PDIP (I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.):**

Kita teruskan saja.

Maksudnya di nomor 2 ini diusulkan saja, Pimpinan, karena ini lebih menguatkan. Saya kira kalau nanti Pimpinan bersurat kepada presiden pasti akan lebih memudahkan kerja menteri, kan tidak ada salahnya.

Terima kasih.

**INTERUPSI F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):**

Pimpinan, menambah.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Rahmad.

**F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):**

Saya kira memang tidak lazim. Namun karena ketidaklaziman, tapi ini sesuatu isu yang luar biasa besar, 10 triliun. Ide dasar luar biasa tidak dikerjakan oleh Tupoksinya kementerian. Saya kira ini perlu juga dimasukkan tidak masalah meskipun tidak lazim. Tetapi kalau Pimpinan itu berkirim surat kepada presiden pasti presiden akan merespon. Tetapi itu menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kemenaker.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Akhirnya Ibu Nini bicara. Silakan, Ibu Nini.

**F-KB (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):**

Maksudnya akhirnya bagaimana Pak Melki ini? Lagi sariawan ya, hadirin?

Terima kasih, Pak Melki.

Jadi sebenarnya ini persoalannya kan harus berkomunikasi di wilayah yang lebih tinggi yaitu presiden dan Menko. Dan menurut saya ketika kita mengirimkan surat ke Pimpinan DPR itu adalah wujud bahwa kita juga membahas ini dengan serius. Disamping itu juga ini menjadi memperkokoh dari pihak Kemenaker untuk membicarakan hal ini kepada presiden, "Ini loh ternyata DPR juga serius meminta agar wilayah ini Tupoksinya dipindah dari Menko ke Kemenaker". Sehingga saya pikir surat kepada Pimpinan DPR ini bukan sekedar ya tidak apa-apa, tapi menurut saya ini malah harus, karena ini menjadi wujud kita bahwa kita memang serius untuk menyelesaikan hal ini. Ini saya pikir bukan hanya persoalan kartu pra kerja. Besok lagi kalau persoalan yang lain, bisa jadi BPJS Tenaga Kerja juga, kalau kita rasa itu perlu kita juga dari Komisi IX juga akan meminta dari Pimpinan DPR untuk berkirim surat kepada presiden juga untuk mengambil langkah-langkah yang kira-kira memang sangat dibutuhkan untuk kita laksanakan. Begitu, Pimpinan, jadi saya pikir nomor 2, mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR sebagai bentuk penguatan bahwa persoalan ini penting dan juga sebagai penguatan bahwa kita di Komisi IX benar-benar men-*support* agar kinerja ini berjalan lancar.

Terima kasih.

**INTERUPSI F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Pimpinan, menambahkan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Ibu Putih.

**F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Jadi sepakat seperti yang disampaikan Ibu Nini tadi di dalam rangka penguatan dari sikap terhadap program besar dari kartu pra kerja ini yang juga anggarannya tidak kecil, sehingga saya setuju untuk nomor 2 ini tetap dicantumkan. Hanya saja mungkin tidak perlu dijelaskan peralihan kewenangan, karena kan secara konsep tadi masih dibahas, secara konsepnya katanya masih proses pembahasan, kita cukup sampai bahwa program kartu pra kerja ini menjadi kewenangan dari Kementerian Tenaga Kerja, titik sampai situ:

*"Komisi IX menyampaikan kepada Pimpinan DPR untuk bersurat kepada presiden terkait penyelenggaraan program kartu pra kerja menjadi tupoksi dari Kementerian Tenaga Kerja".*

Tidak usah menyebut yang lainnya, karena kan konsepnya masih dibahas sebenarnya, jadi jelas begitu.

Itu saja, Pimpinan.

**INTERUPSI F-PDIP (I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.):**

Biar sama dengan Pimpinan, nomor 1 kewenangan penuh, itu saja.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Saleh.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Jadi besok kalau kita rapat dengan Kementerian Kesehatan kita buat juga kesimpulan kayak model nomor 2 ini yaitu mendesak Pimpinan DPR nanti untuk menyurati Presiden supaya data BPJS itu diberikan kepada kita. Dan saya ingat betul itu, Pak Ansory, dari dulu kita tidak berhasil ini cari data BPJS. Kalau memang ini bisa model-model begini, setiap masalah yang ada di Komisi IX ini lempar saja langsung ke Pimpinan DPR, mana tahu lebih lancar. Kartu BPJS itu datanya saja kita tidak dapat itu. Kita mau mengusulkan orang pun tidak boleh. Padahal anggarannya diketok di sini, 26 triliun. Ini kan cuma 10 triliun kalau perkara angka. Kalau begitu dilemparkan saja semua ke sana. Ada apa-apa masalah di Komisi IX lemparkan. Apa gunanya ada pembagian komisi kalau semua dilemparkan ke Pimpinan DPR. Kalau Pimpinan DPR itukan hanya koordinasi. Kalau ada misalnya koordinasi antara Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, Komisi XI, misalnya, itu dikoordinasikan di sana. Kalau yang teknis begini yang urusannya komisi masing-masing. Jadi kalau memang ini mau buat tidak apa-apa. Tapi saya usul, nanti pas lagi rapat dengan Kementerian Kesehatan kita buat juga itu soal data-data BPJS itu, supaya kita juga bisa membuka itu di sini, supaya kita juga berhak. Sampai sekarang ini kita belum berhak. Ini supaya teman-teman yang mungkin soal data ini belum mendalami persis ya kita bolehkan itu.

Demikian, Pimpinan.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Habis ini Pak Ansory, kemudian Ibu Felly.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Saya sedikit saja.

Inikan baru. Dulu kan kalau tidak salah yang BPJS waktu dari 2014 baru-baru, kalau kita memang keadaan mendesak dan darurat biasanya kita juga tidak apa-apa, mungkin Pak Saleh sekedar menguatkan, kita buat surat ke Pimpinan DPR. Untuk ini kan baru pertama ini, baru dan perlu untuk segera diberikan wewenang kepada Kemenaker. Saya kira mungkin tidak ada masalahnya. Tapi bukan berarti nanti setiap masalah ke sana, tidak. Ini kan masih baru, baru saja kita bicarakan pra kerja ini. Menurut saya mungkin

sekedar penguatan tidak apa-apa *lah* untuk sementara. Bukan berarti nanti setelah ini juga harus kesana, tidak. Ini karena baru kita bahas. Dan mungkin juga Pimpinan DPR juga mungkin belum dengar, biar mereka tahu juga.

Sekedar tambahan saja barangkali.

Terima kasih.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Izin, Pimpinan, interupsi lagi. Saleh Daulay ini, sedikit saja.

Ini sebetulnya bagi saya masuk/tidak masuk biasa saja. Cuma tadi Pak Rahmad itu bagus *statement*-nya “ini tidak lazim”. Cuma dia setuju, lucunya begitu.

**F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):**

Yang tidak lazim karena luar biasanya itu.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Maksud saya begini, mendelegasikan tugas komisi ke Pimpinan DPR itu yang ada itu biasanya delegasi dari Pimpinan ke komisi. Ini delegasi dari sini ke sana itu kan memang tidak lazim.

Sebentar Ibu, nanti Ibu boleh *ngomong*. Panjang pun saya ikuti nanti. Yang *motong-motong* begini tidak benar. Kalau saya lagi bicara, bicara dulu.

Kalau misalnya ini tidak lazim, seperti kata Pak Rahmad dulu, kita buat studi dulu kelayakan, layak tidak komisi ini mengirim surat ke Pimpinan DPR. Kartu pra kerja ini kan masih studi, belum jelas ini barangnya.

Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

Silakan yang mau bicara yang lain.

**KETUA RAPAT:**

Gara-gara Pak Saleh bicara, Ibu Felly mau bicara juga.

Silakan, Ibu Felly.

**F-NASDEM (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.):**

Sebetulnya kalau saya sendiri pikiran saya sama seperti Pak Saleh, karena buat apa ada komisi. Nanti akhirnya kalau selalu seperti ini kayaknya kita itu hanya kayak pajangan saja kalau kita sendiri tidak ada kekuasaan disini kalau semuanya harus kesana. Jadi prinsipnya saya seperti Pak Saleh untuk kalau bisa sampai disini. Karena kayak dibilang tidak “tidak lazim”. Lebih baik di sini saja, biar kita ada artinya.

Saya kira itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kesimpulannya memang kita terbelah soal urusan ini, mau naik atau tidak usulan dari sini.



**INTERUPSI F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):**

Atau begini, Pimpinan, ada jalan tengah.

**KETUA RAPAT:**

Posisi alasan sudah sama-sama kita pahami. Kita musyawarah/mufakat itu kan ini pasti susah. Mau kita *voting* lagi urusan ini? Karena pasti susah ini putusan dua belah pihak ini.

**F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):**

Begini, Pimpinan. Izin, Pimpinan.

Ada barangkali usulan menarik ini. Tidak harus ke *spesialist leg-nya* seperti ini. Tetapi semangat suasana batin kita bahwa ini harus masuk kepada presiden. Bukan berarti kita tidak percaya kepada Menteri, tidak. Menteri sudah menjadi kewajiban, karena ini sudah mewajibkan untuk berkomunikasi dengan presiden. Tetapi meskipun ini karena tidak lazim yang tadi saya sampaikan tapi di-*support* oleh Kakanda Saleh, jadi ini tidak usah dimasukkan. Tetapi ada komunikasi berkirim surat untuk disampaikan menjadi bagian yang tidak meresahkan dari *proceeding* ini agar nanti Pimpinan DPR untuk berkirim surat ke sana. Karena ini bertanggungjawab besar ini. Kalau ini sampai terjadi Menko itu akan melakukan koordinasi mengelola, itu menjadi *preseden* kurang bagus. Siapapun itu menteri berikutnya akan menjadi rebutan Menko itu. Jadi suatu hal yang tidak dikelola dia akan jadi kelola. *Wong* itu 100 miliar saja cukup kelola untuk dirjen itu. Jadi tidak masalah dimasukkan. Tetapi nanti Pimpinan atas dasar suasana batin di sini dan internal rapat nanti, berkirim surat dengan lampiran ini untuk diteruskan kepada presiden. Mudah-mudahan ini tidak *diketawain* tidak lazim lagi oleh Mas Saleh.

**INTERUPSI F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Ketua, tambah sedikit saja, Imam Suroso. Kanan, Pak Ketua.

Jadi untuk menyikapi halusanya seperti Pak Saleh bilang, nomor 1 betul ada, nomor 2 pun ada. Namun dihaluskan: *Komisi IX DPR RI akan bermohon kepada Pimpinan*. Artinya begini, dengarkan dulu, kita perintah langsung oke, karena mitra kerja pemerintah. Kita kan punya Pimpinan ini, Ketua DPR RI, juga akan menyurati ke sana, artinya *double*. Artinya untuk memperingan Menteri Tenaga Kerja juga.

Ini sebetulnya saya tahu persis, Ibu Ida itu senang kalau dikerjakan sendiri, artinya bekerja. Ibu Ida bisa pegangan surat ini untuk menghadapi Menko maupun presiden. Dan memang kehendak rakyat/kehendak Komisi IX seperti itu.

Terima kasih, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Sebenarnya kan ini zaman sudah canggih. Kita selesai rapat ini kesimpulan rapat ini beredar di semua media, sampai presiden juga hari ini juga. Jadi tanpa kita melalui surat menyurat pun sudah sampai juga. Proses politik kemudian terjadi Ibu Ida di kementerian/Ratas. Kemudian kalau kita ketemu satu acara kemudian kita *ngobrol* sama Pak Jokowi, itu proses politik. Kalau soal tahu/tidak tahu suarakan saja sama presiden.

Jadi kan ini pegangan kita, rapat ini pegangan, karena ini kesimpulan rapat kita akan jadi pegangan. Kesimpulan rapat kita hari ini lebih tinggi daripada surat Ketua DPR, kesimpulan rapat kita sore ini lebih tinggi daripada surat Ketua DPR. Jadi jangan kemudian kesimpulan rapat kita ini di bawah surat DPR.

Jadi maunya saya begini, Bapak/Ibu sekalian, kita ini memutuskan sebuah keputusan ini sudah cukup sebagai bahan untuk kita bekerja agar yang kita inginkan ini bisa kejadian. Jangan kita tambah lagi proses-proses yang membuat sulit ini situasi. Jadi menurut saya begini, kalau kita bersepakat di sini kita putuskan. Kalau tidak, kita *voting*. Karena ini kan alasan berbeda-beda ini. Jadi untuk itu saya tawarkan kepada Bapak/Ibu sekalian kita musyawarah atau kita langsung *voting*. Karena ini sudah tidak mungkin sama ini, kita punya perspektif melihat ini berbeda, masih mau kita bahas atau mau kita *voting*.

Silakan, Pak Ansory.

#### **F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Kita hampir boleh dikatakan selama 4 tahun ini belum pernah kita bersurat komunikasi dengan Pimpinan DPR. Pernah sekali mungkin, darurat. Sekali lagi, ini seperti yang saya bilang tadi ya, saya cuma mengingat tadi hampir mungkin hanya 2-3 orang yang tidak bersuara untuk agar wewenang ini diserahkan kepada Kemenaker, tadi dari banyaknya ini. Jadi dari banyaknya ini. Makanya saya bilang tadi perlunya ini dibuat surat untuk DPR, walaupun nanti sebenarnya tanpa inipun... Tapi ini kan penguatan bagus, tanpa inipun sebenarnya nanti kami/Pimpinan Komisi dengan Kapoksi kita akan minta waktu kepada Pimpinan DPR nanti untuk dalam masalah ini, dalam pemantapan. Dengan ditulisnya di sini juga cuma penguatan saja. Mungkin nanti ke depan juga tidak ditulis lagi seperti ini. Mungkin kalau 1-2 Anggota saja yang mungkin tadi yang bersuara mungkin tidak seperti ini.

Terima kasih, Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Ini dua terakhir, Pak Nabil dan Pak Saleh, setelah itu kita *voting*.

#### **F-PDIP (MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Kalau menurut saya ini tidak perlu dimasukkan untuk saat ini. Kita uji dulu dari hasil kesimpulan sekarang ini seperti apa. Kalau masih belum mempan juga baru kita kirim surat. Jangan kemudian kita punya amunisi dikeluarkan semua. Jadi usul saya didrop saja. Dan walaupun nanti akan berkirim surat tidak perlu *lah* kita masukkan di kesimpulan rapat.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Saleh.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Saya hanya memperkuat saja. Ini sekarang kan ada masalah di Komisi VII. Komisi VII itu kan mitranya hanya ESDM sekarang ini. Mereka sekarang sudah berkirim surat ke Pimpinan DPR, bahkan ketemu Pimpinan DPR, supaya Kementerian Lingkungan Hidup itu dipindahkan ke Komisi VII. Tidak cair itu barangnya, tidak selesai. Khawatirnya saya kira kirimkan surat begini tidak selesai juga. Jadi menurut saya ini penting dipertimbangkan. Bagus kita kerjakan sendiri yang bisa kita kerjakan.

Saya sepakat dengan Pak Melki tadi, keputusan rapat di komisi ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada surat Pimpinan DPR ke presiden. Kenapa? Karena kita ini adalah representasi 574 orang Anggota DPR yang dipercaya duduk di komisi kesehatan dan ketenagakerjaan ini. Sama dengan kita percaya pada teman-teman kita yang 52 orang atau 54 orang di Komisi X untuk mengurus pendidikan dan olah raga. Mereka adalah representasi 575 orang Anggota DPR, ya kita percaya sama mereka. Jadi kalau ada keputusan rapat di sini, mereka harus hormati juga sama dengan kita menghormati keputusan rapat yang ada di komisi lain.

Jadi saya kira begitu, Pimpinan, argumen tambahan yang bisa saya sampaikan. Karena menurut saya sudah masuk atau tidak masuk sekali lagi sebetulnya tidak substansial.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Ibu Anggi. Setelah itu kita *voting*.

**F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Pertanyaan saya adakah sebenarnya larangan kalau kita mengirim ke Pimpinan DPR? Tidak ada, hanya ketidaklaziman. Tetapi juga itu tadi, bahwa penguatan ide ini dari..., seperti disampaikan oleh Pak Ansory bahwa hampir semuanya Anggota tadi berbicara tentang bagaimana kewenangan ini dikembalikan ke Kemenaker. Lagi-lagi sebenarnya saya bertahan bahwa penguatan kita, penguatan dari komisi ini sangat penting sekali. Saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa kita seolah-olah menjadi hanya tidak berguna atau apa namanya, seolah-olah tidak ada. Saya tidak setuju. Karena justru ini adalah kita memberikan penguatan kepada DPR bahwa kita benar-benar sangat perhatian dan sangat mengharapkan program ini bekerja dengan baik. Dan kalau misalnya oke sekarang memang zamannya sangat *realtime*, kita bicara di sini semua orang juga sudah dengar, tetapi bagaimana menjadi jaminan bahwa ini menjadi bagian yang diperhatikan oleh pemerintah atau DPR terutama. Di mana jaminannya? Dengan surat ini menjadi jaminan bahwa ini instrumen untuk bisa memberikan jaminan bahwa aspirasi dari Komisi IX itu diperhatikan oleh Pimpinan DPR.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Karena ini sama-sama kuat dan belum ada titik temunya, kita langsung *voting* per fraksi seperti tadi biar bisa maju.

Fraksi PDI Perjuangan, ini dicantum atau didrop? Silakan, Pak Imam.

**F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Pak Ketua, saya Sekjen PDI Perjuangan, artinya apa yang saya sampaikan itu suara PDI seluruh Indonesia. Saya setuju dengan teman-teman, dengan Pak Saleh juga setuju nomor 1 oke. Nomor 2 hanya untuk penguatan kayak Pak Ansory bilang tadi, tidak apa-apa. Ini tujuannya teman-teman itu baik semua dan membantu Ibu Menteri. Jadi Ibu Menteri nanti kalau cerita sama Menko maupun presiden kuat, karena yang *ngomong* ini komisi yang punya *duit*. Jadi 1 atau 2 *it's ok*, sama Pak Ansory sama Pak Saleh *it's ok*.

Itu dari PDI Perjuangan.

Terima kasih, Ketua.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Izin, Pimpinan.

Mohon 'setuju/tidak setuju' saja, jangan menjelaskan lagi.

**KETUA RAPAT:**

Baik, langsung saja.

Dari Fraksi Partai Golkar.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H.):**

Menurut kami kalau penguatan juga tidak apa-apa, kami setuju dengan untuk penguatan. Tapi dengan catatan, kita tunggu kabar dulu dari Ibu Menteri. Kalau ternyata responsnya barangkali agak-agak sulit, baru berkirim. Jadi ini merupakan *escape close*, jadi Pimpinan bisa. Ini kan keputusan kita bersama, pengertian 'bisa', bisa iya, bisa juga tidak. Kalau memang sudah direspons presiden kan tentunya tidak diperlukan lagi.

Mungkin itu saja.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ini sebagai catatan saja.

Dulu Ibu Menteri BUMN itu surat berkali-kali DPR juga jalan terus itu presiden.

Silakan dari Fraksi Partai Gerindra.

**F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Ini kan tentang kepastian saja. Karena mengingat juga waktu, ini sudah bulan apa, 90 hari kata Pak Saleh. Kalau saya karena dengan waktunya juga

*mepet*. Hitungnya yang benar, Bang. Makanya, ini sudah bulan November, Desember tinggal satu bulan lagi, 40 hari *lah* kurang lebih. Jadi dengan pertimbangan juga waktu yang mendesak tentu perlu penguatan. Jadi kami sepakat ini tetap ada.

**KETUA RAPAT:**

Berikutnya dari Partai Nasdem.

**F-NASDEM (Ir. Hj. SRI KUSTINA):**

Izin, Ketua.

Kami dari Partai Nasdem. Jadi saya setuju dengan Ketua. Kalau bicara dari fraksi kami bahwa kami menolak, karena sebaiknya kita bekerja dulu komisi. Komisi kita bekerja, kita tunggu jawaban, baru kalau sudah darurat baru kita ke Pimpinan DPR RI.

Itu dari kami.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Berikutnya dari Fraksi PKB.

**F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Jelas sikap saya, karena kami mewakili teman-teman dari PKB. Karena waktunya mendesak dan ini menjadi prioritas menurut saya, jadi harus ada.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Fraksi Partai Demokrat.

**F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):**

Tidak setuju.

**KETUA RAPAT:**

Didrop ya?

**F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):**

Drop, karena belum terlalu *urgent* kayaknya.

**KETUA RAPAT:**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

**F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

Karena ini hal penting dan hajat hidup orang banyak, setuju.

**KETUA RAPAT:**

Fraksi Partai Amanat Nasional.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Sudah jelas kalau saya itu. Saya ini antara netral atau tidak setuju. Jadi paling tinggi tidak setuju saja *lah* supaya jelas. Sekali lagi saya jelaskan, masuk atau tidak masuk tidak bermakna menurut saya, makanya antara netral dan tidak setuju. Bagus tidak setuju saja supaya jelas.

**KETUA RAPAT:**

PPP tidak ada.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Tukang ketiknya siapa? Jangan dibuat merah yang tidak setuju itu. Itu nilainya sama dengan setuju atau tidak setuju, sama. Di sini kan kita saudara semua, kenapa Saudara bikin merah? Buat saja sudah menang mereka ya sudah masukkan. Ini tata krama menulis, seakan-akan yang merah itu salah, yang tidak setuju itu. Tadi Ibu Ketua pun setuju/tidak setuju. Pak Melki kayaknya juga tadi nada-nadanya tidak setuju juga. Tapi jangan dibuat merah.

**KETUA RAPAT:**

Jadi memang gara-gara Pak Saleh *ngomong* begitu, omongan Ibu Dewi ini maksudnya biar *clear* karena kan “setuju dengan catatan”, itu berarti bagaimana itu?

**INTERUPSI F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Sudah, putusan dihitung, sudah selesai, jangan lama-lama.

**KETUA RAPAT:**

Karena, Ibu Dewi, itu Pak Saleh tadi bilang masih dipertegas itu.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H.):**

Kalau menurut hemat kami justru poin ke 2 ini adalah satu titik temu. Satu sisi kita memberikan kesempatan pekerjaan kepada Ibu Menteri untuk membicarakannya dengan presiden, tapi kita tidak menafikkan, karena Ibu Menteri ini adalah mitra kerja kita. Kita pun juga *kepepet* dengan waktu. Maka sudah menjadi suatu kewajaran juga kita yang mempunyai mitra Kementerian Tenaga Kerja juga membantu. Karena dasar itulah makanya kita menunggu

dulu kabarnya. Dan harus menunggu lagi kita kumpul lagi untuk buat persetujuan untuk buat surat ataupun menghadap *lah*. Mungkin sebelum buat surat kan bisa didahului, itu kan teknis, didahului dengan menghadap pada Pimpinan DPR dan sebagainya, itu nanti teknis kita saja intern. Jadi saya tetap dengan pendapat setuju dengan catatan bahwa memberi kesempatan dulu kepada Ibu Menteri untuk berkomunikasi dengan presiden.

Terima kasih.

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Itu berarti hasilnya 4:3, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Jadi prinsipnya begini, poin ini kita setuju dengan catatan yang Ibu Dewi sampaikan semoga lebih cepat lebih baik ada kabar dari Ibu Menteri.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

**F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Setuju kalau tidak digaris merah.

**KETUA RAPAT:**

3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mempersiapkan *roadmap* pelaksanaan program kartu pra kerja secara komprehensif dan integratif melalui studi kelayakan, sehingga tepat sasaran dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan Indonesia, terutama dalam menghadapi bonus demografi 2030.

**INTERUPSI F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):**

Pimpinan, yang penting itu nomor 1, nomor 2. Nomor 3-nya itu bumbu saja. Jadi fokusnya 1-2 saja, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Jadi nomor 3 ke bawah kita drop?

**INTERUPSI F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Drop saja, selesai itu barang.

**KETUA RAPAT:**

Oke ya 3 ke bawah kita drop ya?

Kemudian sekarang kita mendengarkan sikap dan respon dari pemerintah.

Silakan, Ibu Menteri. Ini Ibu Menteri lagi mengenang masa-masa jadi DPR kayak begini ini.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Sungguh, Pak Ketua dan Bapak/Ibu Anggota, saya sedang menikmati rapat sore hari ini. Saya *cancel* kegiatan, tapi saya terhibur dengan rapat pada sore hari ini dan memberikan sungguh sangat merasa mendapatkan *support* yang luar biasa dari Bapak/Ibu semua, itu menjadi *spirit* bagi kami untuk menjalankan kesimpulan nomor 1.

Soal kesimpulan yang nomor 2 tidak ada pilihan bagi saya untuk menyetujuinya, karena Pak Saleh Daulay jelek-jelek begini juga pernah memimpin komisi dan itu juga biasa kita berkirin surat kepada...

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):**

Saya bilang tetap saja bisa, tapi belum tentu mereka mengerjakan. Seperti yang Komisi VII tadi, kan saya contohkan Komisi VII.

**KETUA RAPAT:**

Memang, karena saking merasa dekat jadi kayak begini.  
Silakan, Ibu Menteri.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Jadi kami dalam posisi menyetujui terhadap seluruh kesimpulan yang dibuat oleh Komisi IX.

**F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):**

Itu baru top, dibantu kita.

**KETUA RAPAT:**

Baik ya, saya kira persetujuan dari Ibu Menteri ini berarti kita sudah sepakat dua poin ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Dengan demikian kesimpulan sudah kita sama-sama sepakati. Dan sebelum rapat kami akhiri, kami berikan kesempatan kepada Ibu Menteri untuk memberikan kata-kata atau catatan terakhir.

Silakan, Ibu.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (IDA FAUZIAH):**

Yang pertama kami ingin memberikan apresiasi atas dukungan yang luar biasa dari Bapak/Ibu untuk pelaksanaan program kartu pra kerja. Program kartu pra kerja ini membutuhkan *support* dan dukungan dari seluruh *stakeholder*, termasuk sebenarnya dari Komisi IX.



Terhadap persoalan teknis yang lainnya saya kira kita masih punya ruang untuk mendiskusikan lebih jauh apakah itu ada di Kementerian Ketenagakerjaan atau di Kemenko. Tapi prinsipnya ini adalah program yang sangat penting untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi angkatan kerja kita.

Terima kasih, Pak Ketua dan seluruh Bapak/Ibu semua, atas seluruh *support* dan dukungan kepada program kartu pra kerja.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Sebelum rapat saya tutup, kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai.

**(BERDOA BERSAMA)**

Berdoa selesai.

Dan mengucapkan syukur *alhamdulillah* rapat saya akhiri.

Selamat sore, sampai ketemu di kesempatan mendatang.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.55 WIB)**

Jakarta, 16 Januari 2020

a.n. KETUA RAPAT

Sekretaris Rapat,

Yanto Supriyanto, S.H.

NIP.196305241992031001

